

346.0184  
SUR

u ei



**KESADARAN HUKUM DALAM MENGGUNAKAN  
HAK DESAIN INDUSTRI OLEH PARA PENGRAJIN  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK  
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN  
KEMANDIRIAN USAHA**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**LELI JOKO SURYONO  
NIM.B4A 099 096**

**Pembimbing :**

**PROF. RONNY HANITJO SOEMITRO, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**KESADARAN HUKUM DALAM MENGGUNAKAN HAK DESAIN INDUSTRI  
OLEH PARA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK  
MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN USAHA**

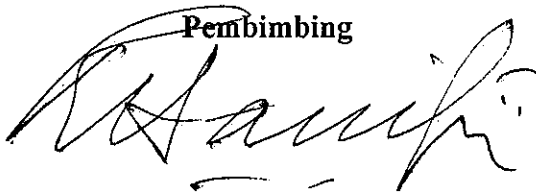
Oleh:

**LELI JOKO SURYONO**  
B4A 099 096

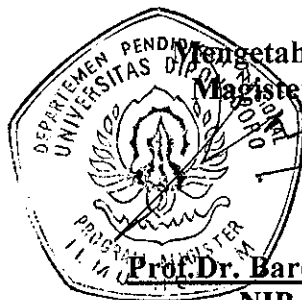
**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, 13 Mei 2002**

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum**

**Pembimbing**



**Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH**  
NIP. 130 350 517



**Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.**  
NIP. 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Rahim-Nya jualah tugas penulisan tesis yang berjudul KESADARAN HUKUM DALAM MENGGUNAKAN HAK DESAIN INDUSTRI OLEH PARA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN USAHA dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penyelesaian tesis ini bukanlah merupakan akhir dari tugas keilmuan yang harus penulis jalani, tetapi merupakan babak baru dari kewajiban-kewajiban tanggung jawab keilmuan yang harus penulis lakukan dalam menempuh karier sebagai pengajar dalam ilmu yang penulis dalami ini. Penulis sangat menyadari bila dalam penulisan tesis ini banyak memerlukan penyempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulisan ini. Karenannya segala kritik dan saran untuk penyempurnaannya sangatlah diharapkan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan selama penulisan tesis ini berlangsung.

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan serta petunjuk kepada penulis, untuk itu melalui halaman ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor dan Bapak Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, beserta staf.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak/ Ibu dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, atas segala bimbingan yang diberikan selama penulis mengikuti pendidikan.

4. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan bantuan biaya dan moril kepada penulis sehingga penulisan tesis ini selesai.
5. Rekan-rekan Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya pada Pak. Yanto, Pak Muhdi, Pak. Mandaru, Pak Qolil, Pak Trisno, Bu Wiwik, dan Bu Yeni yang telah memberikan dorongan kepada penulis mulai dari awal kuliah hingga selesainya pendidikan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan semangat atas terselesaikannya tesis ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dapat penulis sampaikan kalau tesis ini penulis persembahkan kepada mereka yang paling banyak berkorban saat penulis menempuh studi dan paling setia menemani penulis dalam suka dan duka, isteri dan anak saya : Ika Nurul Qamari SE, Msi, Arsyad Hikam, dan Bapak/ Ibu Slamet Mulyono sebagai orang tua penulis yang telah memberikan berbagai dorongan dan do'a yang tidak sedikit agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana. Juga pada kakak dan adikku, mBak Lies dan Dik. Uut serta keponakan-keponakan (Robi, Gita, Yora, Habib dan Lia) atas dorongan dan do'anya.

Semarang, Mei 2002

Leli Joko Suryono.

## RINGKASAN

Secara hukum adanya perlindungan hukum dibidang hak desain industri , bertujuan untuk merekayasa masyarakat (para desainer) supaya meningkatkan daya inovasi, kreasi dan kemandirian dalam menciptakan produk-produk desainnya, sehingga produk-produk desain itu mempunyai kualitas dan daya saing tinggi baik dipasar lokal, regional maupun internasional.

Di samping itu,adanya perlindungan hak desain industri, juga menuntut agar para desainer (termasuk di sini desainer kerajinan) untuk secara sadar melindungi hak desain industrinya dari upaya peniruan (penjiplakan) yang dilakukan pihak pesaingnya, dengan melakukan pendaftaran atas hak desain industrinya ke kantor pendaftaran.

Sehubungan dengan, persoalan kesadaran hukum masyarakat desainer khususnya desainer kerajinan di DIY, maka permasalahan yang diangkat adalah: Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengrajin di dalam memanfaatkan hak desain industri yang mereka miliki?;Apakah adanya hak desain industri dapat memotivasi pada sikap dan perilaku para desainer kerajinan untuk meningkatkan kreatifitas dan kualitas produk kerajinan mereka sehingga berdampak pada peningkatan daya saing atas produk kerajinan tersebut serta pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan para desainer? Bagaimana upaya-upaya, yang perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing dalam produksi kerajinan dengan berdasarkan pada desain industri?.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui derajat kesadaran hukum dari masyarakat meliputi empat hal yaitu pengetahuan hukum,pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum dari masyarakat tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengrajin dalam melindungi hak desain industrinya melalui upaya pendaftaran haknya itu ke kantor pendaftaran. Hal ini karena di dalam memanfaatkan desain industri, pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengrajin masih sebatas pada pemenuhan kebutuhan di dalam proses produksi, bukan pada pemenuhan perlindungan hukumnya. Oleh karena itu sikap dan perilakunya tidak dimotivasi dengan adanya pengaturan dibidang desain industri, akan tetapi lebih didasarkan pada faktor kebutuhan akan adanya persaingan diantara para pengrajin itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini belum dilakukan sebagaimana mestinya, karena menghadapi berbagai kendala, baik itu bersifat kendala budaya yang kurang kondusif untuk diberlakukannya hak desain industri, juga kendala-kendala yang bersifat teknis seperti; biaya pendaftaran yang relatif mahal, pengurusannya memakan waktu lama sementara usia desain produk kerajinan dipasaran hanya bersifat sementara ( ± 2-3 bulan) saja, dan kendala yang dihadapi oleh aparaturnya penegak hukum dibidang desain industri itu sendiri masih lemah baik ditinjau dari sudut kuantitasnya maupun kualitasnya..

## ABSTRACT

Legal protection on industrial design rights aims to engineer designers in improving their innovation, creativity, and independency to create high quality as well as high-competitiveness products for both national and international markets.

In addition, the legal protection drives designers (including crafts designers) to be aware of the importance of their industrial design protection rights from illegal duplication conducted by competitors. They should register for industrial design rights to the legal office.

The problem questions of the research are: First, to what extent the knowledge of crafts man in utilizing the industrial design rights? Secondly, could the rights motivate the attitude and behaviour of crafts designers to improve their creativity and crafts quality that improve their product competitiveness, welfare and independency? Finally, what kind of efforts that should be performed by crafts men to increase their product competitiveness?

There are four indicators to measure the degree of public legal consciousness, which are legal knowledge, legal understanding, legal attitude and legal behaviour.

The research result shows that most of crafts men are unaware of the importance of legal industrial rights to protect their own design. This is due to the lack of knowledge and limited understanding on legal rights. They produce crafts limited to production process needs, not for legal protection needs. Hence, the attitude and behaviour of crafts men are not motivated by the industrial design rule, but the competition among themselves. Some efforts to overcome the problems faced three main challenges; i.e unfavourable cultural obstacles; technical obstacles such as relatively expensive registration fee, inefficient procedures; and legal enforcement obstacles.

## DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK DALAM BAHASA INGGRIS.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	16
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian .....	18
D. Metode Penelitian .....	19
E. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II. Tinjauan Terhadap Peran, Fungsi, Budaya, Dan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat .....	28
A. Peran Hukum di Dalam Perubahan dan Perkembangan Masyarakat .....	28
B. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat .....	40
C. Pengaruh Nilai Sosial Budaya Terhadap Hukum .....	59
D. Kesadaran Hukum dan Pencapaian Tujuan Hukum Dalam Masyarakat .....	75
BAB III. Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan Hak Desain Industri Oleh Para Pengrajin Di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Kemandirian Usaha .....	93
A. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Pengrajin di Dalam Memanfaatkan Hak Desain Industri .....	93
B. Pengaruh Pengaturan Hak Desain Industri Dalam Memotivasi Sikap dan Prilaku Desainer Kerajinan Untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kualitas Serta Daya Saing Atas Produk Kerajinan .....	118

C. Upaya-Upaya Peningkatan Daya Saing Dalam Produksi Kerajinan Dengan Berdasarkan Hak Desain Industri .....	137
D. Mengfungsikan Hukum di Bidang Hak Desain Industri (Undang-Undang No. 31 tahun 2000) Sebagai Sarana Untuk Melakukan Rekayasa Sosial (Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Usaha Para Pengrajin di DIY)....	163
BAB. IV. Penutup .....	172
A. Kesimpulan .....	172
B. Saran .....	176
DAFTAR PUSTAKA	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu perubahan mendasar yang menyangkut pembangunan bangsa di masa globalisasi dan liberalisasi adalah persyaratan dari keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara. Persyaratan tersebut adalah tingginya kemampuan bersaing setiap negara di dunia, harus mampu membangun berbagai infrastruktur yang dapat mengembangkan daya saing mereka masing-masing. Pembangunan infrastruktur, dengan demikian merupakan suatu prioritas dalam perencanaan pembangunan setiap negara yang ingin berhasil membangun negerinya pada zaman globalisasi dan liberalisasi.<sup>1</sup>

Pada masa-masa sekarang dan mendatang masalah keberhasilan pembangunan tidak akan hanya terjadi antar kawasan dalam suatu negara saja tetapi juga antar negara di dunia. Hal ini disebabkan karena baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang akan sama-sama bersaing memperebutkan sumber-sumber investasi untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan daya saing perekonomian mereka masing-masing di pasar internasional.

Infrastruktur dan pengembangannya pada masa globalisasi dan liberalisasi tersebut tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur ekonomi<sup>2</sup>, tetapi keberhasilan suatu negara, khususnya negara berkembang, dalam rangka

---

<sup>1</sup> Loekman Soetrisno, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Liberalisasi Ekonomi, Makalah dalam buku Liberalisasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan, P3PK UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal. 121.

<sup>2</sup> Ibid, hal 122.

meningkatkan keberhasilan pembangunan mereka, akan sangat tergantung pula pada kemampuan pemerintah negara yang sedang berkembang untuk menciptakan suatu infrastruktur politik, hukum, sosial dan budaya yang mampu menciptakan dan mengembangkan keamanan dan kemampuan bersaing di kalangan masyarakat.

Keberhasilan suatu negara jika hanya mengembangkan infrastruktur ekonomi, tetapi gagal mengembangkan infrastruktur politik, hukum, sosial dan budayanya, akan mengalami kesulitan dalam menciptakan suatu proses pembangunan yang lestari. Ini berarti diperlukan adanya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur ekonomi dan pembangunan infrastruktur politik, hukum, sosial dan budaya apabila suatu negara tidak ingin mengalami disintegrasi ketika negara itu menghadapi kondisi perubahan seperti selama ini dialami Rusia.

Bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia adanya globalisasi dan liberalisasi secara pesimis mengandung resiko yang cukup besar.<sup>3</sup> Sebab di pasar akan bertemu kekuatan-kekuatan yang tidak berimbang, yaitu negara-negara industri, NIC, s, dan diantara negara-negara yang sedang berkembang itu sendiri.

Negara-negara maju mempunyai beberapa cara melaksanakan proteksi yang non-tarif, sekalipun dalam era globalisasi dan liberalisasi yaitu melalui paten dan berbagai bentuk hak-hak keilmuan yang pasti akan menghambat ipteks negara-negara

---

<sup>3</sup> Dochak latief, *Perekonomian Indonesia di Tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad-21*, Makalah dalam buku *Problema Glabalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama*, Muhammadiyah University Press, UMS, Surakarta, 2000, hal. 166.

yang sedang berkembang. Juga berdasarkan pada alasan - alasan politik tertentu mereka dapat memaksakan pendapatnya yang merugikan negara berkembang.<sup>4</sup>

Masalah di atas sebenarnya jika dihadapi secara optimis bukanlah merupakan suatu kendala, akan tetapi merupakan suatu gejala yang harus dihadapi dan dicermati sehingga orang tidak salah dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan kehidupan dan dunia masa depan. Gejala yang dicermati adalah untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dan harus dijawab dengan tepat. Sebab global itu sendiri adalah tantangan, yang memberikan dampak dan harus dihadapi serta dijawab dengan secara bersamaan, yakni tantangan ekonomi, tantangan teknologi, tantangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Bagi suatu bangsa yang mampu meningkatkan kualitas manusianya dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada kemampuan yang ada pada bangsa yang bersangkutan, serta kemampuan untuk melindungi dan meningkatkan hasil-hasil pembangunan yang selama ini sudah dicapai. Maka bangsa tersebut dapatlah dikatakan telah mampu menjawab tantangan dari adanya globalisasi tersebut.

Sebagai salah satu dari infrastruktur pembangunan, pembangunan hukum senantiasa dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari pada yang telah dicapai sebelumnya. Menghadapi kenyataan yang demikian itu, peranan hukum semakin penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal.166.

sebagai mana telah ditetapkan. Fungsi<sup>5</sup> hukum tidak hanya sekedar sebagai alat pengendali sosial (*social control*) saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat sebagaimana yang telah dicita-citakan. Dengan kata lain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya. Dengan menciptakan pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya, juga berarti mengubah bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.

Keterlibatan hukum yang semakin aktif kedalam persoalan-persoalan yang menyangkut perubahan sosial dan ekonomi tersebut, justru memunculkan permasalahan yang mengarah pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana untuk turut menyusun tata kehidupan baru. Hal ini tampak pada segi pengaturan oleh hukum, baik dari segi legitimasinya, maupun aspek keefektifan penerapannya. persoalan yang muncul tersebut dengan demikian bergeser dari bagaimana mengatur sesuatu dengan prosedur hukum, kearah bagaimana pengaturan tersebut sehingga dalam masyarakat akan timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum.

Dalam suasana dimana masyarakat menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang begitu cepat, perhatian tidak lagi diarahkan pada seputar penggarapan

---

<sup>5</sup> Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, 1993, hal.1.

hukum sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten<sup>6</sup>, akan tetapi hukum lebih dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial dan ekonomi. Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan-kebiasaan yang telah membentuk di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, melainkan hukum diharapkan pula sebagai pengungkap yang tepat dari kekuatan-kekuatan baru yang timbul dan hendak membentuk masyarakat menurut tuntutan keadaan serta pandangan-pandangan yang baru.

Pernyataan di atas menekankan bahwa hukum bukanlah suatu hal yang bersifat statis melainkan sesuatu yang bersifat dinamis yaitu hukum dari waktu-kewaktu mengalami perubahan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis sebagai akibat dari perkembangan dan pertumbuhan hukum itu sendiri, khususnya hukum dibidang ekonomi sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat domestik maupun yang bersifat internasional.

Bagi bangsa Indonesia<sup>7</sup> faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan hukum dibidang ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan tata ekonomi internasional yang secara radikal meniadakan batas-batas negara, terutama untuk perdagangan dan investasi.  
Perubahan tata ekonomi internasional yang didorong oleh kepentingan masing-masing negara, melahirkan sikap untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan di hampir semua negara disebagian kawasan bahkan

---

<sup>6</sup> Adanya pemahaman ini dikarenakan tingkat studi di Indonesia masih lebih banyak di dasarkan pada pendekatan dan analisis hukum yang bersifat dogmatis.

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 25.

hanya antara dua negara, misalnya GATT (*General Agreement on Tarif and Trade*), AFTA, dan lain sebagainya.

Perubahan tata ekonomi internasional mendorong pula terjadinya penyesuaian peraturan-peraturan oleh masing-masing negara sehingga menciptakan peraturan dibidang investasi dan perdagangan yang sejalan dengan tata ekonomi baru.

2. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan berbagai kebutuhan hukum dibidang ekonomi menjadi semakin nyata dan merupakan kebutuhan nasional bagi setiap negara yang bersangkutan, seperti Indonesia.

Indonesia saat ini sangat membutuhkan berbagai perangkat hukum yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hukum perekonomian nasional dan dunia usaha pada umumnya antara lain yang sudah dilaksanakan adalah dengan dikeluarkannya perundang-undangan dibidang Hak Atas Karya Intelektual.

3. Politik hukum Indonesia yang mengacu pada pembentukan hukum nasional.

Politik hukum Indonesia sampai dengan saat ini tetap pada proses membentuk perangkat hukum nasional. Diharapkan hukum nasional kita dapat menjangkau setiap kegiatan dan setiap perbuatan hukum dengan kapasitasnya yang benar dan handal dalam pengertian dapat menjadi perangkat hukum yang

memberi: Keadilan, Kepastian Hukum, dan sesuai dengan rasa Keadilan Masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi hukum ekonomi Indonesia<sup>8</sup> dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengaruh Internasional yang memiliki potensi untuk mempengaruhi hukum nasional Indonesia (hukum domestik), menuju pada hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan lain diluar kepentingan domestik. Konkritnya adalah pengaruh sistem hukum Anglo Saxon. khususnya Amerika Serikat terhadap produk perundang-undangan Indonesia yang pada awalnya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental antara lain pada peraturan Hak Atas Karya Intelektual.
2. Pelaku ekonomi Indonesia terutama yang mempunyai orientasi pasar internasional mau tidak mau, tahu tidak tahu, sadar-tidak sadar, perlu dan harus dapat memahami, mengikuti ketentuan importir luar negeri dengan semua persyaratan dan konsekuensi hukum yang timbul karenanya.
3. Kondisi Indonesia yang merupakan pasar potensial yang pada akhirnya menjadi incaran pasar internasional/pasar bebas, harus mampu menyesuaikan dengan permintaan pasar, agar tetap dapat eksis di pasar domestik.

Menyadari akan kondisi di atas dan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada hubungan ekonomi dan perdagangan

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 26.

internasional serta untuk meningkatkan daya saing barang-barang produk Indonesia untuk pasaran ekspor dan domestik. Maka pada tahun 1994 Indonesia telah ikut serta menandatangani persetujuan perdagangan dunia, melakukan ratifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam GATT-WTO, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

Pada dasarnya pola perdagangan multilateral sebagaimana yang terdapat dalam GATT-WTO bertujuan untuk perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Adanya ratifikasi tersebut membawa konsekwensi segala peraturan hukum yang mengatur bidang ekonomi yang telah ada maupun yang akan ada haruslah memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam GATT-WTO tersebut.

Salah satu norma yang harus menyesuaikan dengan GATT-WTO tersebut adalah norma yang berkaitan dengan perlindungan di bidang Hak Atas Karya Intelektual (HKI) sebagaimana yang terdapat dalam persetujuan TRIP,s (*Agreement on Trade Related Aspects of Itelectual Property Righs, Including Trade in Counterfeit Goods*), persetujuan ini harus telah diberlakukan mulai tahun 2000. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis<sup>9</sup>, yaitu:

---

<sup>9</sup> Sambutan Dirjen HKI, Makalah dalam Seminar, Peranan HKI dalam Persaingan Pasar Bebas, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, hal. 2.



1. Menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan perangkat hukum di bidang HKI sesuai dengan TRIP,s, baik dalam rangka penyempurnaan undang-undang yang sudah ada, maupun pembentukan undang-undang baru berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HKI dalam segala aspeknya, baik SDM, sarana dan prasarana maupun kelembagaannya.
3. Meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran dibidang HKI.
4. Meningkatkan Kesadaran HKI Masyarakat.

Langkah strategis pertama yang telah dilakukan Pemerintah adalah dengan mengeluarkan dan merevisi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang HKI, yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, merevisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997, merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten.
3. Undang Nomor 14 tahun 1997, merevisi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001, tentang Rahasia Dagang.
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Hak Desain Industri.

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2001, tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain industri menurut UNINDO<sup>10</sup> (*United Nations Development Organization*), sebagai suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri.

Sedangkan menurut ICSID<sup>11</sup> (*International Council Society of Industrial Design*) mendefinisikan desain industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu obyek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen.

Menurut Undang-Undang Desain Industri<sup>12</sup>, mendefinisikan Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan nilai estetis yang diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

<sup>10</sup> Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri Indonesia*, Bandung, 1999, hal 7.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2001 tentang Desain Industri.

Sedangkan menurut Misha Black sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana<sup>13</sup>, dalam bukunya yang berjudul *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, mengatakan bahwa suatu desain industri menyangkut beberapa aspek dari sebuah produk industri yang terdiri dari:

1. Aspek kegunaan, mengacu kepada interaksi langsung antara manusia dan produk dengan dilandasi pertimbangan-pertimbangan seperti, kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, perawatan, perbaikan, termasuk juga faktor-faktor ergonomi dan antropometri.
2. Aspek fungsi, mengacu pada prinsip fisik dan teknik dari desain dan dilandasi oleh pertimbangan permesinan, persediaan bahan baku, tata cara kerja, perakitan, tingkat ketrampilan tenaga kerja, efisiensi, penghematan biaya, toleransi, kelayakan, standarisasi, dan lain-lain.
3. Aspek pemasaran, berorientasi pada potensi kebutuhan konsumen yang dilandasi pertimbangan akan kebutuhan dan keinginan, kebijakan produk, diversifikasi produk, skala prioritas, harga, jaringan distribusi, dan lain-lain.
4. Aspek nilai estetis dan penampilan suatu produk, mengacu pada nilai visual dan psikologis dari desain yang dilandasi oleh pertimbangan seperti: bentuk keseluruhan, unsur penampilan, pembuatan detail, proporsi, tekstur, warna, grafis, dan penyelesaian akhir.

Dengan melihat definisi dari desain industri di atas, dapatlah dipahami bahwa desain industri pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk

---

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hal. 9.

industri yang selain berorientasi pada unsur fungsi, juga tidak meninggalkan unsur estetika, ekonomi dan etis. Unsur estetika inilah bahkan merupakan salah satu nilai lebih dari sebuah produk industri, yang selanjutnya nilai lebih tersebut menjadikan suatu produk industri tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sehingga bernilai ekonomi yang dapat mengungguli para pesaingnya. Melalui peran desain industri maka dunia industri akan mampu meningkatkan produktifitas, kualitas, dan daya saing demi mempertahankan dan memperluas pangsa pasar baik domestik maupun internasional.

Sebuah produk industri hasil dari desain terwujud setelah melalui beberapa tahapan, mulai dari ide, pengujian, manufaktur, dan pemasaran. Dalam setiap tahapan tersebut dapat pula tercipta suatu inovasi teknis, inovasi sistem produksi, inovasi material, inovasi ekonomi produksi dan seterusnya yang kemudian menjadi ciri khas dari produk tersebut di samping faktor bentuknya. Dalam tahapan-tahapan tersebut desainer berada dan selalu dilibatkan sehingga produk tersebut terwujud dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sektor industri dan kerajinan akan berjalan lambat jika tidak mendapat dukungan dari inovasi para desainer oleh karena itu bidang industri dan kerajinan tidak akan terpisahkan dari bidang desain. Desainer melihat pengembangan industri dan kerajinan tidak hanya dari kepentingan industri dan kerajinan semata, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara luas. Tampak kini bahwa hubungan di antara bidang produk industri dan kerajinan dengan bidang desain terlibat dalam suatu kegiatan perindustrian. Unsur-unsur seperti teknik produksi, material, suku cadang,

unsur penunjang, jumlah produksi, penyebaran, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan aspek-aspek lainnya merupakan unsur terkait di dalam kedua bidang tersebut. Masalah lain yang penting dari kedua bidang tersebut dalam kerangka kehidupan ekonomi, yaitu pembinaan, sehingga pembinaan kedua bidang tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam hal pembinaan ini tidak terlepas dengan pembinaan dari segi hukumnya.

Hal tersebut terlihat dalam ketentuan pembinaan usaha, peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan merupakan bidang yang sangat mendapat perhatian dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat<sup>14</sup>. Dalam pembinaan tersebut peningkatan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan. Hasil penelitian dan pengembangan wajib untuk selalu dijaga karena para pesaing dalam rangka mengungguli penguasaan pasar sering melakukan kecurangan diantaranya dengan melakukan praktek spionase industri, pencurian ide atau kegiatan lain yang sejenis.

Mengenai eratnya hubungan antara penelitian dan pengembangan tersebut tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa bidang desain industri memerlukan suatu landasan penunjang dalam aspek yuridisnya. Hal tersebut adalah agar supaya semua kepentingan di bidang desain industri dapat terlindung. Terutama demi mengimbangi semakin ketatnya persaingan, karenanya perlu usaha menjaga keamanan produk yang

---

<sup>14</sup> Pasal 15 Undang-Undang No. 9 tahun 1995, tentang Usaha Kecil.

diperdagangkan di pasaran internasional dari kemungkinan peniruan dan persaingan tidak jujur.

Hasil desain setelah melalui tahapan produksi untuk mendapatkan nilai ekonomi harus dipasarkan, maka bidang desain tidak bisa tidak terlepas dari bidang pemasaran atau dengan kata lain terkait dengan aspek perdagangan. Oleh karena itu desainer harus pula memperhatikan faktor ekonomi, penuangan ekspresi tanpa pretensi kearah kompetisi pasar akan tidak berarti. Desain harus laku, harus memasyarakat. Demikian pula kalangan industriawan dan para perajin, sadar betul bahwa produk itu tidak boleh asal-asalan, melainkan harus pula menimbulkan minat beli, harus layak secara keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan juga harus indah. Tuntutan yang demikian saat sekarang ini semakin perlu mendapat perhatian, terlebih dalam suatu pasar bebas dalam era globalisasi.

Era pasar bebas dan terbuka membuat segala macam produk baik barang maupun jasa tidak mengenal lagi batas negara dan proteksi, yang diperlukan hanyalah profesionalisme, efisiensi, produktifitas dan daya saing. Dalam era tersebut hasil desainer harus mampu bersaing atau mempunyai daya saing tinggi dengan produk-produk desainer dari negara lain di pasaran internasional maupun di dalam negeri.

Efisiensi dan daya saing tinggi hanya dapat dicapai jika para desainer mengadakan berbagai penyesuaian dan perubahan. Secara konkretnya pula para desainer harus menyesuaikan diri dalam norma-norma hukum internasional yang mengatur bidang desain baik langsung maupun tidak langsung. Desainer harus mau

dan mampu mengidentifikasi masalah dan analisis dampak dari berbagai ketentuan WTO yang berkaitan dengan desain.

Mengidentifikasi masalah dan analisis dampak dari perkembangan ketentuan di bidang desain bagi desainer saat ini menjadi keharusan, agar mereka tidak tergilas oleh desainer negara lain, oleh karena dengan pemahaman yang tepat pada hukum yang berlaku maka desainer akan terhindar dari kerugian. Meskipun diakui juga bahwa perlindungan di bidang desain bukan satu-satunya alat untuk menjamin berkembangnya sektor desain, teknologi dan industri yang sehat dalam masyarakat, karena masih ada cara-cara pengaturan dalam bidang politik, ekonomi dan social lainnya yang turut menentukan, tetapi paling tidak adanya ketentuan di bidang desain merupakan landasan yang utama untuk berkembangnya desain, teknologi dan industri.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa perhatian dan penghargaan<sup>15</sup> di dalam pengembangan desain industri mempunyai peran untuk keberhasilan dalam persaingan merebut pasar baik domestik maupun internasional. Namun dalam kenyataannya<sup>16</sup> sebagaimana hasil pengamatan para ahli yang berkecimpung dalam bidang desain industri, kehidupan bidang desain di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks.

---

<sup>15</sup> penghargaan ini meliputi penghargaan terhadap hasil desain dan penghargaan terhadap perangkat hukum yang mengatur tentang desain industri.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 34.

Salah satu permasalahannya<sup>17</sup> masyarakat Indonesia secara umum masih kurang memahami dan mengetahui dengan baik mengenai hak atas kekayaan intelektual dibidang desain industri. Kondisi ini tidak hanya menimpa masyarakat awam (konsumen) yang secara tidak langsung berkecimpung di bidang desain, tetapi hal itu juga menimpa kalangan masyarakat desainer itu sendiri bahkan adakalanya aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukumpun masih banyak yang tidak memahaminya. Ketidak pahaman dan ketidak tahuan mereka begitu besar sehingga mereka tidak tahu dan tidak paham kapan serta bagaimana harus menegakkan dan melindungi haknya. Keadaan ini tentunya sangat potensial untuk menimbulkan kerugian bagi pemilik hak desain industri apabila hasil karya desainnya dibajak oleh pihak ketiga.

#### B. Permasalahan

Desain merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah produk yang banyak dipasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk karena desain yang menarik daripada kegunaan barang tersebut<sup>18</sup>. Tidak jarang pula konsumen harus membayar mahal suatu produk barang karena desain sebuah produk yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan daya saing bagi pengusaha/perusahaan dalam persaingannya dengan yang lain yang sejenis. Untuk itu sewajarnya apabila desain produk merupakan bagian dari asset perusahaan yang patut mendapat perlindungan hukum yang cukup. Penciptaan sebuah desain juga

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>18</sup> Budi Santoso, RUU Desain dan Persoalan Hak Cipta, Makalah, Yogyakarta, 2000, hal 1.



memerlukan tenaga pikiran, waktu dan tidak jarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu harus diupayakan agar desain tersebut tidak mudah jatuh ketangan pihak lain, termasuk di dalamnya melindungi dari peniruan dan penjiplakan oleh pihak lain.

Dari segi hukum, desain industri memasuki babak baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang desain industri, pada tanggal 20 Desember 2000. Adanya ketentuan tersebut diharapkan mampu mengakomodasikan berbagai kebutuhan perlindungan atas desain industri, yang selama ini belum mempunyai aturan sendiri dan perlindungannya dicantolkan pada Undang-Undang Hak Cipta. Peralihan pengatutan desain industri dari Undang-Undang Hak Cipta ke Undang-Undang Desain Industri membawa dampak pada perlindungan hukumnya. Hak Cipta tidak harus didaftarkan, sedangkan hak atas desain industri baru muncul bila didaftarkan. Hal ini tentunya akan membawa akibat banyak desain industri tidak mendapat perlindungan hukum dari peniruan pihak lain, dikarenakan sebagian besar desain yang dipasarkan tidak dimintakan pendaftaran.

Berdasarkan asumsi tersebut dan pokok-pokok pikiran yang melatarbelakangi penulisan ini, maka untuk mempertajam penelaahan dan analisis diajukan permasalahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengrajin di dalam memanfaatkan hak desain industri yang mereka miliki ?
2. Apakah adanya aturan hak desain industri dapat memotivasi pada sikap dan perilaku para desainer kerajinan untuk meningkatkan kreatifitas dan

kualitas produk kerajinan mereka sehingga berdampak pada peningkatan daya saing atas produk kerajinan tersebut serta pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan para desainer ?

3. Bagaimana upaya-upaya, yang perlu dilakukan guna meningkatkan daya saing dalam produksi kerajinan dengan berdasarkan pada desain industri ?

### C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat pengrajin di dalam memanfaatkan hak desain industri yang mereka miliki.
- b. Untuk mengetahui pengaruh berlakunya ketentuan hak desain industri terhadap sikap dan perilaku para desainer kerajinan dalam meningkatkan kreatifitas dan kualitas produk kerajinan, sehingga berdampak pada peningkatan daya saing atas produk kerajinan tersebut serta peningkatan kemandirian dan kesejahteraan perekonomian para desainer.
- c. Untuk menjelaskan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing produksi kerajinan berdasarkan Undang-Undang Hak Desain.

#### 2. Kontribusi Penelitian

##### a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi bidang hukum khususnya dibidang hak atas karya

intelektual, terutama berkenaan dengan studi peran hukum dalam melindungi karya-karya desain industri.

#### b. Kontribusi Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi/masukan kepada aparat terkait dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Hak Desain Industri agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat khususnya masyarakat pengrajin.

### D. Metode Penelitian

#### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini metode kualitatif<sup>19</sup>. Dalam penggunaan metode kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan *sosio-legal research* dan pendekatan *normative*.<sup>20</sup>

Digunakannya pendekatan *sosio-legal* ini karena melalui pendekatan ini, hukum tidak dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga meliputi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Dalam perspektif ini, bagaimana kesadaran hukum masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan hak desain Industri guna meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha, tidak akan diukur

<sup>19</sup> Tentang penelitian kwalitatif ini lebih lanjut dapat dilihat pada Soerjono Soekanto, Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

<sup>20</sup> Oleh Sunaryati Hartono dikatakan bahwa untuk penelitian yang dimaksudkan dalam rangka penulisan tesis, maka penggunaan pendekatan *sosio-legal research* disamping penelitian hukum *normative* akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan, dalam C.F.E. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad-20, Alumni, Bandung, 1994, hal. 142.

dari apa yang bersifat harus dalam pandangan orang luar, tetapi bagaimana sesungguhnya menurut orang dalam (masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri). Konsekwensinya adalah, dituntut untuk melakukan upaya masuk ke dalam dunia konsep orang dalam tersebut, sehingga dapat dipahami konsep-konsep, gagasan-gagasan, dan nilai-nilai, melalui mana dan dengan apa mereka itu hidup, serta memahami baik pengalaman-pengalamannya sendiri maupun dunia di mana mereka hidup.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari sudut ruang lingkupnya, maka penelitian hukum normative adalah mencakup penelitian tentang: (1) azas-azas hukum, (2) sistematika hukum, (3) taraf sinkronisasi hukum, (4) sejarah hukum, (5) perbandingan hukum.<sup>22</sup> Dengan melihat permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dimana secara tidak langsung akan pula membahas tentang azas-azas hukum yang dalam hal ini bersangkutan dengan Undang-Undang Desain Industri, maka pada tempatnya kalau penelitian ini juga menggunakan pendekatan penelitian hukum normative.

Di samping itu pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini, juga dilakukan dalam bentuk penelitian inventarisasi hukum positif yang berbentuk kegiatan mengidentifikasi norma-norma hukum positif yang relevan dengan hak milik intelektual khususnya dibidang hak desain industri,

<sup>21</sup> Dalam kaitannya dengan hal ini, ada 4 (empat) pendekatan yang dapat dipakai yaitu (1) pendekatan structural, (2) pendekatan fungsional, (3) pendekatan materialisme, (4) pendekatan kognitif dan semiotika; selanjutnya dapat dilihat dalam Robert J. Serciter, *Rancang-Bangun Teori Lokal*, terjemahan Stephen Suleman, Gunung Mulia, Jakarta, 1991, hal. 70-73.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14-15

pengumpulan dan pengorganisasian terhadap norma-norma yang telah diidentifikasi tersebut. Kegiatan inventarisasi ini dilakukan untuk menemukan hukum yang sesuai bagi permasalahan hukum *in concreto*.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu dilaksanakan di Kotamadya Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dan kabupaten Sleman. Pemilihan wilayah ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pada daerah-daerah tersebut paling banyak terdapat sentra-sentra kerajinan. Sehingga di 3 (tiga) daerah tersebut paling banyak dilakukan kegiatan yang berhubungan dengan produk kerajinan sebagai penunjang dalam industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karenanya di daerah-daerah ini sangat potensial untuk menggunakan hak desain Industri.

## 3. Sumber Data

Data primer penelitian diperoleh dari para informan di lokasi penelitian, yang meliputi masyarakat pengrajin dan desainer kerajinan, klinik HAKI UII dan pihak aparat terkait. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, kemudian informan selanjutnya ditentukan dengan cara *snowball sampling*, sampai data yang diperlukan dipandang cukup untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Di samping data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Dimaksud dengan data sekunder ini adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktahir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide.<sup>23</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini Adalah :

- a. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
- b. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- c. Keputusan Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual No. H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu dalam menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

---

<sup>23</sup> S. Nasution, Metode Research, Bandung, 1982, hal. 58.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 12.

- e. kepastakaan/buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang Hak Atas Karya Intelektual pada umumnya dan Desain Industri pada khususnya.
- f. Makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar-seminar maupun pertemuan ilmiah yang lain, khususnya yang berkenaan dengan Hak Desain Industri.
- g. Naskah tulisan di media masa, arsip, dan data-data lain yang dipublikasikan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk kwalifikasi data primer, pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Pengamatan (*observasi*), dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menyolok dan dilakukan tidak hanya dengan mencatat sesuatu kejadian atau peristiwa yang diamati, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Karenannya observasi yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.<sup>25</sup>

Wawancara (*interview*), dilakukan secara tidak terarah (*non derective interview*) yang tidak berdasar pada suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Di sini peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan tajam, akan tetapi terserah kepada informan yang diwawancarai untuk memberikan

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Op. Cit., hal. 30.

penjelasan menurut kemauannya sendiri<sup>26</sup>. Dalam penentuan informan, karena keadaan dan keunikan informasi menjadi tuntutan utama, maka penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Hal ini dilakukan pertama-tama dengan menemui mereka yang sudah dikenal sambil merekam informasi awal dari mereka. Bila informasi tersebut belum dianggap cukup, maka penulis meminta mereka untuk memandu kepada informan-informan lain hingga data yang dicari dapat dirasakan cukup. Dengan demikian, pengembangan data mengikuti prinsip *snow balling*, sehingga pilihan sumber informasi dalam perolehan data berakhir apabila tidak ada lagi indikasi muncul informasi baru.<sup>27</sup>

Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yakni terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Data

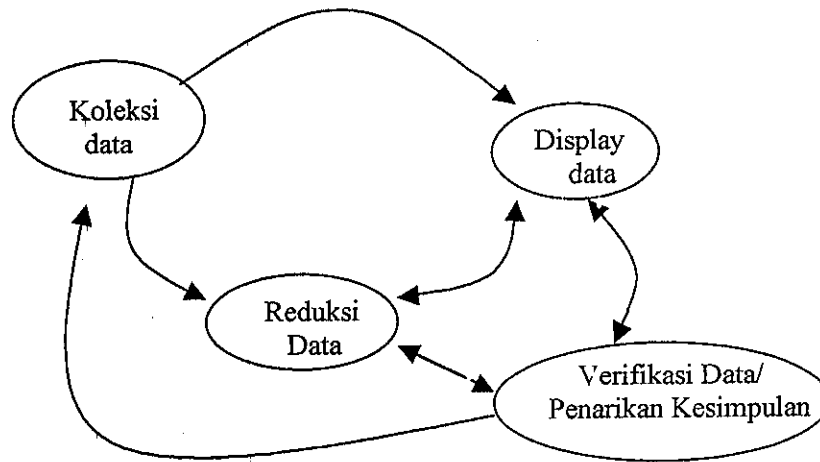
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti model interaktif, yaitu meliputi empat tahap kegiatan, yaitu tahap koleksi data, tahap reduksi data, tahap display data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Op.Cit., hal, 60.

<sup>27</sup> Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, 1990., hal. 44





Dalam perspektif ini, keempat tahapan kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang terus menerus, bergerak diantara empat tahap kegiatan tersebut selama pengumpulan data. Selanjutnya kegiatan tersebut berlangsung secara bolak balik diantara reduksi, pengujian dan penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian, sehingga masalah reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data menjadi gambaran keberhasilan secara berturut-turut sebagai kegiatan analisis yang susul menyusul.<sup>28</sup>

#### 6. Teknik Pengecekan Validitas Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui teknik pemeriksaan triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Patton dalam *Qualitative Data analysis; A Source book of New Methods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Moleong<sup>29</sup> yang

<sup>28</sup> M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 19.

<sup>29</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal. 178.

menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
- d. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan,
- e. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan penggunaan metode triangulasi sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat di-*cross check*, sehingga akurasi dapat diuji.

#### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab yang mengemukakan uraian sebagai berikut :

Bab I merupakan bab Pendahuluan, diuraikan dalam 5 (lima) sub bab yang meliputi, (A) Latar Belakang Masalah, (B) Permasalahan, (C) Tujuan Dan Kontribusi Penelitian, (D) Metode Penelitian dan, (E) Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu bab dengan judul Tinjauan Terhadap Peran, Fungsi, Budaya dan Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat, akan menguraikan dasar-dasar teoritis yang menunjang permasalahan yang diajukan, Meliputi : (A) Peran Hukum di Dalam Perubahan dan Perkembangan Masyarakat, (B). Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat, (C) Pengaruh Nilai Budaya Terhadap Hukum, (D) Kesadaran Hukum dan Pencapaian Tujuan Hukum Dalam Masyarakat.

Bab III dengan judul Kesadaran Hukum Dalam Menggunakan hak Desain Industri Oleh Para Pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Kemandirian Usaha, merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi : (A) Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Pengrajin di dalam memanfaatkan Hak Desain Industri, (B). Fungsi Pengaturan Hak Desain Industri Dalam Memotivasi Sikap dan Perilaku Desainer Kerajinan untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kualitas Serta Daya Saing Atas Produk Kerajinan, (C). Upaya-Upaya Yang Dilakukan Guna Meningkatkan Daya Saing Dalam Produksi Kerajinan Dengan Berdasarkan Hak Desain Industri, dan (D) Mengfungsikan Hukum di Bidang Hak Desain Industri (Undang-Undang No. 31 tahun 2000) Sebagai Sarana Untuk Melakukan Rekayasa Sosial (Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Usaha Para Pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Bab IV. Merupakan Bab Penutup yang berisikan (A) Kesimpulan dan (B) Saran.

## BAB II TINJAUAN TERHADAP PERAN, FUNGSI, BUDAYA DAN KESADARAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

### A. Peran Hukum Di Dalam Perubahan dan Perkembangan Masyarakat

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan ciri yang melekat pada setiap masyarakat. Betapun lambat proses perubahan tersebut, akan tetapi tidak ada masyarakat yang statis ataupun mandeg sama sekali. Dengan diakuinya proses perubahan sebagai ciri yang melekat pada setiap masyarakat, maka semakin nyata hubungan antara hukum dengan bidang-bidang kehidupan lainnya seperti bidang politik, ekonomi, pendidikan, pertahanan keamanan, agama dan lain sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut, Prof. Dr. Soerjono Soekanto<sup>30</sup> berpendapat ada tiga karakteristik dari hukum yang menonjol, yaitu:

1. Adanya kecenderungan untuk mempertahankan stabilitas
2. Oleh karena hukum mengatur hubungan-hubungan sosial yang terjadi, maka di sini diperlukan dan dipentingkan segi formalisme..
3. Dipentingkannya ketertiban.

Perlu diakui, bahwa ketiga karakteristik tersebut di atas, seringkali menyebabkan timbulnya kenyataan-kenyataan yang memisahkan hukum dari perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu sering dikatakan, bahwa hukum bersifat konservatif dan ingin selalu mempertahankan *status-quo*.

Apakah hal itu berlaku umum?. Hal ini tentunya berdasarkan pada konsep-konsep pemikiran hukum yang umumnya dibicarakan oleh para ahli hukum. Dimana

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit UI, 1978, h. 23

konsep-konsep pemikiran hukum tersebut secara analitis dapatlah digolongkan ke dalam tiga golongan umum<sup>31</sup>, yaitu:

1. Filsafat hukum yang mencakup hasil-hasil pemikiran tentang formulasi cita-cita hukum sebagai basis dari suatu sistem.
2. Ilmu Hukum analitis yang ruang lingkupnya adalah pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang menyangkut teknik hukum.
3. Pemikiran-pemikiran tentang hukum dalam perspektif sosiologis, yang terutama menyoroti hubungan antara prinsip-prinsip hukum dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Ketiga golongan pemikiran tersebut, dalam kenyataannya sering bertentangan, walaupun ketiga pendekatan terhadap hukum itu, sebenarnya saling melengkapi. Hal ini disebabkan, oleh karena hanya dengan ketiga pendekatan itulah dapat dilakukan analisa yang menyeluruh tentang kedudukan yang proposional dari hukum dalam masyarakat.

Pada setiap masyarakat, senantiasa ada perkembangan sosial yang sebenarnya merupakan suatu aspek dari perkembangan kehidupan secara menyeluruh. Secara konvensional perkembangan sosial merupakan proses yang menyangkut seluruh sistem sosial yang menjadi wadah bagi interaksi antar pribadi dan kelompok dalam masyarakat. Dengan sendirinya hal itu menyangkut kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik yang menyangkut segi struktural maupun prosesualnya.

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 24.

Apabila hendak dibicarakan gejala hukum dengan segala aspeknya, maka mau tidak mau harus disinggung pula perihal masyarakat yang menjadi wadah dari hukum tersebut. Hukum adalah masyarakat juga, yang ditelaah dari sudut tertentu, sebagaimana halnya dengan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Pernyataan ini mungkin agak berbeda dengan apa yang lazim dilakukan di Indonesia dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental. Tradisi tersebut bertitik tolak pada pendirian, bahwa hukum merupakan suatu gejala yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Hal ini bukan berarti, bahwa hukum secara tegas terpisah dari masyarakatnya, maksudnya adalah, bahwa hukum hendak dipelajari sebagai suatu gejala yang telah "dibersihkan" dari faktor-faktor lain.

Pemikiran-pemikiran terhadap hukum yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental tersebut di atas, agak sulit dikembangkan apabila yang dituju adalah suatu pengkajian yang menyeluruh. Artinya, dengan mengikuti tradisi Eropa Kontinental tersebut di atas, agak sukar untuk menganalisa gejala hukum sebagai suatu unsur dari pergaulan hidup yang menyeluruh.

Oleh karena itu, maka pendekatan di dalam tulisan ini akan mengikuti jalan pemikiran yang lebih luas, daripada tradisi Eropa Kontinental tersebut. Hal ini berarti, bahwa pendekatan interdisipliner akan lebih banyak diterapkan, agar supaya masalah-masalah yang tak dapat dipecahkan dengan ilmu hukum belaka, akan dapat ditelaah dari sudut ilmu-ilmu sosial lainnya.

Dengan demikian, maka perkembangan sosial yang menjadi fokus utama dalam pembahasan ini, akan ditelaah secara interdisipliner. Oleh karena itu, analisa

akan diawali dengan apa yang dinamakan masyarakat, dengan sekedar mengemukakan ciri-cirinya.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto,<sup>32</sup> ciri pokok dari masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama, yang secara teoritis berjumlah dua orang dalam ukuran minimalnya,
2. Manusia-manusia tersebut bergaul dan hidup bersama selama jangka waktu yang cukup lama,
3. Mereka sadar, bahwa manusia-manusia tersebut merupakan bagian dari suatu kesatuan,
4. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Melihat ciri-ciri tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem, yakni sistem sosial. Apabila hukum dapat dianggap sebagai suatu bagian dari sistem sosial sebagai keseluruhannya (*sub-sistem social*), maka di satu pihak hukum dapat dipengaruhi oleh sub-sistem sosial lainnya. Di lain pihak, hukum dapat pula mempengaruhi sub-sistem sosial lainnya. Hukum di sini dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dipengaruhi oleh gejala lainnya, atau dengan kata lain perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan sosial kemasyarakatan yang mempengaruhinya.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit UI, 1978, h. 25

Emile Durkheim menyatakan, bahwa perkembangan hukum adalah sesuai dengan perkembangan solidaritas sosial. Pada masyarakat-masyarakat dengan solidaritas mekanis, yaitu pada masyarakat-masyarakat sederhana berkembanglah hukum pidana dengan sanksi-sanksi yang bersifat represif. Di dalam masyarakat-masyarakat yang kompleks yang di dasarkan pada solidaritas organis, hukum perdata yang berlaku dengan sanksi-sanksinya yang bersifat restitutif.

Sedangkan menurut Max Weber, perkembangan hukum adalah sesuai dengan proses rasionalisasi yang merupakan gejala daripada masyarakat industri sebagai hasil dari ekonomi kapitalis dan birokrasi. Fungsi hukum adalah sebagai sarana untuk menciptakan kesesuaian, antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat.

Adapun menurut Talcott Parsons, sebagaimana dikatakan dalam bukunya yang berjudul *"the Structure of Social Action"* dan *"Theories of Society"* (terutama dalam tulisan yang berjudul *"An Outline of the Social System"* ). Dimana pokok pikiran Parsons sebenarnya berkisar dalam dua hal, yakni:

1. Masalah tertib sosial (*"social order"*), yakni hakekat dari kekuatan-kekuatan yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk interaksi dan organisosial yang ajeg, dan yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang teratur. Dalam hal ini Parsons bertitik tolak pada buku Hobbes yang berjudul *"Leviathan"* (1691) yang antara lain menyatakan bahwa motivasi dasar dari manusia adalah untuk mendapatkan kekuasaan, dan bahwa manusia senantiasa bertentangan satu dengan yang lainnya.



Dengan demikian, maka suatu ketertiban yang mantap, hanya mungkin ada dalam suatu system pemerintahan yang kuat. Untuk menunjang pendapatnya, maka Parsons berpaling pada ajaran-ajaran Max Weber dan Durkheim, yang memberi tekanan yang kuat pada fungsi faktor-faktor normative dalam kehidupan bersama, seperti misalnya nilai-nilai. Faktor-faktor normative tersebut merupakan dasar utama dari kerangka acuan Parsons mengenai sistem sosial. Unit-unit pokok atau utama dari suatu sistem sosial adalah kolektiva-kolektiva dan peranan-peranan, pola-pola utama yang mengatur hubungan antara unit-unit tersebut adalah nilai-nilai dan norma-norma (nilai adalah cita-cita atau pedoman luas untuk berperilaku, sedangkan norma merupakan aturan-aturan berperan dalam konteks nilai-nilai).

## 2. Pengembangan konsepsi-konsepsi sosiologis mengenai sistem sosial.

Dari perumusan-perumusan tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa sistem sosial menunjuk pada keseluruhan terangkai, yang menyangkut hubungan antar manusia dan kelompok, yang tercakup dalam pengertian interaksi sosial. Untuk menjelaskan hal ini, ada baiknya untuk membuat suatu uraian yang lebih mendalam, sehingga masalahnya menjadi lebih jelas.

Setiap manusia mempunyai apa yang dinamakan perilaku ("*behavior*"), yaitu suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia.

Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial (*"social action"*), yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat:<sup>33</sup>

1. Diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu,
2. Terjadi pada situasi tertentu,
3. Diatur oleh kaidah-kaidah tertentu,
4. Terdorong oleh motivasi-motivasi.

Setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup sub-sistem sub-sistem tertentu, yakni,<sup>34</sup>

1. Sub-sistem budaya,
2. Sub-sistem sosial,
3. Sub-sistem kepribadian,
4. Sub-sistem organisme perilaku.

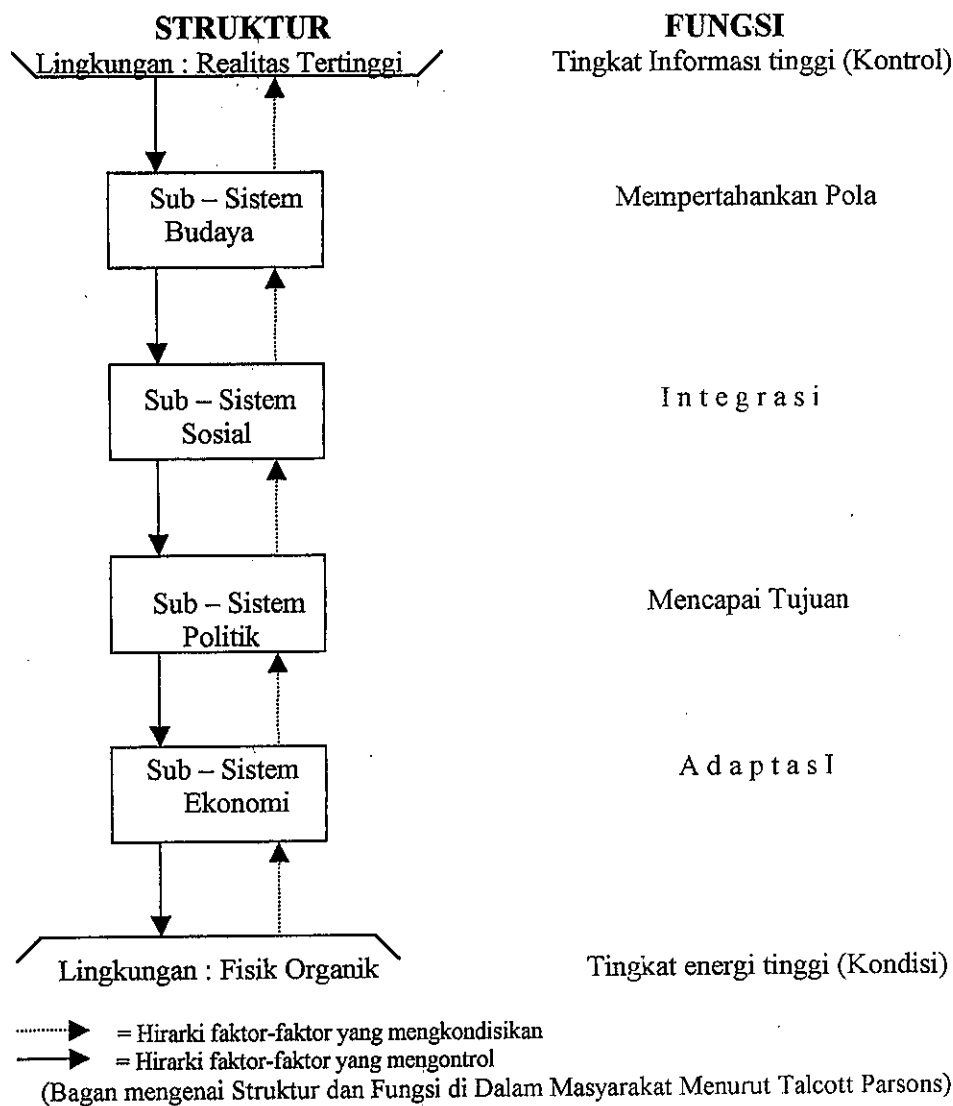
Sub-sistem budaya merupakan susunan daripada unsur-unsur yang berisi dasar-dasar hakiki dari masyarakat, yaitu nilai-nilai. Sub-sistem sosial merupakan pedoman-pedoman, bagaimana manusia sepantasnya bertingkah laku atas dasar nilai-nilai. Selanjutnya, sub-sistem kepribadian berisikan sikap atau kecenderungan-kecenderungan untuk bertingkah laku terhadap manusia, benda-benda maupun keadaan-keadaan tertentu. Akhirnya, sub-sistem organisme perilaku merupakan perilaku nyata dari manusia. Sub-sistem-sub-sistem tersebut pada hakekatnya

---

<sup>33</sup> T. Parsons and E. Shils (eds). *Toward A General Theory of Actions*. Cambridge, Mass: The Harvard University Press. 1951. dalam Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan Indonesia, Cetakan ke empat, Penerbit UI, 1983, h. 25.

<sup>34</sup> Ibid.

merupakan tindakan atau gerak manusia, merupakan suatu hirarkhi pengaturan "cybernetic order". Artinya, setiap sub-sistem yang berada di atas, merupakan pengawas atau pengatur bagi sub-sistem yang berada di bawahnya. Kecuali daripada itu, maka gerak manusia dibatasi oleh lingkungan alam phisik dan organis (yang sifatnya fisik) serta lingkungan realitas (yang ideal).<sup>35</sup>



<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Cetakan ke empat, Penerbit UI, 1983, h. 26.

Apabila manusia bergerak atau beraksi, maka dalam hubungannya dengan pihak lain, ada yang bereaksi. Pihak yang beraksi disebut "*ego*", sedangkan yang bereaksi adalah "*alter*". Hubungan timbal balik antara ego dengan alter disebut dengan interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok.<sup>36</sup> Ciri-ciri pokok dari proses interaksi sosial, adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Pihak yang mengadakan interaksi berjumlah lebih dari satu orang,
2. Adanya komunikasi antara pihak-pihak tersebut, dengan mempergunakan lambang-lambang tertentu,
3. Adanya dimensi waktu yang mencakup masa lampau, waktu kini dan masa mendatang,
4. Adanya tujuan-tujuan tertentu.

Apabila interaksi sosial diulang-ulang menurut pola yang sama, dan bertahan selama jangka waktu yang relatif lama, maka terjadilah hubungan sosial ("*social relations*"). Kalau hubungan sosial tersebut dilakukan secara sistematis dan menurut kaidah-kaidah tertentu, maka hubungan sosial tadi berubah menjadi sistem sosial ("*social system*").

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, op.cit.

<sup>37</sup> Ch. P. Loomis, *Social Systems*, New York : D van Nostrand Co. Inc. 1964, h. 267.

Suatu sistem sosial yang merupakan pusat perhatian pelbagai ilmu-ilmu sosial, merupakan suatu wadah dari pada pola-pola interaksi sosial, secara struktural, maka suatu sistem sosial mencakup unsur-unsur pokok, sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Kepercayaan, yaitu hipotesa tentang gejala yang dihadapi, gejala mana dianggap benar,
2. Perasaan, yakni sikap yang didasarkan pada emosi atau prasangka (*"prejudice"*)
3. Tujuan yang merupakan cita-cita yang harus dicapai melalui proses perubahan, atau dengan jalan mempertahankan sesuatu,
4. Kaedah, yaitu pedoman tentang tingkah laku yang pantas,
5. Kedudukan, peranan dan pelaksanaan peranan yang merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta penerapannya di dalam proses interaksi sosial,
6. Tingkatan atau jenjang, yaitu posisi sosial yang menentukan alokasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban,
7. Sanksi, yakni suatu persetujuan (sanksi positif) atau penolakan (sanksi negatif) terhadap pola-pola perikelakuan tertentu.
8. Kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, agar dia berbuat sesuatu dengan kemauan pemegang kekuasaan,
9. Fasilitas yang merupakan sarana-sarana untuk mencapai tujuan.

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, op. cit.

Kerangka di atas merupakan dasar struktural untuk mempelajari setiap sistem sosial yang dihadapi, oleh karena masing-masing unsur mempunyai peranan fungsional di dalam keseluruhan sistem sosial, secara fungsional maka setiap sistem sosial akan dapat di analisa sebagai sistem gerak sosial, dengan memberikan patokan-patokan fungsional, sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Fungsi mempertahankan pola,
2. Fungsi integrasi,
3. Fungsi mencapai tujuan,
4. Fungsi adaptasi.

Fungsi untuk mempertahankan pola termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan sub-sistem budaya sebagai sub-sistem dari sistem gerak sosial. Suatu sub-sistem budaya memberikan jawaban terhadap masalah-masalah mengenai faktor-faktor pada falsafah hidupnya. Falsafah hidup tersebut kemudian terwujud di dalam sistem nilai-nilai, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Fungsi integrasi mencakup faktor-faktor yang diperlukan untuk mencapai keadaan serasi, atau hubungan serasi antara bagian-bagian suatu sistem sosial (agar supaya bagian-bagian tadi berfungsi sebagai suatu keseluruhan atau kesatuan). Hal ini mencakup identitas masyarakat, keanggotaan seseorang dalam masyarakat, dan susunan normatif dari bagian-bagian tersebut.

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Log-cit h. 27.

Fungsi untuk mencapai tujuan termasuk dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan kepribadian warga-warga masyarakat tersebut, atas dasar faktor-faktor sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. masyarakat perlu mengembangkan suatu sistem yang dapat mendorong warga-warga, agar menjunjung nilai-nilai dan kaedah-kaedah. Hal ini terwujud dalam proses sosialisasi dan sistem pengendalian sosial.
2. masyarakat perlu mengorganisasikan warga-warganya, untuk mencapai tujuan bersama, yang biasanya dianggap sebagai aspek politik dari masyarakat.

Fungsi adaptasi termasuk di dalam kerangka hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial, dengan organisme perilaku warga-warganya. Hal ini mencakup pengarahan dan penyesuaian antara kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, dengan keadaan sekelilingnya, yang mencakup ekonomi dan teknologi.

Apabila unsur-unsur dari suatu sistem sosial diterapkan pada suatu masyarakat hukum adat, yakni masyarakat tradisional di Indonesia, maka penjabaran semacam di atas juga mungkin dijumpai. Suatu diskripsi yang baik mengenai masyarakat hukum adat akan dapat dijumpai dalam bukunya Hazairin yang berjudul *Demokrasi Pancasila*.<sup>41</sup> Penguraianya adalah sebagai berikut:

“ masyarakat-masyarakat hukum adat desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri-sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa

<sup>40</sup> Ibid.. h. 28.

<sup>41</sup> Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 223

dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya dan sistem umum kemasyarakatannya. Sistem perekonomiannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajiban”

Uraian tersebut di atas memberikan suatu gambaran jelas mengenai masyarakat hukum adat, yang boleh dikatakan terdapat disemua wilayah di Indonesia.

Selanjutnya dikatakan pula,<sup>42</sup> bahwa kehidupan mereka:

“...berciri communal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan besar”.

Hal-hal tersebut di atas terutama menyangkut kepercayaan perasaan maupun tujuan sistem sosial. Unsur-unsur sistem sosial akan dapat dijumpai di dalam uraian,<sup>43</sup> sebagai berikut:

“kesusilaan umum sangat dijunjung tinggi dan diawasi bersama-sama. Perkara-perkara di bidang hukum diselesaikan terutama dengan tujuan memelihara kedamaian. ... kepala-kepala adat bertugas di semua bidang, menangkap, memeriksa, menghukum, mengampunkan, memberikan syarat-syarat untuk kebebasan. Hak perseorangan, terutama atas tanah, mempunyai banyak syarat-syarat untuk mempertinggi fungsi sosialnya... Hukum adat yang dijalankan oleh kepala-kepala adat adalah hukum yang tradisional, yang turun temurun dari nenek moyang, yang dimoderenkan menurut perkembangan dan tuntutan zaman”.

## B. Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Masyarakat

Tinjauan terhadap fungsi hukum dalam pembangunan dapat dilakukan dari dua sudut pandangan. Pandangan pertama, hukum ditinjau sebagai obyek dari pembangunan itu sendiri, artinya hukum itu merupakan satu sektor dari pembangunan itu sendiri. Dari sudut pandangan ini yang peting adalah mengenai penegakan hukum,

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Ibid hal.224.



pengembangan hukum dan pembinaan hukum. Dari sudut pandangan yang kedua, hukum dipandang sebagai alat atau sarana (*tool*) yang berperan untuk menunjang pembangunan agar berjalan dengan teratur, tertib dan lancar.

Mengenai fungsi hukum sebagai alat atau sarana (*tool*) dalam pembangunan dikenal dua konsep yaitu sebagai *law as a tool of social control* dalam arti bahwa hukum hanya berperan sebagai sarana untuk mempertahankan stabilitas di dalam masyarakat. Mekanisme pengendalian masyarakat<sup>44</sup> ini merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar supaya mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Pengendalian masyarakat ini dapat dibedakan menjadi pengendalian masyarakat yang bersifat preventif dan pengendalian masyarakat yang bersifat represif, bahkan ada pengendalian masyarakat yang bersifat preventif-represif. Pengendalian masyarakat yang bersifat preventif berupa pencegahan terhadap gangguan pada keseimbangan stabilitas dan fleksibilitas masyarakat. Pengendalian masyarakat yang bersifat represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Hukum lebih dari itu juga merupakan *a tool of social engineering*, yaitu merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat. Menurut prof. Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana pembaharuan berupa peraturan-peraturan hukum yang berfungsi sebagai

---

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Prespektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung Press, Semarang, 1989, h. 21.

sarana pengatur dalam menyalurkan kegiatan-kegiatan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.

Menurut Michael Hager<sup>45</sup>, fungsi hukum sebagai sarana pembangunan berlaku dalam tiga sektor, yaitu:

1. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*)
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*)
3. Hukum sebagai katalisator.

Hukum sebagai sarana penertib ialah hukum yang mampu menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan penyelesaian sengketa yang mungkin dilakukan melalui suatu hukum acara yang baik. Sehingga dapat diletakkan suatu dasar hukum bagi penggunaan kekuasaan. Hukum dapat juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keserasian antara kepentingan negara dan kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan. Dalam fungsi hukum sebagai katalisator hukum membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum.

Ada dua model<sup>46</sup> mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi dengan hukum yaitu:

1. Model ekonomi pasar
2. Model ekonomi berencana

---

<sup>45</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>46</sup> Ibid. hal. 37.

Dalam model ekonomi pasar, kedudukan lembaga-lembaga yang mendukung jalannya ekonomi pasar itu penting karena kehadirannya merupakan suatu keharusan bagi pembangunan ekonomi. Proses ekonomi dalam model ekonomi pasar tidak digerakkan dari pusat kekuasaan tetapi diserahkan pada mekanisme permintaan dan penawaran. Di sini hukum dipandang sebagai sesuatu yang esensial bagi terciptanya dan terbinanya pasar.

Sifat esensial dari hukum di sini karena hukum mampu memberikan predik stabilitas (ramalan) kepada para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya. Hukum mendorong orang-orang untuk melakukan kegiatan ekonomi secara kreatif dan menjamin bahwa hasil dari kegiatan tersebut akan memperoleh perlindungan dari hukum seperti kontrak-kontrak dan hak-hak milik individual, hukum itu mendorong perkembangan pasar dan dengan demikian juga mendorong perkembangan ekonomi.

Model yang kedua yaitu model ekonomi berencana menekankan sifat proposional dari aspek kekuatan pada hukum. Pembangunan dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Di sini negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat.

Hukum merupakan alat untuk menterjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma untuk kemudian diterapkan. Semakin efektif hukum itu dapat dipakai untuk mengarahkan tingkah laku manusia, semakin berhasil pula pembangunan itu.

Hukum juga memegang peranan penting dalam pembangunan politik. Hukum di sini dilihat sebagai suatu lembaga di dalam masyarakat mandiri yang fungsinya adalah melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh negara. Secara lebih khusus hukum modern disebut sebagai hukum yang pluralistic karena ia memberikan kebebasan individual kepada anggota-anggota masyarakat serta membina suatu pemerintahan yang demokratis.

Huntington Cairns<sup>47</sup> mengemukakan pendapatnya, bahwa ilmu pengetahuan hukum sebagai "*socio-technique*"<sup>48</sup> harus mampu membuat dan menerapkan peraturan-peraturan hukum yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan sosial yang diharapkan. Penggunaan hukum sebagai "*a tool of social engineering*" meliputi penggunaan peraturan-peraturan yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga pembuat peraturan yang menimbulkan suatu akibat tertentu pada tingkah laku dari para pemegang peran, yaitu yang mewujudkan tujuan-tujuan tertentu yang dikehendaki.

Para ahli ilmu sosial, khususnya sosiologi rupanya cenderung tidak melihat adanya peranan hukum yang berarti dalam mengerakkan suatu perubahan sosial.<sup>49</sup> Pada penglihatan mereka ini peranan-peranan penting yang dianggap sebagai pengerak perubahan masih saja dipegang oleh faktor-faktor lain, seperti pertambahan penduduk, perubahan idiologi serta penggunaan teknologi modern. Oleh karena faktor-faktor tersebut bekerja secara sendiri-sendiri, maka orang pun lalu mengatakan,

<sup>47</sup> Ibid. hal. 73.

<sup>48</sup> Ilmu Pengetahuan hukum moderen merupakan ilmu pengetahuan praktis (*Applied science*) jadi juga merupakan suatu teknologi. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai teknologi ilmu pengetahuan hukum haruslah mendasarkan pada penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dalam hal ini yaitu dari ilmu-ilmu sosial.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977.

bahwa perubahan sosial itu terjadi secara acak, ia terjadi di sana-sini secara segmentaris sebagai akibat dari bekerjanya faktor-faktor tersebut. Dengan kata lain, para ahli sosiologi belum yakin benar akan terjadinya perubahan sosial yang dilakukan secara sadar oleh manusia.<sup>50</sup> Menurut pendapat mereka apabila pada suatu saat memang timbul perubahan sosial dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, maka hukum itu tetap tidak diakui sebagai penyebab tersebut, bahkan ia hanya dilihat sebagai akibat dari perubahan saja. Apabila kemudian muncul hukum-hukum baru, maka yang demikian itu adalah akibat saja dari keadaan masyarakat yang memang sudah berubah sebelumnya, sehingga hukum itu hanya mengokohkan apa yang sebetulnya memang sudah berubah.<sup>51</sup>

Sebelum hukum itu muncul sebagai sarana untuk menciptakan perubahan, ia telah didahului oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan lain, seperti penumpukan progresif penemuan-penemuan teknologi, kontak serta konflik kebudayaan, gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik, biologik serta demografik. Pada waktu perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan tersebut telah berjalan sampai pada suatu tingkat tertentu, maka mulailah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut.

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial suatu tinjauan teoritis pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Desertasi, Alumni, 1979, hal. 152.

<sup>51</sup> Arnold M. Rose, *The Use of Law to Induce Social Change*, dalam *Transactions of Third World Congress of Sociology*, Jilid VI, *International Sociological Association*, 1956, hal. 57. Bandingkan juga dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Desertasi, Alumni, 1979, hal. 152.

Menurut Talcoot Parsons<sup>52</sup> sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, mengatakan bahwa tingkah laku individu merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub-sistem-sub-sistem. Dalam garis besarnya, tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yaitu lingkungan fisik organik dan lingkungan realitas tertinggi. Di antara kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub-sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola, sub-sistem sosial dengan fungsi integrasi, sub-sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub-sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi..

Dalam kerangka sub-sub sistem tersebut, hukum dapat masuk kedalam sub-sistem budaya dan dapat masuk ke dalam sub-sistem sosial. Sebagai sub-sistem budaya hukum mempertahankan pola nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu. Sebagai sub-sistem sosial, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktifitas masyarakat. Sebagai sub-sistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, sub-sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub-sistem ekonomi, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah-tengah lingkungannya. Kegiatan ekonomilah

---

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit. hal 29.

yang dapat merubah berbagai sumberdaya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>53</sup>

Penerapan teori Parson di sini kiranya akan berpendapat, bahwa penemuan dibidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya. Pertama, terjadi penemuan baru dibidang teknologi. Ditempat kedua menyusul kegiatan ekonomi. Di sini orang mulai memikirkan pemanfaatan ekonomis apa yang dipetik dari penemuan tersebut. Baru kemudian hukum masuk, apabila kedua yang disebutkan di atas telah dijalankan. Dengan demikian hukum diterima sebagai struktur atas yang mempunyai basisnya pada bidang teknologi dan ekonomi dan oleh karenanya hanyalah merupakan kelanjutan dari kejadian-kejadian pada bidang tersebut.

Di sini dapatlah dijumpai adanya dua kutub yang berlawanan, yaitu di satu pihak yang mengatakan dapat menjelaskan timbulnya perubahan sosial hanya dari satu sebab (*single factor*) sedangkan di pihak lain yang berpendapat mengenai adanya berbagai sebab bagi timbulnya perubahan sosial. Dengan adanya pendapat tersebut terakhir ini maka pembicaraan mengenai penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial kiranya dapatlah diteruskan. Oleh karena nampak masih terbuka kemungkinan bagi berperannya hukum di sini.

Perubahan yang timbul oleh hukum pada dasarnya lebih terjadi secara berangsur-angsur (*incremental*) dari pada langsung. Oleh sebab itulah maka di atas

---

<sup>53</sup> Ibid.

dikatakan, bahwa dengan adanya penjelasan mengenai timbulnya perubahan sosial sebagai akibat berbagai sebab yang saling kait mengkait itu, maka pembicaraan mengenai penggunaan hukum sebagai sarana merubah tingkah laku menjadi relevan. Dengan kata lain, di sini kita menemukan suatu kerangka teori sosiologi yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan, bahwa terjadinya perubahan sosial itu melalui suatu proses yang cukup kompleks dan tidak merupakan hasil hubungan yang langsung antara suatu faktor dan suatu kejadian. Kompleksitas ini misalnya ditunjukkan melalui kemampuan suatu akibat untuk juga mempengaruhi dan memodifikasi penyebabnya.<sup>54</sup>

Dalam pada itu, apabila dikehendaki bahwa hukum itu menimbulkan perubahan-perubahan pada obyek yang diaturnya, terutama dalam tingkah laku, maka penguasaan pengetahuan yang lebih seksama mengenai obyek yang diatur, mengenai reaksi-reaksi yang ditimbulkannya, selanjutnya mengenai kemampuan dari lembaga-lembaga serta personel yang menjalankan hukum, merupakan tuntutan yang tak dapat ditinggalkan.

Disamping pengetahuan tersebut di atas maka kita juga perlu memperhatikan persoalan nilai-nilai yang turut menentukan bagaimana seseorang itu bertindak laku dalam masyarakat. Bahwa sekalipun peranan seseorang itu ditentukan oleh pengharapan sebagaimana tercantum dalam hukum, namun hal itu bukan satu-satunya faktor penentu di sini, sedangkan yang lain diantaranya adalah faktor nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat.

---

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, op.cit, hal. 154.



Apabila diinginkan, bahwa hukum itu menjadi sarana untuk melakukan perubahan sosial, maka salah satu hal yang perlu dipersoalkan terlebih dahulu adalah kearah mana perubahan itu akan diarahkan, masalah pemilihan nilai-nilai ini pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, bisa menjadi kritis, oleh karena orang tidak berhadapan dengan suatu sistem nilai yang padu, melainkan yang majemuk.<sup>55</sup>

Pembicaraan mengenai nilai-nilai ini cukup penting, oleh karena dapat menentukan sikap yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang dikehendaki barang tentu harus juga memikirkan sistem nilai-nilai mana yang pada suatu saat perlu menjadi kerangka untuk mengatur.

Apabila di sini kita menggunakan kerangka Parson lagi, maka dapatlah dikatakan terdapat serangkaian permasalahan yang berhubungan satu sama lainnya<sup>56</sup> yaitu:

Pertama, kita dapat mengenali kembali peranan hukum sebagai faktor pengintegrasi masyarakat. Apakah peranan tersebut diutarakan dengan istilah *social control* ataupun *social engineering*, keduanya sebetulnya mengandung makna usaha melakukan integrasi terhadap hubungan, komponen serta bidang-bidang dalam masyarakat. Peranan sebagai faktor pengintegrasi yang demikian itu menjadi lebih menonjol lagi apabila ia dihubungkan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

<sup>55</sup> Robert B. Seidman, *A General Model, Law and Society Review*, Jilid VII, 1972, hal. 322-323.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hal. 160.

Di lihat dari segi teori Parson, maka apa yang kini disebutkan sebagai usaha untuk melakukan penyusunan masyarakat baru melalui hukum, bisa dilihat sebagai perwujudan interaksi antar sistem kebudayaan dan sistem sosial, dalam hal ini hukum. Interaksi ini masih diteruskan lagi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, yang fungsi primernya adalah adaptif dan sistem politik.

Proses-proses yang berlangsung pada sistem-sistem politik dan ekonomi sekarang ini berhubungan erat dengan sistem kebudayaan, yaitu yang menjadi sumber bagi mengalirnya tata nilai baru yang menjadi arah bagi proses-proses yang berlangsung di bidang politik dan ekonomi tersebut. Hukum di sini diharapkan untuk dapat merumuskan nilai-nilai baru tersebut ke dalam norma-norma yang untuk selanjutnya menjadi dasar bagi berlangsungnya baik bagi proses-proses politik maupun ekonomi.

Konsepsi operasional tentang rekayasa masyarakat<sup>57</sup> dengan menggunakan hukum sebagai sarana, didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lunberg dan Lansing dan konsep Hans Kelsen, tentang aspek rangkap dari peraturan hukum.

Menurut Lunberg dan Lansing<sup>58</sup> setiap aturan hukum yang mengakibatkan perubahan sosial, memberikan dorongan pada tingkah laku pemegang peran.

---

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op. cit, hal 23.

<sup>58</sup> Ibid.

Sedangkan tingkah laku dari setiap individu mewujudkan suatu fungsi dalam bidang ditempat individu itu bertingkah laku.

Dilain pihak Hans Kelsen<sup>59</sup> mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu masyarakat modern mempunyai aspek rangkap, yaitu, peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim, anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut maka hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu.

Peraturan hukum yang melarang seorang anggota masyarakat untuk membunuh, sekaligus memerintahkan hakim agar menjatuhkan pidana bilamana ada anggota masyarakat yang melakukan pembunuhan.

Dari konsep Lunberg dan Lansing serta konsep Hans Kelsen tersebut di atas Robert B. Seidman dan William J. Chambliss<sup>60</sup> menyusun suatu model mengenai bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

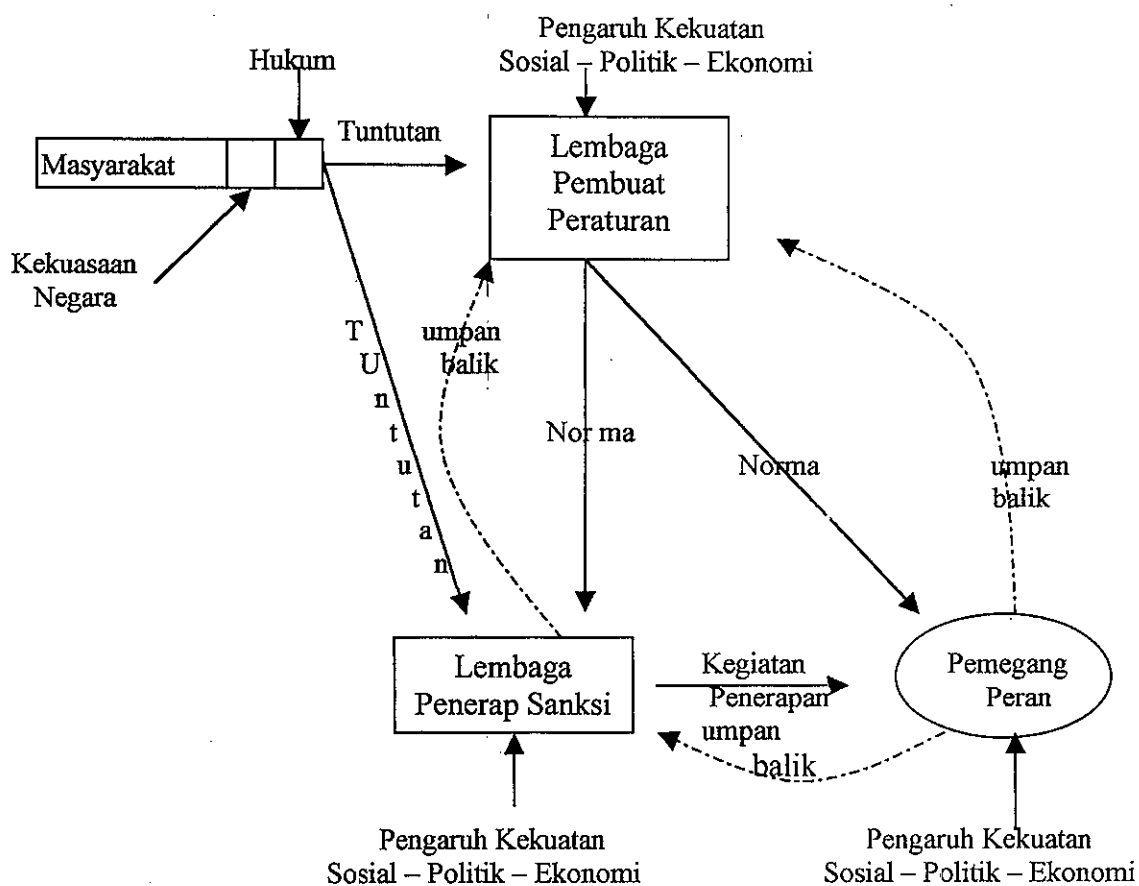
Setiap sistem hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid, hal. 24.

mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan oleh pemegang-pemegang peran.



(Model Bekerjanya Hukum di Dalam Masyarakat Menurut Chambliss & Seidman)

Dari bagan tersebut dapat diketahui bahwa: tuntutan dari masyarakat agar lembaga pembuat peraturan membuat sebuah peraturan hukum, sekaligus menuntuk kepada hakim agar memberikan sanksi bilamana peraturan hukum itu dilanggar oleh seorang anggota masyarakat.

Pada dasarnya model ini merupakan model yang bersifat normative. Model ini menggambarkan arah tuntutan yang diajukan kepada negara oleh golongan-

golongan di dalam masyarakat dan tuntutan yang dibuat oleh pembuat peraturan terhadap pemegang peran, serta terhadap lembaga penerap sanksi.

Dalam bagan ini hendak ditunjukkan pula bahwa pemegang kekuasaan negara menggunakan hukum sebagai sarana untuk memberi tekanan dan mendorong lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi untuk menjalankan fungsinya masing-masing.

Semula model ini belum menunjukkan bagaimana respons pemegang peran di dalam masyarakat terhadap tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan yang ditujukan terhadap dirinya. Dan dalam model ini juga belum ditunjukkan tentang aliran-aliran umpan balik. Bagaimana seseorang pemegang peran bertindak laku merupakan hasil penjumlahan (*resultante*) dari seluruh kekuatan-kekuatan sosial politik ekonomi yang berasal dari dalam masyarakat.

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seseorang pemegang peran di dalam masyarakat akan bertindak adalah norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran, kekuatan-kekuatan sosial politik, ekonomi dari dalam masyarakat yang bekerja terhadap pemegang peran dan kegiatan lembaga penerap sanksi terhadap pemegang peran.

Lembaga pembentuk peraturan hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi diruang hampa, sehingga kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh dari kekuatan sosial politik, ekonomi yang berasal dari dalam masyarakat.

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat melibatkan penggunaan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum

guna menimbulkan akibat pada peranan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan oleh pejabat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha memanfaatkan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa masyarakat adalah kegiatan pejabat penerap sanksi. Tindakan-tindakan pejabat penerap sanksi merupakan landasan bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan penggunaan hukum sebagai sarana. Untuk tiap pejabat ini terdapat serangkaian tujuan-tujuan untuk kedudukan mereka masing-masing dan terdapat pula norma-norma yang menentukan bagaimana mereka harus bertindak.<sup>61</sup>

Oleh karena itu berbicara tentang hukum, umumnya<sup>62</sup> diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk tingkah laku yang mencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan kenyataan. Dengan demikian hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu, walau pada kenyataannya sering terjadi antara norma yang ada dengan tingkah laku yang nyata tidak sesuai atau tidak sejalan.

---

<sup>61</sup> Ibid, hal 25-27

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 37.

Ketidak sesuaian tingkah laku dapat saja terjadi sekalipun si pemegang peran berkehendak untuk menyesuaikan diri. Adanya ketidak cocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dan tingkah laku yang nyata disebabkan karena fungsi hukum tidak lagi sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang baru. Artinya, hukum disamping berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan (hukum berfungsi sebagai *social engineering*).<sup>63</sup> Peranan yang diharapkan dari warga masyarakat untuk dijalankan sangat ditentukan dan dibatasi oleh sistem budayanya. Pemegang peran adalah semua warga negara, hakim, polisi, dan lain sebagainya. Karena definisi hukum yang dibuat haruslah diingat bahwa hukum itu sesungguhnya merupakan budaya masyarakat.

Lawrence M Friedman,<sup>64</sup> mengemukakan bahwa unsur-unsur yang harus terdapat di dalam sebuah sistem hukum adalah; struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan kerangka dari suatu sistem hukum, pengorganisasian, kelembagaannya, batas-batas kewenangan, dan jalinan kerjasama antara aparat hukum. Subtansi hukum berupa kaidah-kaidah yang dituangkan dalam wujud norma-norma hukum yang dijadikan pegangan lembaga-lembaga penegak hukum, pola-pola perilaku yang dapat diamati dikalangan penegak hukum, yang dikehendaki oleh sistem hukum yang bersangkutan. Subtansi hukum dibedakan

<sup>63</sup> Esmi Warassih Pudjirahayu, Makalah, Pembinaan Kesadaran Hukum, dalam Masalah-masalah Hukum No. 5, Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1983, hal. 12.

<sup>64</sup> Lawrence M. Friedman. *Law and Society An Introduction*, Engleword Cliff, N.Y., Prentice Hall Inc., 1977., hal 6-7. Baca Juga Ronny Hanitijo Soemjitro, op.cit, hal 9-10.

menjadi kaidah substantial dan kaidah prosedural. Kaidah substantial mengacu pada pernyataan tentang apa yang harus diperbuat oleh anggota-anggota masyarakat dan penegak hukum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh substansi hukum yang berlaku. Kaidah prosedural mengacu pada kaidah-kaidah yang diperuntukkan bagi para pemegang peran dari sistem hukum yang bersangkutan. Kultur hukum berupa pemikiran-pemikiran, sikap-sikap, kehendak, harapan-harapan dan pendapat-pendapat dikalangan masyarakat dan penegak hukum terutama yang dapat mendukung berlangsungnya sistem hukum yang bersangkutan.

Penggunaan hukum secara sadar untuk merubah dan memperbaiki keadaan dari krisis menjadi keadaan yang lebih baik merupakan konsepsi yang modern dalam melihat hukum dan fungsinya. Pada sisi yang lain disadari bahwa hukum tidak bekerja di ruang yang hampa. Oleh karena itu dapat tidaknya hukum bekerja untuk mencapai tujuan tersebut akan terkait dengan basis sosial dimana hukum itu bekerja. Di sinilah kita melihat pentingnya sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai social dalam menentukan bekerjanya hukum, hal-hal tersebut biasa disebut sebagai budaya hukum.<sup>65</sup>

Hukum merupakan pelengkap masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan teratur. Hukum harus menjadi sarana agar tujuan kebijaksanaan pemerintah dapat terwujud dalam masyarakat.

---

<sup>65</sup> Nugroho Eko Priamoko, *Budaya Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Tengah Krisis Ekonomi*, Tesis, MIH UNDIP, Semarang, 2000, hal. 5.



Ada beberapa ciri<sup>66</sup> yang melekat pada hukum, yaitu:

1. Ada stabilitas, maksudnya bahwa kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.
3. Sebagai kerangka sosial untuk kebutuhan manusia, yang menampilkan wujudnya dalam bentuk norma-norma. Norma-norma inilah yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhannya secara terorganisasi. Melalui norma-norma tersebut terjemalah posisi yang kait mengkait secara sistematis dalam rangka penyelenggaraan kebutuhan tersebut.
4. terjadinya jalinan antar institusi. Dalam keadilan yang dilayani institusi hukum, institusi ekonomi akan turut serta dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut.

Selanjutnya Hoebel<sup>67</sup> menyimpulkan adanya empat dasar fungsi hukum, yaitu:

1. menetapkan hubungan antara para anggota masyarakat, dengan menunjukkan jenis-jenis tingkah laku apa yang diperkenankan dan apa pula yang dilarang.
2. menyelesaikan sengketa,

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 118.

<sup>67</sup> Esmi Warassih Pudjirahaju, Makalah, Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsi-Fungsinya, dalam Masalah-Masalah Hukum No. 5, Fak. Hukum UNDIP, Semarang 1991, hal. 6.

3. menentukan pembagian kekuasaan dan memerinci siapa yang boleh melakukan paksaan serta siapa yang harus mentaati dan memilihkan sanksi-sanksi yang tepat dan efektif,
4. memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan merumuskan kembali hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Dari apa yang telah diuraikan di atas apabila dikaitkan dengan pengaturan Hak Desain Industri kedalam bentuk Undang-Undang (Dalam hal ini Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri). Pada dasarnya merupakan suatu upaya perekayasaan hukum<sup>68</sup> dalam kehidupan ekonomi untuk memberikan fasilitas kepada warga masyarakat, maupun pemerintah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan hal ini adalah sangat tepat apa yang dikatakan oleh Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono,<sup>69</sup> yang menyatakan bahwa aspek hukum di dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dua sisi dalam dua kepentingan yang setara. Pertama, hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi. Berangkat dari tujuan ekonomi sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengamanan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai. Jadi hukum benar-benar dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingannya (sendiri dan

---

<sup>68</sup> Dalam hal ini hukum berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi agar tidak merugikan pihak lain, dan mengarahkan perubahan yang dikehendaki masyarakat dalam kehidupan ekonomi.

<sup>69</sup> Sri Redjeki Hartono, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional, Majalah Hukum Nasional No. 2 tahun 1995, hal. 119-133

bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan publik konsumen. Kedua hukum dipandang dari sisi negara/pemerintah hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan, kepentingan di dalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk mengawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas.

Hukum dibidang desain industri dimanfaatkan untuk mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi para pelaku usaha, disamping itu diciptakan pula keseimbangan kepentingan ekonomi dalam masyarakat, dengan melakukan kontrol terhadap perilaku para pelaku usaha dan menjamin hak-haknya.

### C. Pengaruh Nilai Sosial Budaya terhadap Hukum

Kebudayaan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Setiap hari orang melihat, mempergunakan dan bahkan kadang-kadang merusak hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan tersebut mencakup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai warga masyarakat dari alam dan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perikelakuan yang normative yang mencakup segala cara-cara atau pola-pola berfikir, merasakan dan bertindak. Seseorang yang meneliti suatu kebudayaan tertentu, akan tertarik oleh obyek-obyek kebudayaan seperti misalnya rumah-rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, cara-cara bercocok tanam, sistem

kemasyarakatan, bahasa, kesenian, religi dan lain sebagainya. Seorang sosiolog mau tidak mau juga harus menaruh perhatian pada hal-hal tersebut, akan tetapi dia terutama akan menaruh perhatian terhadap pola-pola perikelakuan, yaitu kelakuan-kelakuan yang timbul sebagai akibat daripada adanya interaksi sosial yang dinamis.<sup>70</sup>

Selo Sumardjan dan Soelaeman Soemardi<sup>71</sup> merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil dari karya, rasa, cipta masyarakat. Hasil dari karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan materiel yang diperlukan oleh manusia untuk memanfaatkan alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat.

Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah-kaedah serta nilai-nilai sosial budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalam rasa termasuk semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, cipta merupakan kemampuan mental dan kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud teori murni maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Hasil rasa dan cipta dinamakan pula kebudayaan rohaniah atau kebudayaan immaterial. Semua karya, rasa

---

<sup>70</sup> Robert, L. Sutherland (et.al), *Introductory Sociology*, Sixth edition, J.B. Lippincott Company, Chicago, Philadelphia, New York, 1961, hal. 30-31.

<sup>71</sup> Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (eds), *Setangkai Bunga Sosiologi*, cetakan Pertama, Jajasan Badan Penerbit F.E. U.I, Jakarta, 1964, hal. 113.

dan cipta, dikuasai oleh hawa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian terbesar atau seluruh masyarakat.

Jelaslah bahwa kebudayaan pada hakekatnya dan unsur rasa pada khususnya merupakan struktur yang normatiye atau yang disebut oleh Ralph Linton sebagai *design for living*.<sup>72</sup> Artinya, kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior*<sup>73</sup> yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian, maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai.

Kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat dan para warganya. Bermacam-macam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan para warganya, seperti misalnya kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya. Kecuali dari pada itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang spirituil maupun dibidang materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri.

Di dalam uraian di atas telah dijelaskan bahwa hasil rasa dari kebudayaan mewujudkan kaedah-kaedah dan nilai-nilai sosial serta budaya yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Sebetulnya, nilai-nilai sosial dan budaya

<sup>72</sup> Ralph Linton, *A. Study of Man*, Appleton-Century, New York, 1936, hal. 397.

<sup>73</sup> Robin M. Williams Jr., *American Society, A Sociological Interpretation*, Second Edition, Revised, Alfred-A-knof, New York, 1967, hal. 23. dalam Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan ke empat, Penerbit UI, 1983, hal. 36.

tersebut serta juga kaedah-kaedah berpusat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Bagi warga-warga masyarakat yang di dalam kehidupan sehari-hari diatur oleh dan menghadapi kebudayaan, lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan suatu pedoman yang berisikan pokok-pokok perihal tingkah laku macam apakah yang diharapkan oleh sebagian terbesar dari masyarakat. Nilai-nilai sosial dan budaya serta kaedah-kaedah yang terhimpun dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, pada hakekatnya merupakan *rules for the game of life*.<sup>74</sup> Dengan demikian maka lembaga-lembaga kemasyarakatan berisikan nilai-nilai sosial dan budaya serta kaedah-kaedah yang melembaga, dan bahkan menjiwai warga-warga masyarakat. Namun demikian, lembaga-lembaga kemasyarakatan tidaklah identik dengan nilai-nilai sosial dan budaya; lembaga-lembaga kemasyarakatan sifatnya lebih khusus oleh karena ada kemungkinan bahwa suatu nilai sosial dan budaya tertentu dapat diketemukan pada pelbagai lembaga kemasyarakatan.

Jelaslah bahwa kaedah-kaedah sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya, oleh karena pedoman-pedoman perihal tingkah laku manusia didasarkan pada konsepsi-konsepsi yang abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya menunjuk pada hal-hal yang baik atau buruk tentang situasi, kejadian maupun obyek tertentu. Dengan demikian nilai-nilai sosial dan budaya mencakup faktor-faktor sebagai berikut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid., hal. 39

<sup>75</sup> Ibid. hal. 40

1. Nilai-nilai merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi seseorang.
2. Nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis.
3. Nilai-nilai bukanlah merupakan tujuan konkrit daripada tingkah laku , akan tetapi merupakan suatu kriterium untuk memilih tujuan,
4. Nilai-nilai merupakan hal-hal yang sangat penting dan bukan merupakan hal-hal yang secara sambil lalu saja diperhatikan.

Di dalam kerangka ini dipergunakan pengertian nilai-nilai sosial dan budaya, oleh karena pengertian tersebut mencakup nilai-nilai yang kadang-kadang secara khusus dihubungkan dengan kebudayaan seperti misalnya pola-pola cara berpikir, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Selain dari pada itu perlu pula ditegaskan bahwa nilai-nilai sosial dan budaya di sini disoroti sebagai pedoman bagi suatu perbuatan, oleh karena disamping itu, pengertian nilai-nilai sosial dan budaya juga sering dipergunakan sebagai suatu evaluasi terhadap obyek tertentu.<sup>76</sup> Dengan demikian maka nilai-nilai sosial dan budaya diartikan sebagai suatu rangkaian daripada konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran bagian terbesar atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, tentang apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid. hal. 41.

<sup>77</sup> Koentjaraningrat, *Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, terbitan tak berkala LIPI, Seri No. I/2, 1969, hal. 19.

Nilai-nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi kelakuan manusia di dalam proses interaksi sosial sehingga dalam konkritisasinya berfungsi sebagai suatu sistem tata kelakuan.

Suatu nilai sosial dan budaya sebetulnya bersumber pada pengalaman-pengalaman seseorang, pengalaman-pengalaman mana menyangkut kelakuannya di dalam berhubungan dengan orang lain, yang semula merupakan kelakuan pribadi. Setiap orang mempunyai suatu wewenang atau kebolehan untuk melakukan perbuatan-perbuatan selama hal itu berlaku untuk dirinya pribadi. Tindakan-tindakan tersebut, apabila dilakukan secara teratur, merupakan kebiasaan bagi orang yang bersangkutan. Persoalan kemudian timbul apabila kebiasaan tadi diterapkan di dalam hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Di dalam hubungan sosial yang dinamis tadi, kebiasaan-kebiasaan tersebut mungkin dianggap baik atau mungkin dianggap buruk. Maka timbullah ukuran-ukuran atau penilaian terhadap apa yang baik dan apa yang buruk, yang lama kelamaan melembaga serta mendarah daging. Proses pelembagaan tadi berlangsung terus sampai bagian terbesar dari masyarakat menganggapnya sebagai ukuran-ukuran atau pedoman-pedoman yang berlaku umum serta dipertahankan dari satu generasi untuk kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya melalui proses sosialisasi. Walaupun pada hakekatnya sistem nilai-nilai sosial dan budaya timbul dari proses interaksi sosial antara manusia, namun pada akhirnya apabila sistem tersebut telah melembaga dan mendarah daging, maka nilai-nilai sosial dan budaya dianggap seolah-olah berada di luar dan di atas diri para warga masyarakat yang bersangkutan.



Konsepsi-konsepsi abstrak yang merupakan nilai-nilai sosial dan budaya tersebut dikonkretisir dalam wujud kaedah-kaedah yang merupakan sistem tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya bagi tindakan-tindakan para warga masyarakat. Konkretisasi daripada nilai-nilai sosial dan budaya tersebut terjadi apabila nilai-nilai tersebut dikenal, diakui, dihargai dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut bidang-bidang agama, kepercayaan, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Apabila norma norma atau kaedah-kaedah tadi ditelaah, maka kaedah-kaedah tersebut diberi unsur-unsur larangan, suruhan atau kebolehan dengan catatan bahwa pada umumnya kaedah-kaedah hukum mempunyai sanksi tegas yang dapat dipaksakan dan yang dapat berwujud suatu penderitaan.

Jelaslah bahwa kaedah-kaedah hukum yang terhimpun di dalam suatu sistem hukum, pada hakekatnya merupakan suatu konkretisasi daripada nilai-nilai sosial dan budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat. Dan oleh karena tidak ada masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan, maka hukum pasti dijumpai pada setiap masyarakat, betapun sederhananya masyarakat tersebut. Dan kenyataan tersebut telah diakui adanya sejak dahulu kala; Cicero, lebih kurang 2000 tahun yang lalu pernah mengikrarkan bahwa, *ubi societas, ibi ius*.<sup>78</sup>

Hukum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, oleh karena itu hukum tidak dapat dipisahkan dari jiwa serta cara berpikir dari masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan

---

<sup>78</sup> Bushar Muhammad., Pengantar Hukum Adat, djilid I, PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1961, hal. 39.

penjelmaan dari jiwa dan cara berpikir masyarakat yang bersangkutan, yakni yang merupakan struktur rohaniah masyarakat.<sup>79</sup>

Apabila dilihat bahwa sebagian terbesar dari masyarakat Indonesia merupakan masyarakat petani, maka perlu dilihat bahwa pada umumnya orang-orang Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari alam sekitarnya, dan dalam segala tingkah lakunya, dia harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan gaib yang tidak tampak. Untuk mencapai kebahagiaan hidup, maka seseorang haruslah dapat menyesuaikan dengan tatacara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tenang dan yang susunannya harmonis.<sup>80</sup> Idee tersebut yang di dasarkan pada alam pikiran tradisionil yang bersifat kosmis, menimbulkan anggapan bahwa umat manusia yang merupakan bagian dari alam, di dalam kehidupannya tidak mengalami pemisahan antara pelbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, hukum dan seterusnya. Alam pikiran tersebut menyebabkan timbulnya anggapan bahwa yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, antara masyarakat dengan warga-warganya, serta antara seseorang dengan teman-teman sejawatnya dalam masyarakat. Dengan demikian, maka suatu keadaan yang ideal adalah suatu keadaan di mana para warga masyarakat melakukan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat. Maka, secara tradisional orang-orang

<sup>79</sup> Koentjaraningrat (ed.) *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1971, hal. 379.

<sup>80</sup> Robert R. Jay, *Religion and Politics in Rural Central Java*, Cultural Report Series No. 12, South east Asia Studies, Yale University Press, New Haven, Connecticut, 1963, hal. 3.

Indonesia pada dasarnya berpikir, merasa dan bertindak atas dasar suatu kepercayaan pada tenaga-tenaga gaib yang mengisi seluruh alam semesta, dan semua tenaga tersebut membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan yang seimbang. Tiap tenaga gaib merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rohaniah, dan apabila terganggu harus dipulihkan dengan pantangan-pantangan dan upacara-upacara. Alam pikiran demikian merupakan alam pikiran tradisional dari orang-orang Indonesia yang untuk sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan biasanya disebut sebagai masyarakat petani. Dengan demikian maka masyarakat petani tersebut mempunyai sifat komunal yang kuat, mempunyai corak *magisch-religieus*, pikiran serba konkrit dan visuel.<sup>81</sup> Alam pikiran tersebut menghasilkan nilai-nilai sosial dan budaya yang berpokok pangkal pada lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yang bersifat universal.<sup>82</sup> Kelima masalah pokok tersebut mencakup:

- a. Hakekat dan sifat hidup manusia
- b. Hakekat dari karya manusia
- c. Hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu
- d. Hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya
- e. Hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya

Masyarakat petani pada umumnya menganggap kehidupan ini sebagai sesuatu yang penuh dengan kesengsaraan, untuk menghadapi keadaan tersebut

<sup>81</sup> Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia sebelum Perang Dunia ke II*, cetakan ketujuh, Pradnyaparamita, Jakarta, 1965, hal. 107.

<sup>82</sup> Keontjaraningrat, *Op. cit.*, hal. 22.

manusia harus bekerja keras agar dapat mengatasi keadaan tadi. Perihal hakekat waktu, pada umumnya mereka hanya berorientasi pada keadaan sekarang dan kadang-kadang mengagung-agungkan masa lampau, mereka jarang atau bahkan tidak memikirkan masa depannya. Kejadian-kejadian alam dianggapnya sebagai sesuatu hal yang wajar, dan apabila terjadi bencana alam maka hal itu dianggap sebagai nasib yang buruk. Mereka percaya bahwa dengan sebanyak mungkin menyelaraskan dirinya dengan alam, maka mereka akan terhindar dari bencana. Dengan demikian maka segala sesuatu harus dihadapi secara bergotong royong, dan oleh karena itulah perlu dijaga hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>83</sup> Nilai-nilai sosial dan budaya tadi sudah tentu mempunyai berbagai macam variasi dikalangan aneka macam suku bangsa di Indonesia, variasi-variasi mana juga berpengaruh pada sistem hukumnya.

Tentang hakekat karya, pada masyarakat ada suatu anggapan bahwa tujuan karya adalah semata-mata untuk mencapai kedudukan yang tinggi beserta atribut-atribut dari kedudukan tersebut. Nilai-nilai sosial dan budaya ini timbul oleh karena adanya alam pikiran bahwa penting tidak pentingnya seseorang tergantung pada kedudukannya di dalam lingkungan alam. Artinya, penting tidaknya seseorang tergantung pada fungsinya di dalam masyarakat. Semakin penting kedudukan seseorang di dalam masyarakat, semakin banyak pula yang diharapkan oleh

---

<sup>83</sup> Kodiran, Kebudayaan Jawa, dalam Koentjaraningrat (ed), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1971., hal. 344-345.

masyarakat darinya. Kedudukan yang penting dapat diketahui dari macam ciri-ciri materiil yang menjadi atribut atau *status symbol*.<sup>84</sup>

Nilai-nilai sosial dan budaya tradisional sebagaimana diuraikan di atas terutama terwujud di dalam hukum tradisional Indonesia, yaitu hukum adat. Dengan tepatnya M.M. Djodigono<sup>85</sup> menyatakan bahwa:

“Pokok pangkal hukum adat Indonesia adalah ugeran-uguran yang dapat disimpulkan dari sumber tersebut di atas dan timbul langsung sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih dan ditambah dengan unsur-unsur agama”.

Konkretisasi daripada nilai-nilai sosial dan budaya tradisional tersebut ternyata dari hal-hal pokok yang menjadi dasar bagi hukum adat<sup>86</sup>, yaitu:

- a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan)
- b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan itu.
- c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu maka sukarlah untuk dapatnya dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu-individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di dalam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, op. cit, hal. 43.

<sup>85</sup> M.M. Djodigono, Azas-Azas Hukum Adat, Penerbit Jajasan Badan Penerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1958, hal.7-8.

<sup>86</sup> Moh. Koesnoe, Menetapkan Hukum dari Adat, Majlah Hukum Nasional, No. 3 tahun 1969, hal. 5.

hubungan yang harmonis antara segalanya ini, gerak dan usaha memenuhi kepentingan individu, adalah gerak dan usaha yang ditempatkan di dalam garis ketertiban kosmos tersebut. Bagi setiap orang, maka garis ketertiban kosmis itu dijalani dengan serta merta. Bilamana tidak dijalankan garis itu, garis yang dijemakan di dalam adat, maka baik jalan masyarakatnya, maupun jalan kehidupan pribadi orang yang bersangkutan akan menderita karena berada di luar garis tertib kosmis tersebut yaitu, adat.

- d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman. Akan tetapi itu adalah suatu upaya adat, untuk mengembalikan langkah yang berada di luar garis tertib kosmis itu, demi untuk tidak terganggu ketertiban kosmos. Upaya adat dari lahirnya adalah terlihat sebagai adanya penggunaan kekuasaan melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam pedoman hidup yang disebut adat. Tetapi dalam intinya adalah lain, itu bukan pemaksaan dengan mempergunakan alat paksa. Itu bukan bekerjanya suatu sanksi. Itu adalah upaya membawa kembalinya keseimbangan yang terganggu, dan bukan suatu "hukuman", bukan suatu "leed" yang diperhitungkan bekerjanya bagi individu yang bersangkutan.

Pokok-pokok sebagaimana dikemukakan di atas tampak dalam praktek hukum adat seperti misalnya di bidang milik tanah. Hak-hak kemasyarakatan yang menonjol, adalah hak masyarakat atas tanahnya. Hak ini sangat menonjol, oleh karena tanah adalah tempat tinggalnya, tempat mencari makan, dan bahkan tempat hidup dari seluruh masyarakat. Hak masyarakat atas tanahnya di namakan hak ulayat. Salah satu bukti akan adanya hak ulayat tadi adalah antara lain bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mereservir tanah-tanah untuk dijadikan tanah larangan (misalnya untuk kuburan), keharusan dari orang luar masyarakat yang bersangkutan untuk meminta izin apabila ingin mengerjakan tanah dengan hak pakai, keharusan untuk membayar restribusi apabila hasil tanah akan dijual, dan seterusnya. Bagamanakah dengan kedudukan hak individual ?

Oleh karena seseorang dianggap sebagai warga sistem pergaulan hidup yang bernama masyarakat, maka dia bukanlah merupakan individu yang bebas sepenuhnya di dalam tingkah lakunya, oleh karena dia terikat oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Dia hidup dengan pedoman utama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, jadi kehidupannya terutama diperuntukkan sebagai pengabdian kepada masyarakat. Akan tetapi pengabdian tadi, yang pada hakekatnya merupakan himpunan kewajiban, dirasakan oleh para warga masyarakat sebagai sesuatu hal yang sewajarnya dari kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia perseorangan adalah suatu mahluk ke dalam mana masyarakat mengkhususkan diri. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa individu dengan hak-

haknya sama sekali tidak mempunyai tempat dan peranan. Bukanlah maksudnya untuk membebani individu-individu dengan kewajiban-kewajiban belaka.

Hak-hak perseorangan yang merupakan himpunan daripada kewenangan-kewenangannya, tetap diakui dalam kehidupan masyarakat tradisional. Akan tetapi penggunaan serta pelaksanaannya tidaklah secara bebas menurut kehendak pemilik hak. Setiap penggunaan hak harus dibenarkan oleh fungsinya hak tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan, artinya, hak-hak tersebut mempunyai fungsi sosial.

Apabila hak-hak perseorangan tadi dipergunakan di luar batas-batas fungsi sosialnya, maka penggunaan hak tadi menjadi pelanggaran hak (*onrecht*). Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk membuka tanah untuk kemudian dijadikannya suatu bentuk usaha dengan hak milik atau hak pakai di atasnya. Misalnya, ada seorang warga desa yang membuka sawah dengan hak milik di atasnya, pelaksanaan haknya tadi diserahkan untuk sepenuhnya kepadanya. Hasil sawahnya boleh dipakai untuk diri sendiri serta keluarganya, akan tetapi apabila ingin menjual sawahnya, maka dia terlebih dahulu harus meminta izin kepada penguasa masyarakat yang bersangkutan. Pemeliharaan sawah tak boleh dilalaikan, apabila pematangannya rusak maka hal itu dapat merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak memelihara sawahnya. Hak milik sebagai hak individual yang tertinggi dapat pula diciptakan atas bentuk usaha yang bernama tebat, yaitu suatu lubang besar yang diberi air untuk memelihara ikan. Kalau tebatnya sampai tertimbun karena kelalaiannya si empunya, maka hak miliknya dapat hilang.



Suatu hak perseorangan lainnya dapat dijumpai dalam lembaga hak utama. Seseorang warga masyarakat mempunyai hak utama untuk mengerjakan kembali bentuk usahanya. Misalnya, sawah yang dimilikinya baru saja diambil hasilnya. Semenjak panen hingga saat penanaman, pemilik sawah mempunyai hak utama untuk mengerjakan tanah itu kembali. Akan tetapi apabila pada musim penanaman dia ternyata tidak mengerjakan tanahnya kembali, maka haknya atas tanah menjadi hilang karena daluwarsa.

Jadi antar hak ulayat dengan hak-hak perseorangan selalu ada pengaruh timbal balik. Semakin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang tanah, semakin erat pula hubungannya dengan tanah itu dan semakin kuat pula haknya atas tanah tersebut. Dalam keadaan demikian, maka kekuatan hak ulayat terhadap tanah melemah atau berkurang. Akan tetapi bagaimanapun juga kuatnya hak perseorangan atas tanah, hak tadi dibatasi oleh hak ulayat. Akan tetapi di dalam kenyatannya, proses individualisasi semakin meluas dan bahkan dikota-kota dapat dikatakan hilang sama sekali.

Jadi menurut hukum adat terdapat bermacam-macam hak perseorangan atas tanah, dan warga-warga masyarakat. Sampai berapa jauh hak-hak perseorangan tadi bekerja sangat tergantung pada intensitas hubungan antara orang yang bersangkutan dengan tanahnya. Semakin intensif hubungan termaksud, semakin lemah pula campur tangan hak ulayat terhadap hubungan tersebut. Sebaliknya, semakin lemah hubungan antara orang tersebut dengan tanahnya, semakin kuatlah hak ulayat berlaku terhadap tanah tersebut.

Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa hubungan antara hak ulayat dengan hak perseorangan atas tanah adalah sebagai suatu wadah dengan isinya. Isinya akan tampak penuh apabila hubungan antara orang dengan tanahnya adalah intensif dan apabila dasarnya terlihat, maka berarti bahwa isinya kurang. Dalam keadaan terakhir itu muncul kekuasaan masyarakat dengan wujud hak ulayat. Dengan demikian maka kurang tepat apabila dikatakan bahwa proses individualisasi, hak ulayat terdesak oleh hak perseorangan, akan tetapi lebih tepat apabila dikatakan bahwa pada proses individualisasi dasar dari hak-hak perseorangan semakin tidak nyata. Hak milik hanya merupakan salah satu fungsi dari hak ulayat, fungsi mana berisikan upaya-upaya kepada para warga masyarakat agar dapat memanfaatkan tanah demi kelangsungan hidupnya. Maka di dalam hal ini fungsi tersebut jelas tidaklah berisikan kewenangan-kewenangan yang melebihi apa yang telah ditentukan oleh hak ulayat. Apabila kewenangan yang ada melebihi takaran yang telah ditentukan, maka akan timbul ketidak seimbangan pada fungsi-fungsi lainnya yang telah ditentukan, maka akan timbul ketidak seimbangan pada fungsi-fungsi lainnya yang membahayakan hak ulayat.

Dari uraian di atas kiranya jelaslah bahwa hak-hak perseorangan di dalam hukum adat lahir dari konsepsi-konsepsi yang berpangkal tolak pada kehidupan kolektif, dimana yang diutamakan adalah penguasaan suatu wilayah oleh masyarakat dan atas dasar itulah diusahakan perlindungan atas para warganya serta peningkatan kesejahteraannya.

Beberapa kesimpulan sementara akan dapat ditarik dari uraian diatas, pertama-tama adalah bahwa baik dibidang hukum publik maupun hukum perdata, nilai-nilai sosial dan budaya tidak dapat diabaikan begitu saja, oleh karena penerapannya yang efektif juga banyak bergantung pada nilai-nilai sosial para penegaknya. Artinya bahwa mau tidak mau haruslah diakui bahwa latar belakang pola-pola perikelakuan bagian terbesar dari masyarakat adalah nilai-nilai sosial dan budayanya yang merupakan konsepsi abstrak tentang apa yang baik dan apa yang buruk menurut pengalaman-pengalamannya selama beberapa generasi. Kedua, nilai-nilai sosial dan budaya yang telah melembaga dan mendarah daging tak akan dapat dirubah begitu saja tanpa memperhitungkan kekuatan-kekuatan nilai itu sendiri dan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Di dalam semua bidang hukum yang disajikan sebagai contoh, dapat ditemukan azas kepentingan bersama yang merupakan nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Azas kepentingan bersama tadi tidak perlu ditenggelamkan oleh proses individualisasi dalam alam pembangunan ini. Kedua faktor tadi dapat berproses secara berdampingan. Perubahan hukum yang efektif memerlukan iklim sosial yang baik dalam arti suatu keadaan yang dapat menunjang pembaharuan tadi.

#### D. Kesadaran Hukum dan Pencapaian Tujuan Hukum Dalam Masyarakat

Hukum (termasuk Hukum HAKI) itu tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan

hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk mencapai suatu kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti : kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. Di samping itu juga untuk mencegah dan selanjutnya menyelesaikan pertentangan yang dapat menimbulkan perpecahan diantara manusia. Kelangsungan hidup masyarakat dipertahankan dengan cara menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan manusia yang tidak jarang saling bertentangan, termasuk hadirnya hukum yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), yang juga menjadi bagian integral kehidupan masyarakat dan manusia itu sendiri.

Berdasarkan fungsi hukum, baik sebagai sarana rekayasa sosial maupun sebagai sarana kontrol sosial, maka setiap peraturan yang mengatur HAKI diciptakan untuk dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Warga masyarakat (individu) sebagai pihak yang dituju oleh suatu peraturan wajib dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya peraturan-peraturan hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan, tanpa didukung kesadaran warga masyarakat sebagai individu anggota masyarakat, maka kemungkinan hukum itu mengalami hambatan dalam penerapannya, karena perilaku individu yang bermacam-macam.

Masalah nilai-nilai dalam hukum, dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal itu terutama disebabkan, oleh karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada dan hukum yang dikehendaki

yang seharusnya ada. Seringkali diasumsikan, bahwa kepatuhan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan variabel tergantung. Di pelbagai hasil penelitian di luar negeri, asumsi tersebut telah diuji kebenarannya. Untuk Indonesia, maka masalah tersebut belum ditangani dengan semestinya, sehingga masih terhenti pada asumsi atau hipotesa belaka. Penelitian yang luas akan masalah itu, akan dapat mengungkapkan pelbagai hal yang hingga kini masih merupakan sesuatu yang diduga-duga.<sup>87</sup>

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa hukum mempengaruhi perilaku, yang dapat diartikan bahwa hukum sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan-aturan yang bersifat normatif lain ialah adanya mekanisme kontrol yaitu yang disebut sebagai sanksi. Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial, dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan.

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta. hal. 208.

Sudah tentu mungkin ada orang-orang yang tunduk kepada hukum bukannya karena rasa takut, melainkan ada alasan-alasan lain, dan selain itu tidak cukup kiranya untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi kontrol dari hukum dapat berjalan hanya dengan melihat banyaknya orang yang patuh pada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan. Sesungguhnya rasa takut terhadap hukum dalam arti yang positif mungkin hanya merupakan sebagian dari alasan orang-orang untuk selalu patuh pada aturan-aturan hukum. Argumentasi ini telah membangkitkan sejumlah pertanyaan tentang hubungan antara hukum dengan norma-norma sosial. Beberapa orang ahli ilmu hukum cenderung untuk menjawab pertanyaan dengan memandang kepada efek tidak langsung dari sanksi.

Tetapi adanya hukum tidak berarti kita hidup di dalam suatu tempat yang dihantui oleh ketakutan akibat adanya kekuatan hukum. Situasi psikologis semacam ini mungkin merupakan suatu anomali. Otak manusia mempunyai akseptabilitas (daya terima) yang sangat menakjubkan, sehingga suatu hal yang tidak mungkin bagi manusia untuk terus hidup di bawah tekanan ketakutan yang terus menerus. Olivercrona dalam tulisannya mengemukakan bagaimana sikap manusia dalam menghadapi kekuatan hukum ini, yaitu sebagai berikut :<sup>88</sup>

“ Disadari ataupun tidak kita akan selalu mencoba untuk menghindarkan diri dari segala ketakutan dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang mendominasi kita “.

---

<sup>88</sup> Olivercrona dalam bukunya Adam Podgorecki dan Chistopher J. Whelan, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 255.

Jika kekuatan hukum dan kemampuannya untuk melakukan kontrol diwujudkan dalam bentuk sanksi fisik, dan penerapan dari sanksi ini adalah merupakan suatu fakta di dalam kehidupan ini yang dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu, maka apakah sanksi itu dijadikan pedoman untuk mengetahui mekanisme dari hubungan antara hukum dan perilaku ?. Jika masyarakat patuh kepada hukum karena mereka takut terhadap sanksi, mengapa orang-orang yang bertugas untuk menjalankan sanksi itu patuh juga kepada hukum ?, jika masyarakat tunduk kepada hukum karena mereka takut kepada sanksi yang lain, mengapa orang-orang yang mengenakan sanksi yang lain itu juga patuh pula kepada hukum ?. Suatu pertanyaan yang tidak ada akhirnya.

Berkaitan dengan hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat, terdapat adanya unsur penyerapan sosial. Artinya, bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan *relevant* atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksi-sanksinya atau dengan periengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu. Hal ini memang bisa dimengerti, karena orang mungkin saja bertindak tidak sejalan dengan hukum, karena dia tidak mengerti akan tujuan dan kegunaan dari hukum tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Ibid*, hal. 256.

Pada umumnya, dalam suatu masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan kontrol sosial, dalam arti mengendalikan tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap peduli dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan kekuatan sanksi. Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan karena kondisi-kondisi obyektif yang tidak memungkinkan, tetapi karena sikap toleran (membiarkan) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, yaitu sementara pelanggar norma lepas dari sanksi yang sebenarnya dijatuhkan. Di samping itu, kadar ketaatannya itu juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya/hukumnya dan para aparat penegak hukumnya (yang sekaligus menjadi pengawas peraturan/hukum). Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan dengan perilaku yang diwujudkan, inilah yang merupakan masalah hukum dalam hubungannya dengan kataatan hukum anggota masyarakat. Namun masalahnya bagi Indonesia (dan masyarakat yang sedang berkembang lainnya) bertambah rumit, oleh karena Indonesia sedang mengalami masa transisi dimana sistem norma-norma yang lama ingin ditinggalkan, akan tetapi sistem norma-norma yang baru belum terbentuk secara mantap.

Ketaatan hukum (termasuk hukum dibidang HAKI) bila dilihat dari perilaku manusia, maka akan tergantung pada pilihan-pilihan manusia (individu) secara rasional untuk memilih antara taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku.



Individu dalam kegiatan atau aktivitasnya akan selalu memilih yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam *arena of choice* menurut tingkat rasional (yang paling baik). Perilaku rasional itu paling tidak bisa berorientasi pada perilaku kebiasaan (*habitual behaviour*), nilai-nilai atau etika, dan kebutuhan-kebutuhan individu.

Ada sementara anggapan yang menyatakan, bahwa kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.

Derajat kepatuhan/ketaatan hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Ketaatan hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Bahkan ada asumsi yang mengatakan bahwa ketaatan/kepatuhan hukum itu senantiasa tergantung pada kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena seseorang dapat mematuhi hukum bila ia memahami hukum. Kesanggupan memahami hukum itu secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Inilah letak antara kesadaran hukum dengan ketaatan / kepatuhan hukum terlepas dari adil tidaknya hukum tersebut. Dengan demikian yang penting disini ialah penilaiannya terhadap hukum, bukan hasilnya yang mungkin menganggap bahwa suatu hukum itu adil atau tidak adil. Jadi kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin

pula tidak timbul. Akan tetapi, tentang azas kesadaran hukum, terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.<sup>90</sup>

Akan tetapi, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu ? . Namun umumnya orang berpendapat, bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi, dengan demikian berarti berfungsinya hukum atau efektivitas ketentuan-ketentuan hukum dalam masyarakat di dalam pelaksanaannya, sangat erat kaitannya. Tetapi apakah permasalahan kesadaran hukum sederhana itu. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas atau berfungsinya hukum itu sangat dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu : Efektivitas dalam menanamkan hukum, reaksi masyarakat, dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum.<sup>91</sup>

Tentang taraf kesadaran hukum dari seseorang atau warga masyarakat, bisa kita tinjau dari indikator-indikator kesadaran hukum, yang sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang realtif konkrit. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun mungkin hanya mengenai hal-hal tertentu saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Op Cit, hal. 211.

<sup>91</sup> Ibid, hal. 216.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, bahwa indikator-indikator kesadaran hukum itu meliputi :<sup>92</sup>

### 1. Pengetahuan Hukum

Dalam hal ini, seseorang mengetahui, bahwa hukum yang dimaksudkan disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Misalnya seorang warga masyarakat mengetahui, bahwa pencurian, penipuan, pembunuhan, dan seterusnya merupakan perilaku yang dilarang oleh hukum. Menuntut pelaksanaan hak atau melaksanakan kewajiban merupakan perilaku atau peranan yang diperbolehkan oleh hukum, dan seterusnya.

### 2. Pemahaman Hukum

Artinya, seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya. Namun disini, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator yang saling bergantung. Artinya, bahwa seseorang dapat berperilaku tertentu atau mempunyai ide tertentu mengenai suatu perilaku tertentu, akan tetapi mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak, mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaedah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak

---

<sup>92</sup> Ibid, hal. 228-229.

mengetahui mengenai isi hukum tersebut, atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

### 3. Sikap Hukum

Artinya bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

### 4. Perilaku Hukum.

Dalam indikator ini, seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Namun demikian, masih ada suatu kesangsian apakah dengan adanya indikator-indikator tersebut, telah menunjukkan bahwa seseorang mendukung hukum yang berlaku ?.

Terlepas dari semua hal-hal yang telah dibahas, maka tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dapat pula dinilai dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku seseorang. Seseorang patuh kepada hukum belum tentu dia telah puas terhadap hukum, rasa puas hanya dicapai, apabila terpenuhi kesebandingan (rasa keadilan). Sikap taat dan tanpa rasa puas terhadap hukum ditunjukkan agar tidak mengalami kesulitan yang berat. Kepatuhan dari individu

pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu justru bersumber pada orang-orang lain di dalam kelompoknya. Sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu :<sup>93</sup>

### 1. *Compliance*

*Compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

### 2. *Identification*

*Identification* terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut,

---

<sup>93</sup> H.C. Kelman dalam bukunya Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, C.V. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 230-231.

sehingga kepatuhannyapun tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan, oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai, diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. Tentang hal ini Mowrer berasumsi bahwa :<sup>94</sup>

*"If one is identified with a force of which one is afraid, one can no longer be hurt by it."*

Asumsi Mowrer tersebut didasarkan pada suatu hasil penelitian yang dilakukan Bettelheim terhadap tawaran suatu pusat konsentrasi Nazi, dimana para tawanan akhirnya menerima nilai-nilai musuhnya yang terkenal kejamnya.

### 3. *Internalization*

Pada *internalization*, seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi

<sup>94</sup> H.O. Mowrer dalam bukunya Soerjono Soekanto, Ibid, halaman 231.

terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tentang proses ini Posposil berpendapat bahwa :<sup>95</sup>

*“ Internalization of a rule for behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule on the spur of the moment, without much thinking, he consciously compromises as a moral .... conviction for an immediate, and .... strong enough reward.”*

Lain halnya dengan Bierstedt, menurutnya dasar-dasar kepatuhan itu adalah:<sup>96</sup>

### 1. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diidoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

### 2. *Habitation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang

<sup>95</sup> L. Posposil dalam bukunya Soerjono Soekanto, Ibid, hal. 231.

<sup>96</sup> R. Bierstedt dalam bukunya Soerjono Soekanto, Ibid, hal. 225-226

kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan dengan bentuk dan cara yang sama.

### 3. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

### 4. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa orang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-



kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Di samping itu ada sementara orang yang berpendapat, bahwa seseorang patuh kepada hukum karena faktor penyesuaian diri terhadap kaedah-kaedah tersebut. Selain itu, seringkali seseorang juga mematuhi hukum karena identifikasi diri, artinya, dia mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah tersebut, akan tetapi ingin memelihara hubungan dengan warga-warga lain yang sekelompok, atau yang ingin dipelihara adalah hubungan dengan pemimpin-pemimpin kelompok tersebut. Akibatnya adalah, bahwa hubungan semacam ini akan dipatuhi selama norma-norma tersebut mengatur hubungan-hubungan yang dianggap penting. Setelah dianggap kurang penting, maka kekuatan hukum tersebut akan terpujar, karena mulai tidak dipatuhi oleh warga yang diaturnya.

Kemudian, apabila hukum yang diciptakan masyarakat, agar tercapai kehidupan yang teratur atau normal, tidak lagi dapat mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat, maka niscaya warga masyarakat berusaha untuk membentuk kaedah-kaedah hukum yang baru. Disinilah timbul sebab berikutnya mengapa seseorang patuh kepada hukum, yaitu faktor kepentingan. Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan orang mematuhi hukum, adalah penjiwaan daripada norma-norma tadi dalam diri para warga masyarakat. Ini berarti bahwa warga-warga tadi benar-benar mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan yang mendalam sekali. Namun demikian, inilah keanehan manusia, walaupun suatu

kaedah hukum tertentu menjiwai seorang warga masyarakat, tidak selalu dia mematuhi dalam tingkah laku sehari-harinya.<sup>97</sup>

Disamping itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Seidman,<sup>98</sup> mengatakan bahwa seseorang pemegang peran akan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi aktivitasnya itu tergantung dari tiga variable yaitu:

- a. apakah normanya telah disampaikan,
- b. apakah normanya serasi dengan tujuan –tujuan yang ditetapkan bagi posisi itu,
- c. apakah pemegang peran digerakkan oleh motivasi yang menyimpang.

Selanjutnya untuk merumuskan penyimpangan sebagai tingkah laku pemegang peran yang melanggar suatu norma hukum yang sesungguhnya telah dibuat dan ditaati oleh nya, maka Seidman membuat suatu model<sup>99</sup> yang berkamar 4 (empat) sebagai berikut :

		TINGKAH LAKU	
		Konform ( + )	Konform ( - )
MOTIVASI <	Konform ( + )	(1)            + +	(2)            + -
	Konform ( - )	(3)            - +	(4)            - -

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, Op Cit, hal. 237-239.

<sup>98</sup> Seidman, *Law and Development, A General Model, Law and Society Review*, Th. VI, 1972. alih bahasa Satjipto Rahardjo.

<sup>99</sup> Ibid.

Teori penyimpangan mengajarkan bahwa para pemegang peran itu dapat mempunyai motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma. Sementara itu pemegang peran dapat juga mempunyai tingkah laku-tingkah laku yang mungkin konform dan yang mungkin tidak konform.

Timbulnya penyimpangan ini bila dikaitkan dengan variable-variabel di atas mungkin akan memberi sedikit gambaran untuk variable (a) misalnya di sini masalah komunikasi khususnya komunikasi hukumnya menjadi lebih penting. Apakah pemegang peran telah mengetahui adanya peraturan dan sampai dimana ia memahami isinya dan sebagainya. Demikian variable yang lain sangat mempengaruhi tindakan dari anggota masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>100</sup>

Ketidaksesuaian tingkah laku dapat saja terjadi sekalipun si pemegang peran berkehendak untuk menyesuaikan diri. Hal ini mungkin terjadi pada perkara-perkara dimana ia tidak sadar akan normanya atau normanya itu diketahui tetapi bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk posisi pemegang peran itu.<sup>101</sup>

Clarence J. Dias<sup>102</sup> mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh lima syarat, yaitu:

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap dan dipahami.

<sup>100</sup> Essmi Warassih, Pembinaan Kesadaran Hukum, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum, UNDIP, Tahun XIII, 1983, hal. 11

<sup>101</sup> Ibid.

<sup>102</sup> Dikutip oleh S. Wignjosoebroto, Penelitian Mengenai Peaalayanan Hukum Kepada Orang-Orang Miskin, Dalam Bunga Rampai Permasalahan Hukum Dan Pembangunan, Surabaya 1967, hal. 10.

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
  - a. aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan diri kedalam usaha mobilisasi yang demikian itu,
  - b. Para warga masyarakat yang merasa harus berpartisipasi di dalam mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa-sengketa itu.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan efektif.

### BAB III

## KESADARAN HUKUM DALAM MENGGUNAKAN HAK DESAIN INDUSTRI OLEH PARA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN USAHA

#### A. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Pengrajin di dalam Memanfaatkan Hak Desain Industri.

Sebagai salah satu daerah tujuan wisata nomor dua terbesar di Indonesia setelah Propinsi Bali, Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah pusat pembuatan barang-barang kerajinan sekaligus sebagai daerah pemasaran hasil kerajinan yang berasal dari daerah lainnya di Indonesia. Hal ini bisa dilihat bahwa kenyataannya di Yogyakarta banyak ditemukan sentra-sentra industri kerajinan, seperti daerah Kota Gede sebagai pusat kerajinan perak dan emas, daerah Plered dan Imogiri sebagai pusat kerajinan kulit, daerah Kasongan dan Pundong sebagai pusat kerajinan gerabah dan keramik, daerah Pucung dan Patang puluhan sebagai pusat kerajinan kayu dan topeng, daerah Minggir dan Mlati sebagai pusat kerajinan bambu, daerah Srosowijayan sebagai pusat kerajinan batik dan lain sebagainya.

Agar supaya dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan kesimpang siuran pengertian tentang kerajinan, seni kerajinan atau hasil seni kerajinan maka di bawah ini akan diuraikan lebih dahulu tentang pengertian dari kerajinan itu sendiri.

***Arti kata yang umum.***

Umumnya orang awam mengatakan bahwa arti kerajinan adalah suatu ketrampilan yang dihubungkan dengan suatu pembuatan barang yang harus dikerjakan secara rajin dan teliti, biasanya oleh tangan.<sup>103</sup>

***Arti menurut Encyclopedia of World Art.***

Bila ditinjau sejarah lama dari kebudayaan manusia dalam masyarakat pertanian yang pertama, seni kerajinan merupakan kegiatan yang khas, walaupun harus diakui, bahwa di jaman itu hubungan antara seni kerajinan dan seni umumnya tidak dapat dipisahkan, seperti jaman sesudahnya. Seni kerajinan merangkum banyak kegiatan yang tidak merupakan suatu subyek dengan evaluasi estetik dan merupakan pemenuhan yang eksklusif dari kegunaan praktis. Hasil seni kerajinan adalah benda-benda yang berguna dan dekoratif, yang dibuat dengan tangan atau dengan alat-alat lain oleh seseorang yang mempunyai pengamatan langsung akan hasilnya, selama seluruh tahap pembuatan. Yang juga berpengaruh adalah metode dari pembuatannya. Ada kecenderungan, bahwa dalam perkembangan dari sejarah seni kerajinan, untuk mengulang dan meniru model pertama, sehingga ulangan itu merupakan suatu karya yang tak pernah mencapai kedudukan tinggi dalam kesenian, tetapi hanya sebagai dokumen dari suatu jenis dalam masa tertentu. Kelompok pengrajin merupakan kelompok yang tertutup untuk membatasi persaingan dan mensukakan rahasia dari ketrampilannya yang ada dan dipunyai oleh lingkungannya sendiri. Dalam perkembangannya dikenal daerah dengan masyarakat tertentu, yang mempunyai kemahiran suatu seni kerajinan dengan tanda-tanda yang khas. Kekhasan ini kadang-

---

<sup>103</sup> Mubyarto (Penyunting), *Peluang Kerja Dan Berusaha Di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta, 1985, hal. 360.

kadang meluas, tidak terbatas pada suatu keluarga, suku, marga, kota, daerah, melainkan kadang-kadang suatu kemahiran seni kerajinan dimiliki oleh suatu bangsa. Dalam lingkup pengrajin inilah terjadi langkah-langkah untuk membentuk pasar, komunikasi, memperbaiki hasil pembuatan, dan juga persaingan dalam kategori yang berbeda. Pada umumnya teknik seni kerajinan bertambah terus dengan pengalaman, dan tidak didapat atau ditentukan oleh ilmu pengetahuan. Selama pengetahuan didapat dari pengalaman, dan dicatat dalam pikiran.<sup>104</sup>

### ***Arti menurut Dewan Kerajinan Nasional Indonesia***

Menurut rumusan Anggaran Dasar Dewan Kerajinan Nasional Indonesia,<sup>105</sup>

“... Kerajinan termasuk segi kebudayaan dan merupakan usaha yang dapat dikembangkan sebagai industri rumah tangga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memelihara kelestarian dan perkembangan seni budaya bangsa,

Bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan hasil pembangunan, masalah tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serta bimbingan secara terus menerus, sehingga sumber potensi tenaga kerja dimanfaatkan dalam pembangunan,

Bahwa pembangunan pedesaan memerlukan usaha untuk memberikan modal pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

<sup>104</sup> Handicraf Antiquity, *The Encyclopedia of World Art*, Volume 7, Mc. Grow Hill Company, New York, 1963, hal. 270-272.

<sup>105</sup> Anggaran Dasar Dewan Kerajinan Nasional Indonesia, Pembukaan.

Bahwa kerajinan merupakan lapangan kerja yang perlu ditingkatkan, sebagai sumber pendapatan baru yang memerlukan sistem perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, peningkatan dan pengendalian mutu, desain dan bantuan permodalan.

Bahwa dalam usaha membantu golongan ekonomi lemah perlu diciptakan iklim kerjasama antar pengusaha dan pengrajin agar memiliki daya kembang dan daya saing yang lebih kuat, serta kerjasama dengan pemerintah, swasta maupun organisasi yang berhubungan dengan usaha pengembangan kerajinan....”

Kesimpulan dari rumusan ini adalah bahwa selain kerajinan adalah hasil seni budaya, kerajinan juga merupakan lapangan kerja dan sumber pendapatan.

### ***Arti Dalam Kebudayaan***

Sebagai bagian dari sistem kebudayaan, kerajinan berhubungan erat dengan sistem upacara kepercayaan, pendidikan, kesenian, teknologi, peralatan, bahkan juga mata pencaharian. Hubungan yang kait mengkait ini menyebabkan kerajinan menjadi suatu yang penting yang di dalam kehidupan manusia kemudian dapat diartikan sebagai suatu benda, suatu hasil karya yang mempunyai kualifikasi fungsional dan estetis. Seni kerajinan diperkirakan sejak peradaban manusia masih dalam tahap perburuan di jaman purba. Dengan mempergunakan bahan dasar yang terdapat disekitarnya, diciptakanlah benda-benda kegunaan yang diperlukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan terjadinya kehidupan manusia yang berkelompok, lahirlah seni kerajinan yang ternyata sangat tinggi nilainya, yang menyandang ciri



khas dari pengaruh lingkungannya.<sup>106</sup>Thelma Newman<sup>107</sup> mengatakan, bahwa di Asia Tenggara, tidak ada perbedaan antara seni dan kerajinan; yang ditampilkan adalah sebagian dari kehidupan, apapun namanya. Seni dan kerajinan berhubungan erat dengan kehidupan, hasil perkembangan beribu tahun; tiap perubahan konsep adalah suatu evolusi dari bentuk dan pola. Tradisi yang tua dipertahankan, dan yang baru harus membuktikan dirinya. Setiap perwujudan yang berganti, adalah ungkapan seorang seniman. Citra digubah dan dihargai, karya adalah untuk dipakai, dipergunakan dalam kehidupan. Bentuk adalah cara, bahwa sesuatu dibuat. Kegunaan adalah arti hakekatnya.

Thelma Newman menghargai kerajinan sebagai suatu karya seni yang tinggi. Umar Kayam<sup>108</sup> mengartikannya dengan kata-kata yang senada; yang dimaksud dengan pengrajin adalah mereka yang memiliki suatu ketrampilan khusus yang didapatnya dari penyampaian turun temurun nenek moyangnya atau yang didapat melalui suatu proses sosialisasi dari lingkungan budayanya. Seorang pengrajin biasanya adalah seorang tukang alamiah, bukan tukang yang mendapatkan ketrampilan lewat pendidikan khusus.

Sedangkan menurut Dagobert D. Runes dan Hanry G. Shriekel,<sup>109</sup> Pengrajin atau artisan adalah seseorang yang mempunyai kecakapan atau ketrampilan dalam bentuk suatu seni atau kemahiran dalam menggunakan alat perkakas, tetapi pekerjaan

<sup>106</sup> Australian Aboriginal Culture, *The Australian UNESCO Comitte for Museums*, Canberra, 1973.

<sup>107</sup> Thelma Newman, *South East Asian Arts and Crafts*, Crown Publishers, Inc, New York. 1977, hal. 3.

<sup>108</sup> Umar Kayam, *Banjar Sangging Kamasan*, Universitas Gadjah Mada, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Indonesia, Yogyakarta, 1979, hal. 10.

<sup>109</sup> Dagobert D. Runes & Hanry G. Shricnekel, *Encyclopedia of Art*, Philosophical Library, New York, 1946. hal. 345.

yang menyangkut kecakapan dalam penguasaan teknik dan perkakas itu tidak menuntut adanya suatu penciptaan (kreasi), pembaharuan (inovasi), ataupun keaslian (originalitas). Jadi kerajinan adalah suatu ketrampilan, teknik suatu seni.

***Arti Menurut Study on Master Plan for Design Promotion in The Republic of Indonesia yang dilakukan oleh JICA dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.***

Dalam studi tersebut kerajinan/kria dipisahkan dari ruang lingkup desain produk industri, yaitu sebagai aktivitas yang berdiri sendiri dengan istilah *Craft Design*. Khususnya di Indonesia keragaman produk kerajinan/kria dibuat berdasarkan pada keragaman material yang digunakan termasuk kayu, bambu, kulit keramik, batu, tekstil (baik hasil pencelupan dan tenunan), besi dan kaca. Dari sekian banyak material yang dipergunakan terdapat empat jenis yang paling banyak dipergunakan, yaitu bambu, kayu, kulit dan keramik.<sup>110</sup>

Setelah kita menyoroti kerajinan sebagai suatu totalitas yang dapat muncul dalam aneka ragam bentuk dan penampilan, hal yang perlu dikaji adalah pengertian yang konkrit dari apa yang dimaksud dengan benda hasil karya kerajinan tersebut. Pada umumnya di Indonesia pemisahan tegas antara seni dan kerajinan agak mudah dilakukan, karena para seniman biasanya hanya menuntut seni lukis dan seni patung yang termasuk dalam deretan seni murni, seni indah, dan seni visual. Lainnya adalah produk kerajinan termasuk wayang dan batik. Masalahnya sekarang adalah batas nyata antara kerajinan dengan yang lain, yaitu produk industri kecil yang menurut

---

<sup>110</sup> Rizky A. Adiwilaga, *Pendayagunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan Rakyat Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Makalah Seminar, FH. UII, 4 Oktober 2000, hal 5.

“selera” Eropa (tempat lahirnya ilmu estetika), bukan termasuk dalam kategori *craf* (kerajinan), misalnya: bata, genteng, pagar baja, , kuali, hem seragam, tahu, tempe, manisan dan lain sebagainya. *Encyclopedia of the World Art*<sup>111</sup> membagi hasil kerajinan menjadi: otomat, keramik, mata uang dan medali, hasil enamel, kulit, perkakas rumah tangga, gelas, berbagai hasil kerajinan emas dan perak, logam, mozaik, instrumen musik, boneka, marionet, wayang, gelas berwarna, permadani, babut, tekstil, sulaman dan renda. Thelma Newman,<sup>112</sup> yang sangat mengenal kerajinan di Asia Tenggara membagi kerajinan dalam: tekstil, batik, tenun, jumput, sulaman, barang anyaman, ukiran kayu, batu dan gading, gerabah, keramik, hasil logam, barang upacara yang dibuat dari kertas, perhiasan untuk badan dan alat-alat. Dinas Perindustrian Daerah Istimewa Yogyakarta<sup>113</sup> membagi kerajinan dalam: kerajinan anyaman, hasil kulit, gerabah, keramik, barang logam dan perak, emas, kuningan, tembaga, aluminium, batik, tenun dan ukiran kayu.

Pada umumnya produk kerajinan yang dihasilkan dari berbagai sentra kerajinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas memiliki pola desain yang beragam, dari yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga seperti anglo dan kuali dari tanah liat, sendok sayur, kwalo (ayakan) dari bambu, sampai kerajinan untuk estetika dan pajangan, seperti kereta kuda dari perak, sendok garpu dari kayu untuk hiasan dinding dan lain sebagainya. Apabila

<sup>111</sup> Handicraf Antiquity, Op. Cit. hal. 269.

<sup>112</sup> Thelma Newman, Op.cit.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang tanggal 24 Agustus 2001

diperhatikan keragaman pola desain kerajinan tersebut dapat dibedakan dalam tiga pola yaitu:

a. Kerajinan dengan pola desain Tradisional

Pola desain tradisional ini biasanya dianggap sebagai produk kerajinan yang mewakili kebudayaan masyarakat (*People's Culture*) yang telah secara berkelanjutan diwariskan dari waktu ke waktu dan mencerminkan tradisi, etnis, sejarah, keyakinan agama, kebiasaan dan iklim di berbagai wilayah, produk-produknya dapat berupa sebagai berikut:

- a.1 produk kerajinan untuk peralatan rumah tangga, seperti, sendok sayur dari bamboo dan dari tempurung kelapa, ayakan bambu, tungku masak dan kwali dari tanah liat, dandhang dari kuningan, caping (topi dari anyaman bambu), tikar dan lain sebagainya.
- a.2 produk kerajinan yang digunakan untuk pertunjukan kesenian / upacara, seperti wayang, topeng, gamelan, batik dengan motif klasik dan lain sebagainya.

Umumnya produk kerajinan dengan pola-pola desain tradisional ini dibuat secara berulang-ulang dan bentuknya tetap tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu sehingga sering terkesan ketinggalan jaman. Meskipun ketinggalan jaman masih tetap diproduksi karena masih banyak dicari terutama oleh para wisatawan sebagai salah satu bentuk oleh-oleh atau souvenir, mengingat kecenderungan dicarinya benda-benda kerajinan dengan pola desain tradisional

ini lebih pada orientasi aspek estetis dibandingkan dengan benda kerajinan yang berorientasi pada kefungsian sebagai alat belaka.

b. Kerajinan dengan pola desain pengembangan dari pola desain tradisional.

Biasanya produk kerajinan dengan pola desain pengembangan ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi selera pembeli. Sehingga hasil produk kerajinannya dapatlah dikatakan merupakan gabungan dari pola-pola desain modern (biasanya pada penggunaan bahan, cara pembuatan, fungsi kegunaan serta nilai estetisnya) dengan pola-pola desain tradisional (biasanya lebih menekankan pada aspek motifnya). Produk-produk kerajinan dengan pola pengembangan dari desain tradisional ini dibuat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan mempertimbangkan gaya hidup manusia modern dan lingkungan pasar global. Contoh dari produk dengan pola ini adalah sebagai berikut:

- b.1. produk kerajinan untuk perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, almari, mainan, yang terbuat dari kayu, bambu, keramik dan lain sebagainya
- b.2. produk kerajinan yang digunakan untuk pajangan/ souvenir bagi para wisatawan, seperti batik, replika candi (prambanan, borobudur), replika patung-patung hewan (gajah, katak, ular), wayang dan topeng (untuk souvenir), kaos, kemeja dengan sablon gambar candi, pantai, gunung Merapi, payung dan lain sebagainya.

c. Kerajinan dengan pola desain modern.

Produk-produk dengan pola desain modern ini lahir karena latar belakang ekonomi dibandingkan latar belakang tradisional. Biasanya produk-produk ini dibuat berdasarkan pola desain hasil imajinasi dan inovasi si pengrajin sendiri, atau pola desain berdasarkan pesanan dari pihak lain yang diperoleh karena kontrak atau sub kontrak, atau berdasarkan pola desain hasil penjiplakan dari produk-produk yang berasal dari negara-negara lain atau daerah lain. Contoh produk kerajinan ini antara lain berupa tas, sepatu, ikat pinggang, mainan (seperti boneka Shincan, Teletubies, Winnie The Pooh) dan lain sebagainya

Dari ketiga pola desain sebagaimana diterangkan di atas, pola desain kedua yang merupakan pola desain pengembangan dan pola desain ketiga yang merupakan pola desain modern, merupakan dua pola desain yang dapat didaftarkan sebagai hak milik atas desain bagi para kreatornya atau desainernya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang desain produk industri. Pendapat ini didasarkan pada pengertian dari desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Hak Desain Industri, dan ketentuan tentang pendaftaran desain produk industri yang harus memenuhi syarat kebaruan apabila desain itu akan mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Desain Industri No. 31 tahun 2000.

Untuk kerajinan dengan pola desain pengembangan yang dapat didaftarkan dan memenuhi syarat kebaruan adalah apabila kerajinan itu didesain untuk bentuk dengan nilai kegunaan/kemanfaatan yang baru. Sedangkan untuk kerajinan dengan

pola desain moderen dapat didaftarkan untuk bentuk kerajinan dengan nilai kegunaan/kemanfaatan dan nilai estetisnya yang baru.

Meskipun hak desain kerajinan dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara, namun di dalam prakteknya banyak para desainer kerajinan tidak mendaftarkan hak milik atas desainnya ke instansi yang berwenang hal ini bukan berarti bahwa para desainer kerajinan tidak tahu atau tidak mengerti bahwa desain itu dapat merupakan hak mutlak yang bersifat imateriel sebagai salah satu hak intelektual yang dapat dimiliki dan dilindungi oleh hukum. Hal ini terbukti berdasarkan hasil penelitian di lapangan beberapa desainer kerajinan<sup>114</sup> menyatakan bahwa dirinya merasa dirugikan apabila hasil karya desain kerajinannya dijiplak oleh pengrajin lain, sebab dengan semakin banyak dijiplaknya hasil kerajinannya oleh pengrajin lain itu menyebabkan desain atas kerajinan itu tidak dapat bertahan lama di pasaran sehingga pasar cepat jenuh. Bahkan menurut para desainer kerajinan, desain suatu karya kerajinan paling lama hanya bisa bertahan selama dua sampai dengan tiga bulan saja, artinya jika setelah dua atau tiga bulan si desainer kerajinan tidak membuat desain baru maka bisa dipastikan bahwa usaha kerajinannya menjadi berhenti atau tutup. Dari uraian ini terlihat bahwa sebenarnya para desainer kerajinan menyadari bahwa karya desainnya perlu mendapatkan pengakuan perlindungan hukum sebagai sesuatu hak yang bisa dimiliki (hak milik atas kebendaan), yang dalam bahasa hukumnya dikatakan sebagai hak desain.

---

<sup>114</sup> Wawancara dilakukan secara terpisah-pisah pada beberapa orang perajin yang terdapat di daerah sentra kerajinan di Kasongan, Ngampilan, Umbulharjo, Gamping dan Pocung Pendowoharjo antara tanggal 8 Juni –30 Oktober 2001.

Para desainer kerajinan tidak berusaha mendaftarkan hak milik desain untuk mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan adanya berbagai persepsi/pemahaman sebagai berikut, *persepsi/pemahaman pertama*, adanya sikap *pasrah* atau *nrimo* bahwa karya desainnya dijiplak oleh pengrajin yang lain, dikarenakan yang melakukan penjiplakan adalah saudara, tetangga, atau teman sesama pengrajin sendiri. Sehingga kalau mempersoalkannya desainer kerajinan akan dianggap mematikan usaha atau rejeki saudara, tetangga atau teman sendiri, yang konsekwensi selanjutnya si desainer yang mempersoalkan hak desainnya akan dimusuhi dan dikucilkan dari lingkungannya. Oleh karena itu dengan bersikap membiarkan penjiplakan si desainer kerajinan dapat dianggap atau menganggap dirinya sebagai orang yang berjiwa sosial dan berjasa bagi pengrajin yang lain dan yang penting bagi desainer adalah menjaga bagaimana kelompok sosialnya dapat tetap terjaga kerukunnya meskipun kalau ditinjau dari aspek ekonomi si desainer pengrajin itu dirugikan.

*Persepsi/pemahaman kedua*, pada umumnya para desainer kerajinan mempunyai sikap penjiplakan atas karya desain orang lain adalah sebagai suatu bentuk kelaziman yang harus dilakukan jika usaha kerajinannya akan tetap berjalan, artinya suatu usaha kerajinan akan sangat ditentukan juga oleh kemampuan si pengrajin untuk melihat kondisi apa yang sedang menjadi *trend* pasar pada suatu saat tertentu. Sehingga begitu ada barang kerajinan yang disukai dan laris dipasaran pada waktu itu, maka menyebabkan banyak pengrajin yang ikut serta memproduksi barang kerajinan itu, tanpa melihat bahwa barang produk kerajinan itu merupakan hasil dari



kreatifitas dan inovasi desainer kerajinan orang lain yang harus dihormati hak kepemilikannya. Di sini tidak ada toleransi sedikitpun terhadap desainer kerajinan yang menciptakan desain kerajinan yang laris dipasaran itu untuk menikmatinya, bahkan kadang-kadang si pemilik desain kerajinan yang laris tersebut baru memproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas dikarenakan kemampuan modal dan kemampuan memproduksi jumlah barang kerajinan juga terbatas. Tahu-tahu di pasaran telah beredar barang kerajinan yang sama desainnya dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kalau si desainer pemilik kerajinan yang laris di pasaran tersebut akan memproduksi lagi maka dia akan menderita kerugian karena pasar menjadi sangat jenuh. Adanya pemahaman bahwa penjiplakan sebagai suatu bentuk kelaziman ini menyebabkan para desainer kerajinan tidak melihat pentingnya mendaftarkan hak desainnya secara ekonomis, yaitu para desainer menganggap bahwa biaya pengurusan pendaftaran hak desain tidak sebanding dengan keuntungan yang akan dia dapatkan atau dengan kata lain para desainer kerajinan tidak melihat keuntungan yang dapat dinikmati secara langsung jika ia mendaftarkan hak desain atas produk kerajinannya untuk mendapatkan perlindungan hukum.

*Persepsi/pemahaman ketiga*, karena melihat pendaftaran hak desain itu memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit, maka para desainer kerajinan beranggapan bahwa sebenarnya perlindungan hukum di bidang Hak Atas Intelektual pada umumnya dan hak desain pada khususnya itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, tidak untuk para desainer kerajinan yang tergolong sebagai suatu usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu para desainer kerajinan masih

menganggap pendaftaran hak desain belum merupakan prioritas sebagai suatu kebutuhan. Bagi para desainer yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana tetap mempertahankan dan mengembangkan pasar yang ada ,dan bagaimana mendapatkan modal usaha serta bagaimana meningkatkan ketrampilannya.

Apabila diperhatikan dari tiga persepsi/pemahaman sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah di uraikan dalam Bab II tulisan ini, maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada dasarnya sikap dan perilaku para desainer kerajinan tidak mendaftarkan hak desainnya sebagai hak milik intelektual pada instansi terkait, hal ini sangat berhubungan dengan nilai-nilai kepribadian jawa yang saat ini dianut oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Dimana masyarakat Yogyakarta meskipun merupakan masyarakat yang berpendidikan, namun ternyata dalam menjalankan hidupnya masih berpegang teguh dan mendasarkan pada pola-pola nilai kehidupan Jawa yang tradisional.

Orang Yogyakarta sebagai bagian dari masyarakat Jawa mempunyai pedoman dan pandangan serta sikap hidup sebagaimana yang diajarkan dalam *Serat Sasongko Djati*.<sup>115</sup> Dimana di dalam ajaran tersebut terdapat Delapan Sikap Dasar (*Hasta Sila*) yang terdiri dari dua pedoman yakni Tri-Sila dan Panca- Sila. Tri- Sila merupakan pokok yang harus dilaksanakan setiap hari oleh manusia, dan merupakan tiga hal yang harus dituju oleh budi dan cipta manusia di dalam menyembah Tuhan,

---

<sup>115</sup> R. Soenarto, *Serat Sasongko Jati, Kawedalaken dening Paguyuban Ngesti Tunggal*, Surakarta, 1966, hal. 210-218.

yaitu: *eling* atau sadar, *pracaya* atau percaya dan *mituhu* atau setia melaksanakan perintah.<sup>116</sup>

*Eling* atau sadar ialah selalu berbakti kepada Tuhar: Yang Manunggal, yaitu merupakan kesatuan dari tiga sifat, *Sukma Kawekas* (Alloh Ta'ala), *Sukma Sejati* (Rosulluloh) dan *Ruh Suci* (jiwa manusia yang sejati), ketiga-tiganya disebut sebagai *Tri Purusa*. *Mituhu* adalah setia dan selalu melaksanakan segala perintah-Nya yang disampaikan melalui utusannya.

Sebelum manusia dapat melaksanakan Tri-Sila tersebut<sup>117</sup> di atas, ia harus berusaha dulu untuk memiliki watak dan tingkah laku yang terpuji yang disebut sebagai Panca-Sila, yaitu: *rela* (rela), *narima* (menerima nasib yang diterimanya), *temen* (setia pada janji), *sabar* (lapang dada), dan *budi luhur* (memiliki budi yang baik).

*Rila* merupakan sikap hidup yang penuh dengan keiklasan hati sewaktu menyerahkan segala miliknya, kekuasaannya, dan seluruh hasil karyanya kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan mengingat bahwa semua itu ada pada kekuasaan-Nya, oleh karena itu harus tidak ada sedikitpun yang membekas di hatinya. Orang yang mempuntai sifat rela tidak sepatutnya mengharapkan hasil dari apa yang telah diperbuatnya.

*Narimo* banyak pengaruhnya terhadap ketentraman hati. Orang yang narimo tidak loba dan *ngangsa*. Narimo berarti tidak menginginkan milik orang lain, serta

---

<sup>116</sup> Ibid. hal 12.

<sup>117</sup> Ibid. hal 16.

tidak iri hati dengan kebahagiaan orang lain. Orang yang *narimo* dapat dikatakan orang yang bersyukur kepada Tuhan.

*Temen* berarti menepati janji atau ucapannya sendiri. Baik janji yang diucapkan dengan lisan atau diucapkan dalam hati. Orang yang tidak menepati kata hatinya berarti menipu dirinya sendiri. Sedangkan kata hati yang telah diucapkan namun tidak ditepati, itu sama dengan dusta yang disaksikan orang lain.

*Sabar*, merupakan tingkah laku terbaik, yang harus dimiliki setiap orang. Semua agama menjelaskan bahwa Tuhan mengasihi orang yang bersifat sabar. *Sabar* itu berarti *momot*, kuat terhadap segala cobaan, tetapi bukan berarti putus asa. Ia juga orang yang kuat iman, luas pengetahuan dan wawasan. Ia juga pantas diumpamakan sebagai samudera pengetahuan, karena sudah tidak lagi membedakan antara emas dan tanah liat, sahabat dan musuh. Semua dianggap sama saja. Ia pun dapat diibaratkan sebagai samudera yang muat diisi apa saja, dan tidak meluap walaupun semua air sungai mengalir ke sana. Kesabaran dapat diibaratkan sebagai jamu yang pahit sekali. Hanya orang yang kuat pribadinya saja yang dapat meminum. Jamu yang bisa menyembuhkan kesedihan dan penyakit.

*Budiluhur*, berarti manusia harus selalu berusaha untuk menjalankan hidupnya dengan segala tabiat dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti kasih sayang terhadap sesamanya, suci, adil dan tidak membedakan pangkat dan derajat seseorang, besar, kecil, kaya dan miskin semua dianggap seperti keluarga sendiri. Ia juga suka menolong sesama tanpa mengharapkan balas jasa

berupa apa pun, baik harta, tenaga maupun pikiran. Bahkan kalau mungkin jiwanya sendiri dikorbankan.

Tetapi pengorbanan tidak dilakukan dengan membabi buta, melainkan dengan segala kejernihan, pikiran dan jiwa yang diperoleh dari tuntunan Utusan-Nya. Semua bisa dilaksanakan apabila empat sifat yakni *riila*, *narimo*, *temen* serta *sabar* telah dikuasainya.<sup>118</sup>

Lima dasar tersebut merupakan sifat dan pandangan hidup, yang berasal dari ajaran-ajaran orang-orang tua dan nenek moyang, yang telah menjadi pedoman umum, bahkan merupakan etika masyarakat bahkan menjadi ukuran moral bagi masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Menurut penyelidikan Dr. S. De Jong:<sup>119</sup>

“...orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda tentang Tuhan, dunia dan manusia, mungkin dalam praktek memperlihatkan sikap hidup yang sama. Suatu sikap tidak hanya berpatokan pada agama yang dianut oleh seseorang, melainkan juga dengan adat dan latar belakang kebudayaannya, bahkan juga watak bangsanya”.

Oleh karena itu orang Yogyakarta sebagai bagian dari orang Jawa biasanya selalu mengerti etika dan taat pada adat istiadat warisan nenek moyang, selalu mengutamakan kepentingan umum dari pada dirinya sendiri. Ini tergambar dalam pedoman hidup yang sangat populer seperti *aja dumeah*, dan *aja aji mumpung*.

*Aja dumeah* adalah pedoman untuk selalu mawas diri bagi semua orang Jawa yang sedang dikaruniahi kebahagiaan hidup oleh Tuhan YME. *Aja dumeah* adalah

<sup>118</sup> Budiono Herusatoto, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*, Hanindito, Yogyakarta, hal. 72-73.

<sup>119</sup> S. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1976, hal. 9.

suatu peringatan agar orang selalu ingat kepada sesamanya. Seseorang yang hidup bahagia lahir dan batin hendaknya tidak loba dan tamak, serta selalu ingat warga masyarakat di sekitarnya. Harus diingat bahwa kebahagiaan lahir maupun batin itu, juga hasil dorongan serta restu masyarakat sekitar.

Pada hakikatnya kebahagiaan seseorang itu tidak mungkin dicapai dengan bekerja sendiri, tetapi atas bantuan dan dukungan teman-teman serta masyarakat di sekelilingnya. Oleh karena, ia hendaknya tidak melupakan jasa orang-orang di sekelilingnya.

Pedoman mawas diri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Aja dumeh kuwasa, tumindake daksura lan daksia marang sapada-pada* (janganlah mentang-mentang berkuasa, sehingga tindak tanduknya pongah, congkak serta sewenang-wenang terhadap sesamanya).
- b. *Aja dumeh pinter, tumindake keblinger* (janganlah mentang-mentang pintar, lalu kebijaksanannya menyimpang dari aturan-aturan yang seharusnya).
- c. *Aja duimeh kuat lan gagah, tumindake sarwo gegabah* (janganlah mentang-mentang kuat dan gagah, lalu tindakannya selalu gegabah atau semaunya sendiri saja)
- d. *Aja dumeh sugih, tumindake lali karo wong ringkih* (janganlah mentang-mentang kaya, lalu perbuatannya tidak mengingat mereka yang lemah secara ekonomi).

- e. *Aja dumeh menang, tumindake sewenang-wenang* (janganlah mentang-mentang telah dapat mengalahkan lawan, lalu tindakannya sewenang-wenang terhadap yang dikalahkan).<sup>120</sup>

*Aji mumpung* adalah salah satu pedoman mengendalikan diri dari sifat-sifat *serakah* dan *angkara murka* apabila seseorang sedang hidup “di atas”. Orang Jawa percaya bahwa hidup manusia di dunia ini diatur oleh-Nya. Sehingga putaran hidup manusia seperti roda kereta yang berputar pada porosnya. Salah satu bagian dari roda itu kadang-kadang di bawah dan pada suatu saat berada di atas. Orang Jawa menyebutnya putaran nasib seseorang seperti *Cakramanggilingan*. *Cakra* adalah senjata panah yang ujung mata panahnya berbentuk roda.

Kalau nasib manusia sedang di atas, misalnya memperoleh kepercayaan masyarakat untuk mengatur sesuatu, hendaknya selalu ingat, dan mengendalikan diri, jangan memanfaatkan kesempatan berkuasa untuk tindakan-tindakan tercela.<sup>121</sup>

- a. *mumpung kuat lan gagah, njur tanpa arah-arah*. Artinya selagi kuat dan berkuasa, sehingga tindakannya gegabali dan tak terarah.
- b. *Mumpung pinter, njur sembrono nerak wewaler*. Artinya memanfaatkan kesempatan karena merasa pintar, sehingga tindakannya seenaknya sendiri, melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku.
- c. *Mumpung kuasa sapa sira sapa ingsun*. Artinya selagi berkuasa, tidak ingat lagi kepada teman dan saudara.

<sup>120</sup> Budiono Herusatoto, Op. Cit. hal. 74-75.

<sup>121</sup> Ibid. hal. 76

- d. *Mumpung sugih ,njur nyenyamah karo sing ringkih.* Artinya memanfaatkan kesempatan karena kaya raya, sehingga bertindak angkara murka terhadap mereka yang melarat.
- e. *Mumpung menang,njur nyawiyah hake liyane.* Artinya memanfaatkan kesempatan selagi memperoleh kemenangan, lalu bertindak merampas dan menginjak-nginjak hak orang lain.

Dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa pada dasarnya pemahaman dan sikap hidup orang Yogyakarta pada khususnya dan orang Jawa pada umumnya sangat dipengaruhi oleh pandangan/konsep nilai-nilai yang bersifat religius keagamaan. Dimana pengalaman dan pandangan hidup bersifat keseluruhan, tidak memisahkan individu dari lingkungannya, golongannya, zamannya situasi dan kondisinya serta alam kodratnya. Oleh karena itu cita-cita masyarakat Yogyakarta sebagai bagian dari orang Jawa, terletak pada pencapaian tata tertib masyarakat yang selaras dan serasi. Bagi masyarakat yang penting adalah menjamin kehidupan bersama, sebab dengan hidup bersama secara selaras dan serasi dapat menjamin kehidupan yang lebih baik bagi setiap individu-individu sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam pandangan ini maka kehidupan individu tidak bisa lepas dari lingkungan masyarakatnya, keselarasan dan ketentraman masyarakat merupakan dasar moralitas, yaitu sebagai dasar untuk selalu menjamin hubungan yang selaras antara individu dalam masyarakat mereka sendiri. Segala perbuatan individu yang menimbulkan kegelisahan dan kekacauan masyarakat dianggap merupakan suatu perbuatan yang buruk / melanggar norma. Sumber kekacauan itu



terletak dalam individu-individu yang bersaing dan mementingkan diri, atau golongan-golongan yang mengira bahwa pendapat/kebenaran mereka lebih benar daripada golongan lainnya dan yang tidak mau dimusyawarahkan lagi.

Jangkauan sistem sosial (masyarakat) yang berlaku akan menimbulkan jangkauan sistem moral (*system normative*) yang berlaku. Dimana sistem hubungan yang subyektif tidak diakui lagi, dan kontrol sosial yang berlaku adalah kontrol yang langsung, oleh karena orang saling mengenal dan saling dapat memeriksa, serta hubungan dan kewajiban yang berdasarkan moral cukup konkrit dan materiel untuk menjaga keselarasan dan solidaritas sebuah masyarakat yang terbatas luasnya. Dalam masyarakat tersebut sistem kekeluargaan berlaku. Hal ini tercermin dari sikap budaya masyarakat Jawa yang selalu tolong-menolong, musyawarah, dan gotong royong. Dalam budaya yang bersifat kekeluargaan, perasaan ewuh pakewuh sebagai suatu perasaan sungkan akan selalu menjadi pedoman bagi setiap individu anggota masyarakat dalam berhubungan dengan individu anggota masyarakat yang lain. Lebih-lebih jika individu itu berhubungan dengan orang yang lebih tinggi tingkatannya baik secara umur, derajat kedudukan dalam masyarakat, maupun secara materi.

Dari uraian tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Yogyakarta sebagai bagian dari masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang bersifat *communal*. Dimana dalam masyarakat yang bercirikan *communal*, individu sebagai anggota masyarakat, bukanlah sebagai individu yang bebas sepenuhnya di dalam tingkah lakunya, oleh karena dia terikat oleh batas-batas yang telah ditetapkan oleh

masyarakat. Setiap individu hidup dengan pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Akan tetapi pengabdian ini, yang pada hakekatnya merupakan himpunan kewajiban, dirasakan oleh para anggota masyarakat sebagai sesuatu hal yang sewajarnya dari kehidupan manusia. Dengan demikian maka manusia individu adalah suatu makhluk ke dalam mana masyarakat mengkususkan diri. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti bahwa individu dengan hak-haknya sama sekali tidak mempunyai tempat dan peranan. Bukanlah maksudnya untuk membebani individu-individu dengan kewajiban belaka.

Hak-hak perseorangan yang merupakan himpunan daripada kewenangan kewenangannya, tetap diakui di dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Akan tetapi penggunaan serta pelaksanaannya tidaklah secara bebas menurut kehendak pemiliknya. Setiap penggunaan hak perseorangan harus dibenarkan oleh fungsinya hak tersebut dalam masyarakat yang bersangkutan, artinya setiap penggunaan hak-hak perseorangan haruslah selalu memperhatikan fungsi sosialnya. Apabila hak-hak perseorangan tadi dipergunakan di luar batas-batas fungsi sosialnya, maka penggunaan hak perseorangan tadi menjadi pelanggaran hak (*onrecht*). Hal ini bisa terlihat dengan jelas dari penggunaan hak atas desain industri oleh para pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diterangkan di atas. Dimana masyarakat pengrajin menganggap bahwa penggunaan atas kepemilikan suatu hak desain kerajinan harus berfungsi sosial, sehingga seorang desainer kerajinan yang merupakan pemilik hak atas desain karena dia yang menciptakan, terpaksa harus rela

apabila karya desainnya dijiplak oleh pengrajin lain dan tidak boleh menuntutnya, karena jika ia menuntut justru malah dianggap melanggar hak orang lain.

Pendapat ini didukung oleh Agustinus Wahyono<sup>122</sup>, sebagaimana diterangkan dalam makalahnya yang berjudul "Dagadu: Butuh Implementasi suatu Perlindungan" disitu beliau mengatakan : Semua Disain Grafis produk PT. ADD di bajak bulat-bulat- *hantam kromo* oleh pembajak. Seorang pembajak pernah berkata kepada penulis (A. Wahyono), "Dagadu itu milik orang Yogyakarta", maksudnya, dagadu bukan milik sebuah badan usaha berijin resmi, melainkan milik masyarakat Yogyakarta seutuhnya, sehingga orang-orang Yogya "sah-sah" saja menduplikasikan apapun yang berhubungan dengan Dagadu.

Berdasarkan budaya kekeluargaan itu pula maka penjiplakan dianggap sebagai suatu kelaziman dan oleh karena itu pendaftaran hak desain ke instansi yang berwenang menjadi dianggap tidak memberikan keuntungan secara langsung kepada desainer kerajinan, lebih-lebih jika pendaftaran itu dilakukan secara berbelit-belit dan memerlukan biaya yang besar. Berdasarkan keterangan dari pihak PT. ADD sebagai salah satu pihak yang pernah mendaftarkan Hak Atas Karya Intelektualnya khususnya di bidang Hak Atas Merek mengatakan untuk mendaftarkan suatu karya intelektual ke pihak yang berwenang, satu tahun sebelumnya dia harus mem-*back up* atas hasil karyanya selama kurang lebih satu tahun supaya aman, sehingga seseorang membuat sesuatu, lalu ia mendaftarkan karya intelektual itu ke Dirjen HKI. Bukan berarti

---

<sup>122</sup> Agustinus Wahyono, Dagadu: Butuh Implementasi suatu Perlindungan, Makalah Seminar di FH UII, 1999, hal. 3.

keesokan harinya dia sudah dapat mengantongi sertifikat atas hak intelektualnya. Akan ada masa-masa cukup lama yaitu ada pemeriksaan secara administrative sekitar satu bulan. Setelah satu bulan masuk dalam tahap pengujian, yang lamannya kira-kira enam bulan. Setelah surat pendaftaran dikeluarkan, masih ada masa pengujian lagi (ini belum ada penyerahan sertifikat). Jika selama masa tersebut terjadi *complain*, maka surat tersebut bisa batal. Dari hal inilah yang “membikin” proses pengusulan tersebut terlalu panjang waktunya dan butuh biaya yang tidak sedikit. Namun hal ini jelas tidak terlalu menjadi kendala yang berarti bagi perusahaan-perusahaan besar. Sebab pada umumnya perusahaan besar memiliki alokasi dana yang sangat memadai dan memiliki orang-orang yang berkapasitas di bidang hukum.

Berdasarkan uraian itu pula maka di masyarakat pengrajin punya pemahaman bahwa pendaftaran HKI itu hanya milik atau kewajiban dari perusahaan-perusahaan besar saja, bukan pada para pengrajin kecil seperti yang banyak terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini masyarakat masih menganggap hukum hanya milik orang-orang atas saja bukan milik orang-orang kecil.

Apa yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak atas desain industri yang merupakan bagian dari bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapatlah dilihat sebagai suatu bagian dari sistem sosial / sistem masyarakat dimana hukum sebagai suatu gejala sosial yang pelaksanaan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh gejala sosial lainnya yaitu kondisi geografis dan sosial budaya kemasyarakatannya.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa pengaturan hak desain sebagai suatu hak milik intelektual yang dapat dipertahankan oleh pemegang haknya (pendesain/disainer kerajinan). Harusnya dipandang sebagai suatu aturan hukum yang belum mampu mengerakkan suatu perubahan sosial kemasyarakatan atau belum mampu merubah nilai-nilai masyarakat yang masih bersifat komunal kearah masyarakat yang menganut nilai-nilai individual. Ketidak mampuan hukum dalam melakukan perubahan sosial kemasyarakatan ini dikarenakan adanya pengaturan dibidang hak desain industri masih ditentukan dan dibatasi oleh sistem budaya yang ada dalam masyarakat, dan belum dilihat sebagai sesuatu yang memberikan keuntungan dan kemanfaatan secara ekonomis bagi para desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini dapatlah dikatakan sebagai sesuatu yang sangat logis, mengingat pemberlakuan ketentuan dibidang hak desain dalam suatu peraturan perundang-undangan masih digerakkan dari pusat kekuasaan dan belum menyentuh pada mekanisme permintaan dan penawaran dari masyarakat pengrajin yang merupakan masyarakat bawah. Artinya pengaturan dibidang hak desain menurut para desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum merupakan sesuatu yang mampu mendorong para desainer kerajinan tersebut, untuk melakukan kegiatan ekonomi secara kreatif dan menjamin bahwa hasil dari kegiatan tersebut akan memperoleh perlindungan hukum atas hak suatu karya desain dari suatu penjiplakan.

B. Pengaruh Pengaturan Hak Desain Industri Dalam Memotivasi Sikap dan Perilaku Desainer Kerajinan untuk Meningkatkan Kreatifitas dan Kualitas Serta Daya Saing Atas Produk Kerajinan.

Desain merupakan bagian yang tidak terpisah dari sebuah produk kerajinan yang banyak di pasarkan pada konsumen, sering konsumen tertarik membeli sebuah produk kerajinan karena desain yang menarik daripada kegunaan barang tersebut. Tidak jarang pula konsumen harus membayar mahal suatu barang produk karena desain sebuah produk kerajinan yang langka. Dengan demikian desain dapat dijadikan sebagai daya saing para desainer kerajinan dalam persaingannya dengan pendesaian kerajinan yang lain yang sejenis. Untuk itu sewajarnya apabila desain produk kerajinan merupakan bagian dari asset perusahaan yang patut mendapat perlindungan hukum yang cukup. Penciptaan sebuah desain kerajinan juga memerlukan tenaga pikiran, waktu, dan tidak jarang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk itu harus diupayakan agar desain kerajinan tersebut tidak mudah jatuh ketangan pihak lain, termasuk di dalamnya melindungi dari peniruan / penjiplakan oleh pihak lain.

Secara Hukum adanya Undang-undang No. 31 tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri, memang dimaksudkan untuk melindungi para desainer atas karya desainnya, supaya tidak ditiru / dijiplak oleh pihak lain. Sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan atas karya desain industri ini dapat lebih menciptakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam melakukan usahanya, karena dengan dilindunginya karya desain akan membawa dampak pada meningkatnya aktivitas daya inovasi dari para pendesain untuk selalu berkreasi menciptakan produk-produk desain baru, yang pada akhirnya secara makro ekonomi akan membawa dampak pula

pada perkembangan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat suatu daerah atau suatu negara.

Adanya peningkatan aktivitas daya inovasi untuk menciptakan produk-produk desain baru, ditinjau secara ekonomis juga akan membantu meningkatkan kualitas/mutu dari produk suatu industri, mengingat kualitas/mutu suatu produk disamping ditentukan oleh faktor bahan baku atas produk industri, faktor proses pembuatan atas suatu produk industri, juga ditentukan oleh hasil desain dari karya pendesaian atas suatu produk industri. Dengan meningkatnya kualitas/mutu suatu produk industri secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan daya saing atas produk industri tersebut. Suatu produk industri akan mempunyai daya saing tinggi jika produk industri itu mempunyai kemampuan memasuki pasar (baik dalam negeri maupun luar negeri) dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut.

Apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan penggunaan hak desain industri oleh masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Terlihat bahwa pada umumnya masyarakat pengrajin belum menyadari bahwa perlindungan hukum atas suatu karya desain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Hak Desain Industri akan berdampak pada peningkatan daya saing atas suatu produk kerajinan, dan akan berdampak pula pada kelanggengan suatu usaha kerajinan. Sebab dengan dilindunginya suatu karya desain kerajinan, pada dasarnya akan memberikan suatu hak monopoli atas suatu karya desain kerajinan dari pendesaian/desainer kerajinan. Dengan adanya hak monopoli ini tentunya para pendesain/desainer kerajinan akan

mendapatkan keuntungan monopolitis sebagai imbalan dari jerih payahnya menciptakan suatu karya desain kerajinan. Sehingga pada akhirnya karena adanya perlindungan hukum atas hak desain kerajinan akan mendorong para desainer kerajinan untuk selalu berinovasi sekaligus juga merangsang para pengrajin lain untuk menjadi inovator-inovator /pendesaian /desainer baru.

Meskipun para pendesain /desainer kerajinan itu dapat dikatakan belum sadar akan peran perlindungan hukum atas karya desain kerajinannya yang berdampak pada peningkatan daya saing, namun ketidak sadaran itu hanya terletak pada aspek perlindungan hukumnya yang ditunjukkan pada sikap tidak adanya pendesain/desainer kerajinan yang mendaftarkan hak desainnya ke instansi yang berwenang.

Tetapi apabila ketidak sadarannya dihubungkan dengan proses pembuatan/produksi kerajinan , para pendesain/desainer sadar betul bahwa karya desain kerajinan akan menentukan laku tidaknya, berdaya saing tidaknya atau berjalan tidaknya suatu proses pembuatan/ produksi kerajinan. Hal ini bisa ditunjukkan pada proses pembuatan/produksi suatu kerajinan. Sebelum perajin kerajinan membuat produksi kerajinannya biasanya para perajin pertama-tama memikirkan tentang bentuk desain kerajinan yang akan dibuat lebih dahulu, baru kemudian memikirkan tentang bahan baku untuk membuat kerajinan (biasanya dengan membuat pengemalan/pencetakan) dan memikirkan bagaimana proses produksi itu akan dilakukan serta bagaimana pemasarannya dan modalnya. Sebagai contohnya adalah proses pembuatan kerajinan patung di industri kerajinan Maharani



Primitif milik Bapak Sihono<sup>123</sup> yang terletak di desa Pucung, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Untuk membuat sebuah karya patung kerajinan, bapak Sihono lebih dahulu membuat pengemalan yang bisa berupa Mal untuk bahan baku dari kayu, atau cetakan untuk bahan bakunya dari tanah liat, Mal/cetakan ini berfungsi untuk mencetak bahan baku yang akan di buat patung. Mal/atau cetakan itu dapat bermacam-macam bisa Mal/cetakan kepala, leher, badan, tangan atau kaki. Setelah pengemalan tercipta, baru kemudian mencari bahan baku yang akan digunakan, biasanya bahan baku itu berupa kayu (yang berbentuk silinder dan pipih) atau tanah liat. Setelah menentukan bahan baku kemudian menentukan proses produksinya apakah akan diproduksi dengan teknik pembakaran tradisional atau dengan teknik pembakaran dengan cara di oven, atau proses produksi itu dilakukan dengan cara pemahatan. Setelah itu baru memikirkan tentang pemasarannya. Karena industri kerajinan patung Milik bapak Sihono ini merupakan industri kerajinan yang sudah begitu lama ( $\pm 14$  tahun), sudah besar dan terkenal maka biasanya proses pemasarannya tidak begitu kesulitan, karena para pembeli akan datang ke tempat bapak Sihono dan bahkan industri kerajinan Maharani Primitif ini kadang-kadang sangat kewalahan untuk melayani pemesanan baik yang datang dari daerah sekitar Yogyakarta, maupun yang berasal dari luar propinsi dan luar negeri. Hal ini tentunya tidak berlaku bagi para perajin pemula atau perajin kecil, yang ada disekitar industri kerajinan Maharani Primitif, yang biasanya kesulitan untuk memasarkan produk hasil kerajinannya. Oleh karena itu biasanya para

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Sihono dilakukan Pada Tanggal 7 Juli 2001.

perajin pemula dan perajin kecil akan minta tolong pada bapak Sihono untuk mencari bahan baku dan memasarkan hasil produksinya.

Dari keempat faktor proses pembuatan /produksi kerajinan, agaknya faktor pemasaran merupakan suatu faktor yang paling penting dan paling menentukan untuk berjalan tidaknya suatu usaha di bidang kerajinan, sehingga bagi pendesain/desainer kerajinan faktor perlindungan hukum atas desain kerajinan tidak menjadi suatu kebutuhan yang paling mendesak. Bagi para pendesain/desainer kerajinan kebutuhan pokok hanya pada terjaminnya pemasaran produk kerajinannya ,terjaminnya bahan baku atas produk kerajinan tersebut, serta modal yang dibutuhkan.

Untuk bisa langgeng suatu usaha kerajinan, faktor pemasaran memang merupakan faktor yang menentukan, namun untuk bisa tetap mempertahankan pasar dan mengembangkannya maka faktor desain dari suatu produk kerajinan harus tetap mendapat perhatian, mengingat para konsumen seringkali mencari suatu produk kerajinan bukan pada aspek kemanfaatan/kegunaan saja, namun juga karena aspek estetikanya. Bahkan aspek yang terakhir ini sering kali merupakan suatu aspek yang menentukan konsumen untuk membeli atau tidak suatu produk kerajinan. Oleh karena itu para pendesain/desainer kerajinan juga yakin betul tentang peranan karya desain kerajinan bagi laku tidaknya suatu produk kerajinan, bahkan karena ini mereka sering kali melakukan berbagai inovasi baru dibidang bentuk desain kerajinan. Maka tidak heran apabila di pasaran sering kali dapat kita jumpai berbagai bentuk karya desain kerajinan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan selera pasar yang saat itu sedang *trend*.

Menurut Bapak Choirul Shaleh,<sup>124</sup> sebagai seorang pengrajin kerajinan kayu yang berpola suku Indian di daerah Nogotirto, Gamping, Perubahan desain kerajinannya dilakukan setiap dua atau tiga minggu sekali, hal ini dilakukan disamping untuk meningkatkan jenis/macam jumlah kerajinannya, juga dimaksudkan untuk mengantisipasi berhentinya proses pembuatan usaha kerajinannya, yang dikarenakan kondisi pasar sudah jenuh sebagai akibat adanya peniruan desain kerajinannya oleh perajin-perajin lain. Berdasarkan pengalaman Bapak Choirul Saleh yang telah menjalankan usaha kerajinannya kurang lebih selama 5 tahun, suatu jenis desain kerajinan di pasaran hanya berumur kurang lebih dua sampai dengan tiga bulan saja. Oleh karena itu maka untuk supaya bisa bertahan usaha kerajinannya maka bapak Choirul Shaleh harus selalu berinovasi untuk membuat karya-karya desain kerajinan baru. Dengan demikian menurut bapak Choirul Saleh produk kerajinannya tetap bisa berdaya saing tinggi dan tetap diterima dipasaran terbukti omset penjualan beliau tetap tinggi bahkan ditengah-tengah badai krisis moneter yang saat ini melanda bangsa Indonesia. Walaupun karya desainnya ditiru oleh perajin-perajin lainnya. Sebab menurut beliau adanya peniruan atas karya desain kerajinannya, justru malah memacu untuk selalu berkreasi dan berinovasi. Dengan merubah desain kerajinannya dalam waktu yang relative singkat sebenarnya juga dimaksudkan untuk mempersempit atau mengurangi persaingan dengan perajin-perajin lainnya, karena para pesaing yang biasanya suka meniru kerajinannya akan menjadi kewalahan untuk mengimbangi karya desain dari Bapak Choirul Saleh.

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Choirul Saleh dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2001

Pengalaman itu juga dialami oleh Bapak Sabar<sup>125</sup> (pengrajin Tas Kulit ) dan Bapak Sugeng<sup>126</sup> (Pengrajin Ikat Pinggang Kulit) serta ibu Parman<sup>127</sup> (pengrajin Tas Koper Kulit) ketiganya tinggal di daerah Umbul Harjo, Kodya Yogyakarta, ke tiga pengrajin ini mengatakan bahwa desain karya kerajinannya dahulu pada kurun waktu antara tahun 1990 sampai dengan tahun 1995 banyak ditiru oleh perajin lain, bahkan dalam waktu lima tahun tersebut boleh dikatakan setiap desain baru yang dikeluarkan selalu ditiru oleh pengrajin lainnya sehingga ketiganya merasa dirugikan bahkan sempat frustrasi . Oleh karena itu sejak tahun 1996 ketiga pengrajin ini tidak menciptakan karya desain baru lagi (berhenti berinovasi) mereka hanya menjalankan usaha jika ada pesanan saja berdasarkan karya desain kerajinan lama atau karya desain kerajinan yang berasal dari pemesan. Akibatnya pada tahun-tahun itu juga, meskipun usaha ketiga pengrajin tersebut kurang begitu berkembang (kembang kempis), namun bagi para perajin yang suka meniru dan tidak bisa menciptakan desain baru akhirnya satu persatu mengalami kebangkrutan. Sehingga di daerah Umbulharjo yang tadinya terdapat 34 pengrajin tinggal hanya ada 7 orang pengrajin kulit saja yang sampai sekarang masih bisa bertahan.

Berdasarkan fakta di atas dapatlah dikatakan bahwa bagi para desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih melihat desain atas produk kerajinan hanya dari aspek ekonomis saja. Dimana desain atas produk kerajinan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan mutu atau kualitas suatu

<sup>125</sup> Wawancara dengan bapak Sabar dilakukan pada tanggal 12 Juli 2001

<sup>126</sup> Wawancara dengan bapak Sugeng dilakukan pada tanggal 27 Juli 2001

<sup>127</sup> Wawancara dengan ibu Parman dilakuakn pada tanggal 29 Juli 2001

produk kerajinan, sehingga produk kerajinan itu mempunyai daya saing terhadap produk kerajinan lain yang sejenis. Hal mana berdasarkan suatu teori ekonomi, daya saing atas suatu produk komoditi akan ditentukan oleh beberapa faktor<sup>128</sup>, yaitu:

### 1. Mutu komoditi

Mutu komoditi ditentukan antara lain oleh:

- a. Desain atau bentuk dari komoditi bersangkutan, atau spesifikasi teknis dari komoditi tertentu.
- b. Fungsi atau kegunaan komoditi tersebut bagi konsumen.
- c. *Durability* atau daya tahan dalam pemakaian

Mutu yang baik bukan hanya menyangkut masalah teknis mengenai mesin, alat dan hasil kerja, namun menunjukkan pula derajat kemanfaatan, kebagusan, keindahan dan kesempurnaan yang dibentuk dalam setiap tahapan produksi sampai terakhir pada pemakaian oleh konsumen. Dengan berdasarkan kepada definisi mutu seperti itu maka desainer suatu produk dalam perancangannya perlu menerapkan bahwa mutu harus menyatu dalam setiap desain dan setiap proses produksi, oleh karenanya mereka wajib terus memonitor dalam proses produksinya dari hasil rancangannya tersebut. Desainer wajib mampu dan memahami bagaimana menggunakan siklus perencanaan,

---

<sup>128</sup> Amir M.S. Strategi Pemasaran Ekspor, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Cetakan I, Jakarta, 2000, hal.102.

pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan (*plan, do, chek, action* : PDCA, yang disebut sebagai siklus Deming yang berhubungan dengan desain, produksi, penjualan, survai, dan redesain) untuk meningkatkan mutu.

Aspek lain yang menjadi perhatian bila suatu desain lahir/tercipta yaitu kebutuhan suatu pengkajian oleh ahli lainnya mengenai kelemahan-kelemahan atau bahaya-bahaya dari desain tersebut maupun dari barang hasil desainnya. Hal tersebut perlu agar masyarakat tidak dirugikan. Kenyataan sering menunjukkan bahwa desain dan barang hasil dari desain tersebut mengandung potensi bahaya tertentu yang dapat merugikan pemakainya, ataupun akibat sampingan atas penggunaan barang tersebut yang sebelumnya tidak teramalkan. Usaha pencegahan biasanya dilakukan dengan mengeluarkan peraturan, pembatasan, penyempurnaan desain, dan apabila tidak berhasil maka demi keamanan masyarakat perlu adanya pelarangan penggunaan desain atau barang yang bersangkutan.

Dalam program peningkatan mutu saat ini dikenal adanya program kendali mutu, program ini tidak hanya pada tahapan produksi, melainkan secara meluas mulai dari perencanaan, desain, divisi pembikinan dan semua yang terkait dalam produksi sampai pemasarannya tanpa terkecuali ikut di dalamnya. Dalam

program kendali mutu ini maka pendesain/ perancangan produk keterlibatannya tidak dapat dipandang sebelah mata, karena bila produksi ingin memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh konsumen maka tahapan perencanaan produksi yang melibatkan pendesain/desainer tidak dapat diabaikan.

Faktor mutu harus sudah menyatu di dalam proses perancangan sampai proses produksi untuk meningkatkan daya saing. Jadi tidak ada pilihan lain bagi desainer, ia harus memiliki pengetahuan tentang mutu, untuk itu, selain harus menerapkan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Dengan demikian mereka harus terpacu untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk kepentingan meningkatkan mutu dalam pengembangan produknya. Peningkatan mutu tercapai bila selama tahapan pengembangan produk juga diperhatikan jaminan mutunya yang melibatkan semua sektor seperti riset, perencanaan, desain, produksi percobaan, pembelian, rekayasa produksi, pembikinan, pemeriksaan, pemasaran dan pelayanan purna jual.<sup>129</sup>

Ringkasnya, mutu komoditi pada dasarnya ditentukan oleh komposisi antara nilai seni (*art*) dengan nilai teknis, serta selera pemakai.

---

<sup>129</sup> H. Muhammad Djumhana, Aspek-aspek Hukum Desain Industri Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 106.

## 2. Biaya produksi dan penentuan harga jual

Harga jual pada umumnya ditentukan oleh salah satu dari pilihan berikut ini:

- a. biaya produksi ditambah *mark-up* (margin keuntungan)
- b. Disesuaikan dengan tingkat harga pasar yang sedang berlaku (*current market price*)

## 3. Ketepatan waktu penyerahan (*delivery time*)

## 4. Intensitas promosi

## 5. Penentuan saluran pemasaran (*marketing channel*)

## 6. Layanan purna jual. (*after sales service*)

Di samping itu motivasi para desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan kreatifitas dan kualitas serta daya saing atas desain produk kerajinannya, masih sebatas pada tataran untuk menembus pasar baru dan mempertahankan pasar yang sudah ada pada saat sekarang (peningkatan kreatifitas dan kualitas serta daya saing atas produk kerajinan hanya disiapkan untuk jangka waktu pendek saja).

Para desainer kerajinan selama ini belum pernah berpikir bahwa sebenarnya peningkatan kreatifitas, kualitas dan daya saing atas hasil karya desain kerajinannya dapat memberikan keuntungan yang lebih bisa bersifat jangka panjang pada masa-masa yang akan datang. Mengingat bahwa pola desain kerajinan itu seperti mode pakaian yang pada suatu saat akan kembali berulang.



Karena para desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih berfikir jangka pendek, maka segala peningkatan kreatifitas, kualitas dan daya saing hanya ditujukan untuk “mengalahkan” pesaing-pesaing mereka yang ada dengan selalu membuat ide-ide desain kerajinan baru.

Oleh karena itu ,ketika ide-ide desain kerajinan baru itu sangat laku dipasaran dan membuat para pengrajin lain tertarik untuk melakukan peniruan (imitasi) guna mendapatkan keuntungan, para desainer kerajinan itu tidak mau mempersoalkannya sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum, bagi mereka (para desainer kerajinan ) mempersoalkan peniruan atas produk kerajinannya hanya dianggap membuang-buang waktu,biaya, tenaga dan pikiran saja. Bagi mereka akan jauh lebih bermanfaat dan menguntungkan jika ia melakukan dan membuat kreasi-kreasi atas desain kerajinan baru.

Kondisi sebagaimana dipraikan di atas menunjukkan bahwa fungsi hak Desain Industri belum mampu memberikan motivasi bagi para desainer kerajinan untuk meningkatkan daya kreatifitas dan kualitas atas karya produk kerajinannya.

Hal ini nampaknya dapat dipahami mengingat bahwa fungsi atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat , secara teoritis sosiologis sebagaimana dikatakan oleh Seidman tidak hanya ditentukan oleh kehadiran suatu peraturan yang secara positif berlaku, melainkan oleh beberapa faktor-faktor lain. Faktor-faktor yang turut menentukan bagaimana respons yang akan diberikan oleh pemegang peran adalah:

1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya,
2. Aktivitas dari lembaga-lembaga badan-badan pelaksana hukum, dan

3. Seluruh kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-laiannya lagi yang bekerja atas diri pemegang peran tersebut.

Sebelum hukum itu muncul sebagai sarana untuk menciptakan perubahan, ia telah didahului oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan lain, seperti penumpukan progresif penemuan-penemuan teknologi, kontak serta konflik kebudayaan, gerakan sosial, fungsi-fungsi perubahan fisik, biologik serta demografik. Pada waktu perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan tersebut telah berjalan sampai pada suatu tingkat tertentu, maka mulailah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut.

Menurut Talcoot Parsons<sup>130</sup> sebagaimana diuraikan dalam sub bab sebelumnya, mengatakan bahwa tingkah laku individu merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub-sistem-sub-sistem. Dalam garis besarnya, tingkah laku individu dibatasi oleh dua lingkungan dasar yang masing-masing bersifat fisik dan ideal, yaitu lingkungan fisik organik dan lingkungan realitas tertinggi. Di antara kedua lingkungan dasar tersebut terdapat sub-sistem budaya dengan fungsi mempertahankan pola, sub-sistem sosial dengan fungsi integrasi, sub-sistem politik dengan fungsi mencapai tujuan dan sub-sistem ekonomi dengan fungsi adaptasi..

---

<sup>130</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit. hal 29.

Dalam kerangka sub-sub sistem tersebut, hukum dapat masuk kedalam sub-sistem budaya dan dapat masuk ke dalam sub-sistem social. Sebagai sub-sistem budaya hukum mempertahankan pola nilai-nilai budaya yang merupakan pedoman bagi tingkah laku-tingkah laku individu. Sebagai sub-sistem sosial, hukum berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktifitas masyarakat. Sebagai sub-sistem yang paling dekat dengan lingkungan fisik organik, sub-sistem ekonomi melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisik. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh sub-sistem ekonomi, masyarakat tidak dapat mempertahankan hidupnya di tengah-tengah lingkungannya. Kegiatan ekonomilah yang dapat merubah berbagai sumberdaya yang terdapat disekitar manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.<sup>131</sup>

Penerapan teori Parson di sini kiranya akan berpendapat, bahwa penemuan dibidang teknologi merupakan penggerak perubahan sosial, sebab penemuan yang demikian itu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang berantai sifatnya. Pertama, terjadi penemuan baru dibidang teknologi. Ditempat kedua menyusul kegiatan ekonomi. Di sini orang mulai memikirkan pemanfaatan ekonomis apa yang dipetik dari penemuan tersebut. Baru kemudian hukum masuk, apabila kedua yang disebutkan di atas telah dijalankan. Dengan demikian hukum diterima sebagai struktur atas yang mempunyai basisnya pada bidang teknologi dan ekonomi dan oleh

---

<sup>131</sup> Ibid.

karenanya hanyalah merupakan kelanjutan dari kejadian-kejadian pada bidang tersebut.

Di sini dapatlah dijumpai adanya dua kutub yang berlawanan, yaitu di satu pihak yang mengatakan dapat menjelaskan timbulnya perubahan sosial hanya dari satu sebab (*single factor*) sedangkan di pihak lain yang berpendapat mengenai adanya berbagai sebab bagi timbulnya perubahan sosial. Dengan adanya pendapat tersebut terakhir ini maka pembicaraan mengenai penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial kiranya dapatlah diteruskan. Oleh karena nampak masih terbuka kemungkinan bagi berperannya hukum di sini.

Perubahan yang timbul oleh hukum pada dasarnya lebih terjadi secara berangsur-angsur (*incremental*) dari pada langsung. Oleh sebab itulah maka di atas dikatakan, bahwa dengan adanya penjelasan mengenai timbulnya perubahan sosial sebagai akibat berbagai sebab yang saling kait mengkait itu, maka pembicaraan mengenai penggunaan hukum sebagai sarana merubah tingkah laku menjadi relevan. Dengan kata lain, di sini kita menemukan suatu kerangka teori sosiologi yang dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan, bahwa terjadinya perubahan sosial itu melalui suatu proses yang cukup kompleks dan tidak merupakan hasil hubungan yang langsung antara suatu faktor dan suatu kejadian. Kompleksitas ini misalnya ditunjukkan melalui kemampuan suatu akibat untuk juga mempengaruhi dan memodifikasi penyebabnya.<sup>132</sup>

---

<sup>132</sup> Satjipto Rahardjo, op.cit, hal. 154.

Dalam pada itu, apabila dikehendaki bahwa hukum itu menimbulkan perubahan-perubahan pada obyek yang diaturnya, terutama dalam tingkah laku, maka penguasaan pengetahuan yang lebih seksama mengenai obyek yang diatur, mengenai reaksi-reaksi yang ditimbulkannya, selanjutnya mengenai kemampuan dari lembaga-lembaga serta personel yang menjalankan hukum, merupakan tuntutan yang tak dapat ditinggalkan.

Disamping pengetahuan tersebut di atas maka kita juga perlu memperhatikan persoalan nilai-nilai yang turut menentukan bagaimana seseorang itu bertingkah laku dalam masyarakat. Bahwa sekalipun peranan seseorang itu ditentukan oleh pengharapan sebagaimana tercantum dalam hukum, namun hal itu bukan satu-satunya faktor penentu di sini, sedangkan yang lain diantaranya adalah faktor nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat.

Apabila diinginkan, bahwa hukum itu menjadi sarana untuk melakukan perubahan sosial, maka salah satu hal yang perlu dipersoalkan terlebih dahulu adalah kearah mana perubahan itu akan diarahkan, masalah pemilihan nilai-nilai ini pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, bisa menjadi kritis, oleh karena orang tidak berhadapan dengan suatu sistem nilai yang padu, melainkan yang majemuk.<sup>133</sup>

Pembicaraan mengenai nilai-nilai ini cukup penting, oleh karena dapat menentukan sikap yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu perubahan-perubahan yang dikehendaki barang tentu harus juga memikirkan sistem nilai-nilai mana yang pada suatu saat perlu menjadi kerangka untuk mengatur.

<sup>133</sup> Robert B. Seidman, *A General Model, Law and Society Review*, Jilid VII, 1972, hal. 322-323.

Apabila di sini kita menggunakan kerangka Parson lagi, maka dapatlah dikatakan terdapat serangkaian permasalahan yang berhubungan satu sama lainnya<sup>134</sup> yaitu:

Pertama, kita dapat mengenali kembali peranan hukum sebagai faktor pengintegrasikan masyarakat. Apakah peranan tersebut diutarakan dengan istilah *social control* ataukah *social engineering*, keduanya sebetulnya mengandung makna usaha melakukan integrasi terhadap hubungan, komponen serta bidang-bidang dalam masyarakat. Peranan sebagai faktor pengintegrasikan yang demikian itu menjadi lebih menonjol lagi apabila ia dihubungkan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Di lihat dari segi teori Parson, maka apa yang kini disebutkan sebagai usaha untuk melakukan penyusunan masyarakat baru melalui hukum, bisa dilihat sebagai perwujudan interaksi antar sistem kebudayaan dan sistem sosial, dalam hal ini hukum. Interaksi ini masih diteruskan lagi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, yang fungsi primernya adalah adaptif dan sistem politik.

Proses-proses yang berlangsung pada sistem-sistem politik dan ekonomi sekarang ini berhubungan erat dengan sistem kebudayaan, yaitu yang menjadi sumber bagi mengalirnya tata nilai baru yang menjadi arah bagi proses-proses yang berlangsung di bidang politik dan ekonomi tersebut. Hukum di sini diharapkan untuk dapat merumuskan nilai-nilai baru tersebut ke dalam norma-norma yang untuk

---

<sup>134</sup> Satjipto Rahardjo, op.cit, hal. 160.

selanjutnya menjadi dasar bagi berlangsungnya baik bagi proses-proses politik maupun ekonomi.

Dalam kehidupan di bidang desain industri secara internasional, Indonesia sebagai warga dunia tidak mungkin menghindari etika pergaulan internasional dan hukum internasional. Dengan kata lain Indonesia tidak bisa terlepas dari perjanjian-perjanjian internasional yang secara umum berlaku khususnya di bidang desain industri maupun di bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya.

Dari Uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa berdasarkan realitas sosial, letak kedudukan bangsa Indonesia dan pengaruh hukum internasional, yang keseluruhannya mau tidak mau tentunya dapat mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan politik hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof.Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH,<sup>135</sup> yang menyatakan bahwa:

“Politik Hukum Nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan, atau bergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan juga oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan kata lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang”

Dalam hubungannya dengan hukum desain industri di Indonesia, sangatlah jelas bahwa hukum desain industri banyak ditentukan oleh hukum yang berlaku secara internasional karena secara realitas bangsa Indonesia sebenarnya tidak mempunyai tradisi pengaturan dan perlindungan di bidang desain industri. Hal itu

---

<sup>135</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991, hal.1.

dikarenakan akar hukum Indonesia bersifat agraris , *communal* dan kegotong royongan serta tidak begitu mengenal perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang bersifat individual, hal ini terlihat dari beberapa pandangan dari para desainer/pendesain yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru oleh pihak lain, mereka tidak merasa dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian dari orang lain. Mereka berpandangan bahwa karya desaiannya sebagai karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga.

Disamping itu juga , pengaruh hukum internasional dibidang pengaturan desain industri pada bangsa Indonesia khususnya dan negara-negara berkembang umumnya, tidak bisa tidak juga karena adanya “keterpaksaan”, artinya negara-negara berkembang terpaksa menerima ketentuan yang terbentuk dalam perjanjian-perjanjian internasional karena untuk mempertahankan kehidupan perekonomiannya, yaitu guna memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas juga untuk memberikan perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional.

Jelas dengan demikian ada ketergantungan yang kuat antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dalam arti pengembangan hukum nasional Indonesia tidak mungkin terlepas dari pengembangan hukum internasional. Hal demikian sudahlah menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, sudah banyak peraturan hukum asing atau yang bersifat internasional dituangkan dalam peraturan perundang-



undangan nasional seperti ketentuan-ketentuan dibidang hak atas kekayaan intelektual.

### C. Upaya-Upaya Peningkatan Daya Saing Dalam Produksi Kerajinan Dengan Berdasarkan Hak Desain Industri

#### 1. Upaya Perlindungan Hukum di Bidang Desain Industri

Dilihat dari pentingnya sebuah desain dalam dunia industri, maka sangatlah logis bila desain harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jaminan perlindungan hukum ini pada dasarnya untuk menghindarkan terjadinya pencurian atau penjiplakan atau imitasi terhadap desain oleh pihak-pihak yang berniat untuk berbuat curang. Perlindungan hukum tersebut dengan menggunakan sistem HKI, yang berupa sebuah ketentuan yang melindungi desain dan desainer terhadap tindakan-tindakan yang merugikannya.

Perlindungan hukum tersebut bersifat Internasional (*Konvensi, Agreement*) di bidang desain Industri dan juga nasional setiap negara di dunia. Perlindungan hukum yang bersifat internasional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan pembajakan yang bersifat lintas wilayah (transnasional), sedangkan perlindungan hukum yang bersifat Nasional dimaksudkan untuk menjamin terjadinya kompetisi perdagangan yang jujur. Oleh karena itu Desain memerlukan perlindungan hukum, karena selain dari aspek proses desain juga menyangkut aspek ekonomi dalam hal ini perdagangan.

##### a. Perlindungan Desain Industri Secara Internasional

Secara internasional perlindungan hukum di bidang desain industri diawali pada tahun 1883 yaitu dengan ditandatanganinya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, dan dalam perkembangannya terdapat beberapa ketentuan internasional yang secara khusus mengatur tentang Desain Industri. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883)

Merupakan persetujuan induk (*General Agreement*) bagi perlindungan desain industri secara internasional. Disebut sebagai persetujuan induk karena mengatur juga mengenai Paten dan Merek, sedangkan bagi desain Industri sendiri sebagai dasar diberlakukannya persetujuan atau konvensi internasional yang mengatur khusus tentang desain industri

Sebagai persetujuan induk, Konvensi Paris memuat prinsip-prinsip dasar, yang terdiri dari :

a.1. Prinsip *National Treatment*

Bahwa negara-negara anggota wajib menjamin untuk memberikan perlindungan yang sama kepada warganegara anggota lainnya selayaknya memberikan kepada warganegarannya sendiri dan warganegara dari negara bukan anggota dari konvensi Paris juga wajib mendapatkan perlakuan yang sama, apabila berdomisili di salah satu negara anggota konvensi atau mempunyai usaha komersial atau industri secara nyata dan efektif di negara tersebut,

### a.2. Prinsip *Right of Priority*

Bahwa setiap pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukannya kenegara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan untuk desain industri selama 6 bulan (termasuk Paten dan Merek),

### a.3. Prinsip *Common Rules*

Bahwa desain Industri harus dilindungi disetiap negara anggota, selain itu ditetapkan bahwa perlindungan desain industri tidak boleh hilang atas dasar kegagalan karyanya atau karena benda-benda yang berhubungan dengan desain yang diimport.

### b. *The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs* (6 November 1925)

Persetujuan ini memfasilitasi perlindungan di sejumlah negara dan terbuka bagi semua negara anggota Konvensi Paris. Persetujuan ini adalah sistem atau deposit internasional bagi desain produk industri agar menjamin perlindungan di sejumlah negara tanpa harus melipat gandakan syarat-syarat formalitas atau biaya-biaya. Secara Internasional pengakuan deposit Desain Industri dapat dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu secara langsung melalui *International Bureau of WIPO* atau

secara tidak langsung melalui kantor HKI dari negara si pemohon sendiri.

c. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs* (27, April 1971).

Persetujuan ini mengatur tentang Sistem Klasifikasi Internasional bagi Desain Industri, hampir sama dengan Klasifikasi Paten dalam *Strassbourg Agreement*. Sistem klasifikasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu:

c.1. Daftar kelas dan sub-kelas desain Industri, Klasifikasi terakhir terdiri dari 3 Kelas dan 223 Sub-kelas;

c.2 Daftar barang-barang secara abjad yang mana desain-desain tersebut telah diterapkan, kira-kira terdapat 6250 daftar barang yang berbeda-beda jenis;

c.3 Catatan keterangan

Dalam persetujuan ini mengizinkan negara anggota, apakah akan menggunakan klasifikasi locarno sebagai satu-satunya klasifikasi yang diterapkan untuk dokumen design atau apakah mengharuskan klasifikasi domestik kemudian menggunakan klasifikasi locarno sebagai klasifikasi tambahan.

d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (15 April 1994)

Persetujuan TRIPs mengatur tentang desain industri terdapat dalam bagian II, Bab 4, Pasal 25 dan 26. Pasal 25 memuat ketentuan

yang mengatur tentang persyaratan perlindungan desain industri dan pasal 26 memuat tentang ketentuan perlindungan desain industri.

Ketentuan ini mengatur tentang suatu desain industri yang wajib atau dapat dilindungi oleh suatu negara anggota Trips. Persyaratan tersebut terdiri dari 3 (tiga), yaitu: desain Industri itu harus baru (*novelty*) atau asli (*original*) serta merupakan hasil karya secara mandiri (*independently*) wajib untuk dilindungi, Negara anggota dapat menetapkan tidak baru atau asli suatu desain apabila tidak memiliki perbedaan berarti dengan desain yang telah dikenal atau kombinasi dari ciri-ciri desain yang telah dikenal (*do not significantly differ from known designs or combination from known design features*), Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan tidak berlaku terhadap desain yang didasarkan terutama pada pertimbangan-pertimbangan teknis dan fungsional.

Ketentuan yang lain mengatur tentang jaminan dari setiap negara bahwa persyaratan untuk perlindungan desain tekstil tidak mendapatkan hambatan yang tidak wajar (*unreasonably impair*) atas kesempatan untuk mencari dan memperoleh perlindungan terutama untuk biaya, pemeriksaan (*examination*) atau pengumuman. Negara-negara tersebutpun bebas memilih perangkat hukum untuk melindunginya, yaitu melalui Undang-Undang tentang desain industri atau undang-undang hak cipta.

Mengenai hak, pemilik desain industri yang dilindungi berhak untuk mencegah pihak ketiga yang tanpa persetujuannya membuat, menjual atau mengimpor barang-barang yang memuat atau berbentuk suatu desain yang merupakan tiruan atau sangat mirip (*substantially*) dengan suatu desain yang dilindungi, bila mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan komersial.

TRIPs pun memuat tentang ketentuan yang memberikan wewenang kepada negara anggota dapat menetapkan pengecualian terbatas bagi perlindungan desain industri dengan syarat; tidak bertentangan secara tidak wajar dengan pemanfaatan normal (*normal exploitation*) dari desain industri yang dilindungi, merugikan secara tidak wajar kepentingan sah dari pemilik desain yang dilindungi dan memperhatikan kepentingan yang sah dari pihak ketiga.

Jangka waktu perlindungan desain industri, di dalam TRIPs ditentukan, yaitu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

b. Upaya Perlindungan Desain Industri Secara Nasional Indonesia

Undang-Undang di bidang desain industri saat sekarang ini di Indonesia sudah menjadi *ius constituendum*, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Produk Industri, pada tanggal 20 Desember 2000. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini diharapkan dapat mampu memberikan perlindungan hukum dibidang desain industri, mampu meningkatkan kemampuan daya saing industri dan mempercepat proses pembangunan industri

nasional, serta mampu memberikan rangsangan dan memotivasi aktifitas kreatif dari para desainer/pendesaian untuk secara terus menerus menciptakan desain-desain baru. Melalui pengakuan kepemilikan atas karya intelektual di bidang desain industri yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Adapun pokok-pokok dari isi Undang-Undang Hak Desain tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1). Pengertian Desain Industri

Desain industri dibentuk oleh 2 (dua) kata, yaitu desain dan industri. Dalam Kamus Inggris-Indonesia karangan Jonh M. Echols, desain diartikan sebagai: potongan, model, pola, kontruksi, mode, tujuan, rencana. Sedangkan dalam Kamus *Webster* desain mengnadung arti: gagasan awal, tantangan, perencanaan, pola, susunan, rencana, proyek, hasil yang tepat, pikiran, maksud, kejelasan dan seterusnya. Dengan melihat perbandingan demikian maka dapatlah dilihat bahwa uraian pengertian desain dalam Kamus *Webster* jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Echols. Menurut Imam Buchori Zainuddin, definisi desain ini tergantung dari mana seseorang mendekatinya. Yustiano, memberikan gambaran ruang lingkup desain yang mencakup pembuatan peralatan sehari-hari dari yang paling kecil seperti sendok, garpu, hingga pada corak dan model tekstil serta pakaian, perumahan hingga tata kota beserta alat-

alat transpor beserta jaminannya. Sehingga menurut Muhammad Djumhana, saat ini paling tidak kita akan mengenal 4 (empat) disiplin desain yang utama, yaitu meliputi:

- a.Desain Interior
- b.Desain Industri
- c.Desain Komunikasi Visual (Grafis)
- d.Desain Tekstil

Sesuai dengan judul dari Tesis ini, ada baiknya penulis juga menguraikan mengenai pengertian dari Industrinya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian tepatnya dalam Pasal 1 disebutkan pengertian industri yaitu:

Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Setelah menguraikan masing-masing pengertian dari kedua pembentuk kata desain industri, selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian desain industri. UNINDO (*United Nation Industrial Development Organization*) memberikan definisi sebagai berikut : Desain Industri adalah suatu kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan



mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi dan teknologi, pemasaran serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri.

Sedangkan ICSID (*International Council Society of Industrial Design*) mendefinisikan desain industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek, dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>136</sup>

## 2). Hak Desain Industri

Sama seperti halnya Paten dan Merek, Desain Industri-pun merupakan hak eksklusif yang diberikan negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>137</sup>

<sup>136</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri.

<sup>137</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri.

Hak eksklusif ini meliputi untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.<sup>138</sup>

Pengecualian tanpa persetujuan diberikan apabila berkaitan dengan kepentingan penelitian dan pendidikan serta sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.<sup>139</sup>

### 3). Objek Perlindungan Hukum di bidang Desain Industri

#### a). Desain Industri Yang Mendapat Perlindungan

Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru.<sup>140</sup> Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya<sup>141</sup>(yang dimaksud dengan pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak, elektronik termasuk juga keikutsertaan di dalam suatu pameran<sup>142</sup>).

Yang dimaksud dengan pengungkapan<sup>143</sup> sebelumnya, yaitu pengungkapan desain industri yang sebelum;

#### (a) Tanggal penerimaan;atau

<sup>138</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>139</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>140</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>141</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>142</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>143</sup> Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri

(b) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;

(c) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia

Desain industri tidak dianggap telah diumumkan<sup>144</sup> apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (bulan) sebelum tanggal penerimaannya, desain industri tersebut:

(1) Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui secara resmi;

(2) Atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

#### b). Desain Industri Yang Tidak Mendapat Perlindungan

Hak desain Industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.<sup>145</sup>

Pengaturan ini sebetulnya akan menimbulkan banyak penafsiran tentang suatu desain yang dianggap bertentangan tersebut

<sup>144</sup> Pasal 3 Undang-Undang Desain Industri

<sup>145</sup> Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri

atau bersifat relatif. Sebaiknya ketentuan sebuah desain boleh didaftarkan atau tidak, ditentukan secara limitative juga.

#### 4) Subjek Desain Industri

Pada prinsipnya yang berhak menerima hak desain industri adalah pendesaian atau yang menerima hak tersebut dari pendesaian.<sup>146</sup> Apabila pendesaian terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama, maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain.<sup>147</sup>

Jika suatu desain produk industri dibuat dalam rangka hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.<sup>148</sup> Apabila sebuah desain dibuat berdasarkan pesanan, namun tetap dalam lingkungan instansi pemerintah pemegang desain industri adalah pemesan.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>147</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>148</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>149</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

Apabila sebuah desain industri dibuat berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat desain tersebut dianggap sebagai pemegang hak desain industri dan pendesain, kecuali diperjanjikan lain.<sup>150</sup>

Konstruksi hukum seperti itu hanya dapat diingkari apabila para pihak (pendesain dan atasan atau pemesan) memperjanjikan lain. Artinya, dapat saja status pemegang hak desain industri ditentukan secara berbeda.

#### 5). Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri

Jangka waktu perlindungan terhadap desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>151</sup>

Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut, dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>152</sup>

Jangka waktu perlindungan ini telah sesuai dengan sebagaimana yang diatur di dalam Persetujuan TRIPs.

#### 6). Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Untuk memperoleh hak desain industri di dapatkan dengan cara mengajukan permohonan (pendaftaran).<sup>153</sup>

<sup>150</sup> Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Desain Industri

<sup>151</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>152</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>153</sup> Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.<sup>154</sup>

Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk<sup>155</sup>:

(a) Satu desain Industri, atau

(b) Beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama.

#### 7). Pemeriksaan Desain Industri

Masalah pemeriksaan Undang-Undang tentang Desain Industri, menganut dua sistem pemeriksaan, yaitu pemeriksaan formalitas (administratif)<sup>156</sup> dan pemeriksaan substantif<sup>157</sup>.

Pada prinsipnya Direktorat Jendral HKI memberlakukan pemeriksaan formalitas (administratif) terhadap permohonan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang ini. Pemeriksaan Substantif<sup>158</sup> akan dilakukan oleh pemeriksa apabila terdapat keberatan-keberatan yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif dari pihak yang berkepentingan.

#### 8). Pengalihan Hak dan Lisensi

<sup>154</sup> Pasal 12 Undang-Undang Desain Industri

<sup>155</sup> Pasal 13 Undang-Undang Desain Industri

<sup>156</sup> Pasal 24 Undang-Undang Desain Industri

<sup>157</sup> Pasal 25 Undang-Undang Desain Industri

<sup>158</sup> Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain Industri

Seperti halnya bidang-bidang HKI lainnya, desain industri dapat dialihkan atau beralih haknya<sup>159</sup> dengan cara:

- (a) Pewarisan;
- (b) Hibah;
- (c) Wasiat;
- (d) Perjanjian tertulis; atau
- (e) Sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain pengalihan hak seperti di atas, desain Industri dapat dialihkan oleh pemegang dengan cara lisensi<sup>160</sup> untuk melaksanakan hak untuk membuat, menjual, memakai atau mengimpor Desain Industri dan sebagainya (*hak eksklusif*).

Namun demikian lisensi ini dilarang<sup>161</sup> memuat ketentuan yang baik langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

#### 9). Pembatalan Pendaftaran Desain Industri

Dalam hal pendaftaran sebuah desain Industri terdiri dari dua cara, yaitu pertama, pembatalan berdasarkan permintaan pemegang hak

<sup>159</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri

<sup>160</sup> Pasal 33 Undang-Undang Desain Industri

<sup>161</sup> Pasal 36 Undang-Undang Desain Industri

desain industri<sup>162</sup> yang diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI, namun pembatalan tidak dapat dilakukan apabila penerima lisensi yang desain industri tercatat dalam Daftar Umum desain industri yang tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.<sup>163</sup>

Keputusan pembatalan diberitahukan kepada pemegang hak desain industri, penerima lisensi dan pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyatakan bahwa hak desain industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal keputusan pembatalan.

Kedua, pembatalan pendaftaran desain industri berdasarkan gugatan<sup>164</sup> yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan berdasarkan Pasal 2 (2) atau Pasal 4 melalui Pengadilan Niaga. Terhadap putusan pengadilan Niaga hanya dapat dimohonkan Kasasi<sup>165</sup>.

### 3. Upaya Penegakan Hukum Hak Atas Desain Industri dan Kendalanya.

Penegakan hukum dapat dibedakan dalam penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif adalah upaya untuk mendorong masyarakat agar mudah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan penegakan hukum secara represif berhubungan dengan penetapan sanksi hukum

<sup>162</sup> Pasal 37 Undang-Undang Desain Industri

<sup>163</sup> Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

<sup>164</sup> Pasal 38 Undang-Undang Desain Industri

<sup>165</sup> Pasal 40 Undang-Undang Desain Industri



terhadap pelanggar hukum yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan pribadi orang lain, baik melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme diluar pengadilan.

Dengan mengacu kepada makna penegakan hukum tersebut, maka instrumen penegakan hukum dapat pula diklasifikasikan berdasarkan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan instrumen penegakan hukum yang bersifat represif. Instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif yang tidak memberikan sanksi, seperti aturan tentang prosedur, mekanisme, dan tata cara penyeleksian atau pengujian. Termasuk pula dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum dan sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat baik melalui kegiatan penyuluhan hukum, maupun melalui kegiatan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Disamping itu, instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif meliputi juga upaya-upaya non represif dari aparat penegak hukum, dalam mendorong dan memotivasi masyarakat agar menaati aturan-aturan hukum yang secara positif berlaku.

Instrumen penegakan hukum represif meliputi penjatuhan sanksi administratif untuk pelanggaran ketentuan hukum administrasi, penjatuhan sanksi keperdataan berupa melaksanakan kewajiban hukum tertentu untuk perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan orang lain, dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana (tindak pidana). Untuk pelanggaran kaidah keperdataan dimungkinkan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*), seperti dengan melalui arbitrase, negosiasi, mediasi dan rekonsiliasi.

Tersedianya penyelesaian sengketa hak desain industri melalui lembaga arbitase dan lembaga penyelesaian alternatif merupakan kebijakan yang tepat karena model seperti ini juga dianut oleh negara-negara yang telah lebih dahulu melindungi Hak atas Karya Intelektualitas.

Instrumen penegakan hukum yang tersedia di dalam Undang-Undang Hak Desain Industri meliputi, instrumen hukum administrasi, instrumen hukum perdata, dan instrumen hukum pidana. Selain itu dibuka pula peluang penyelesaian model arbitase dan penyelesaian sengketa alternatif diluar mekanisme peradilan.

Instrumen administrasi yang tersedia untuk menegakkan hak desain industri, dalam Undang-Undang Desain Industri terbatas pada instrumen preventif, yaitu adanya lembaga pemeriksaan substantif dan kesempatan mengajukan keberatan dalam mekanisme pendaftaran atas karya desain industri guna mendapatkan hak desain industri melalui Dirjen Hak atas Karya Intelektual. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Hak Desain Industri menyebutkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan yang mencakup hak-hak substantif terhadap pendaftaran suatu karya desain industri selama pengumuman.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas atas karya desain industri yang didaftarkan dan untuk mengeliminasi kesempatan penyalahgunaan hak desain industri seorang pendesain/desainer oleh orang lain yang ingin menarik keuntungan atas karyanya.

Penyelesaian sengketa hak desain industri dengan instrumen hukum perdata dilakukan melalui proses gugatan kepengadilan niaga. Ada tiga jenis gugatan yang

dapat dilakukan dalam sengketa hak desain industri, yaitu gugatan pembatalan pendaftaran desain industri (Pasal 39 Undang-Undang Desain Industri), gugatan ganti kerugian dan gugatan penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 52 Undang-Undang Desain Industri).

Alasan pengajuan gugatan pendaftaran ada dua macam. Pertama, karena karya desain industri bukan merupakan karya desain industri yang orisinal (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri). Kedua, karena desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri).

Gugatan perdata terhadap pembatalan pendaftaran, ganti kerugian, dan gugatan penghentian semua perbuatan dilakukan ke pengadilan niaga.<sup>166</sup> Artinya, pelanggaran aspek hukum keperdataan dari hak desain industri menjadi kompetensi peradilan niaga. Mengingat jumlah peradilan niaga sangat terbatas, apakah pengaturan hukum seperti ini tidak mempersulit para pendesain/desainer kerajinan dan atau pemegang hak untuk melakukan gugatan guna memperjuangkan hak-hak dan kepentingan-kepentingannya.

Mengenai penggunaan instrumen hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dilakukan dengan mengkriminalisasikan perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Kriminalisasi adalah kebijakan pembentuk undang-undang menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya

---

<sup>166</sup> Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri

bukan perbuatan terlarang (bukan tindak pidana) menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana dengan ancaman pidana tertentu.

Dalam Undang-Undang Desain Industri ada dua macam perbuatan yang ingin dikriminalisasikan menjadi tindak pidana desain industri (Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri). Pertama, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 9 adalah dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, dan mengimpor produk yang diberi Hak Desain Industri.

Kedua, barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 atau Pasal 23 atau Pasal 32 Undang-Undang Desain Industri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 45. 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 8, 23 dan Pasal 32 adalah menghapuskan nama pendesain dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri, karena tugasnya bekerja untuk dan /atau atas nama Direktorat Jendral berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan, atau karena hak desain industri dialihkan. Tindak pidana tentang desain industri ini merupakan delik aduan.

Catatan yang perlu diberikan terhadap penentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Desain Industri adalah bentuk perlindungan yang luas dari pada

yang dikehendaki TRIPS, karena pencantuman aspek pidana dalam TRIPS terbatas delik tertentu dalam hak cipta dan merek.<sup>167</sup>

Mengingat desain industri yang terdaftar dan dilindungi lebih banyak merupakan hasil karya asing, maka akan lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk tidak menggunakan instrumen hukum pidana bagi perlindungan dan penegakan desain industri. Sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membiayai polisi, jaksa, dan hakim yang memproses pelanggaran desain industri yang sebenarnya merupakan karya desain asing.

Di samping itu, menetapkan tindak pidana desain industri merupakan perlindungan yang berlebihan karena aspek kepentingan hukum yang dilindungi dalam delik tersebut lebih merupakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hal itu hanya menyangkut kepentingan para desainer desain industri, bukan merupakan kepentingan seluruh masyarakat.

Efektifitas berlakunya hukum secara sosiologis dapat dilakukan dengan pendekatan kekuatan (*machttheorie*) dan pendekatan pengakuan (*anerkennungtheorie*). Pemberlakuan hukum dengan pendekatan kekuatan mengandalkan aspek kekuasaan yang ada di tangan aparat penegak hukum untuk memaksa masyarakat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sedangkan

<sup>167</sup> Pasal 61 Bagian 5 tentang Prosedur Kriminal dalam TRIP's, yaitu:

" Anggota **wajib** menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan **merek dagang** atau pembajakan **hak cipta** yang dilakukan dengan sengaja....., Anggota **dapat** menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara lain pelanggaran terhadap HKI, terutama dimana tindak pidana dilakukan dengan sengaja dan untuk tujuan komersial". Departemen Perdagangan dan Industri, Terjemahan Resmi Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, 1996.

pemberlakuan hukum dengan pendekatan pengakuan mengutamakan kesadaran hukum untuk mematuhi aturan hukum secara sukarela.

Pendekatan kekuatan memiliki kelemahan karena menggantungkan kepatuhan hukum masyarakat kepada paksaan yang datang dari luar diri anggota masyarakat, khususnya ketakutan kepada aparat dan sanksi hukum yang diancamkan terhadap suatu perbuatan. Pemberlakuan hukum yang menggunakan pendekatan kekuatan bukan hanya membutuhkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparat penegak hukum yang baik, tetapi juga membutuhkan jumlah aparat yang cukup banyak, khususnya polisi. Karena itu ongkos sosial yang diperlukan untuk menegakkan aturan menjadi sangat mahal. Pendekatan ini cocok diterapkan terhadap aturan hukum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam pendekatan pengakuan, kepatuhan kepada hukum tidak tergantung kepada aparat ataupun sanksi hukum yang diancamkan, tetapi dimotivasi oleh kesadaran hukum anggota masyarakat. Pendekatan ini cocok untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Karena aturan yang harus dipatuhi itu sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan masyarakat, maka masyarakat secara otomatis akan mematuhi.

Konsep Hak atas Karya Intelektual yang menempatkan setiap karya intelektual sebagai hak milik pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan barang-barang milik hasil karya kerja fisik (non intelektual), tampaknya kurang sejalan dengan nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia. Menurut Haryati Soebadio, hak cipta

tidak dikenal dalam kebudayaan masyarakat tradisional Indonesia, kecuali pada suku Asmat. Nilai-nilai budaya masyarakat kita tidak mengenal kepemilikan individu terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Karya seni dalam masyarakat tradisional tidak pernah dibubuhi nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya.

Dengan demikian penegakan Hak Atas Karya Intelektual termasuk dalam hal ini hak desain industri, mengalami kendala kultural (lihat pembahasan sub bab a dalam bab ini) karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Hak atas Karya Intelektual kurang sejalan dengan nilai-nilai sosial. Akibatnya, penegakan Hak Atas Karya Intelektual, khususnya hak desain industri, kurang mendapat dukungan masyarakat sehingga sulit untuk ditegakkan. Inilah kendala pertama yang menjadi penghalang penegakan hak desain industri pada masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kendala kedua berkaitan dengan pembajakan karya desain orang lain sudah menjadi tradisi masyarakat yang sudah berlangsung lama. Pembajakan bukan masalah pelanggaran hukum, tetapi juga masalah ekonomi masyarakat karena begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pembajakan. Mereka yang menggantungkan hidup dari kegiatan pembajakan tersebut adalah para buruh dan para pedagang kecil.

Kendala ketiga adalah kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk akibat krisis ekonomi sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Harga barang produk yang orisinal menjadi sangat mahal, pada hal daya beli masyarakat

sangat rendah. Dengan kondisi seperti ini masyarakat terdorong untuk membeli produk-produk bajakan, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Akhirnya, penegakan hak desain industri, menghadapi kendala aparat penegak hukum. Kendala dari sudut aparat bukan hanya berkaitan dengan jumlah aparat yang terbatas, namun juga pada kualitas aparat penegak hukum kita. Sebagai contoh, Selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Desain Industri Permohonan pendaftaran desain masih dilakukan pada kantor Pusat, dalam hal ini Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang terletak di Tangerang. Tidak ada perwakilan di daerah (hal ini berbeda dengan hak cipta, hak paten dan hak merek yang sudah bisa didaftarkan melalui Kanwil Kehakiman). Hal ini terkadang menjadi kendala tersendiri bagi para desainer kerajinan skala menengah kebawah yang berada di daerah yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran desain industrinya. Hal ini tentunya akan berkaitan biaya yang diperlukan melakukan pengajuan permohonan pendaftaran desain ke Tangerang tersebut.

Kondisi Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang -pun sebenarnya kurang mendukung tercapainya tujuan pemberian perlindungan hukum bagi para pemilik desain industri, khususnya berkaitan dengan penegakan atau penanggulangan pelanggaran desain industri yang bersifat preventif. Salah satu penyebab kekurangan tersebut adalah karena cara kerja Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang dalam memeriksa permohonan pendaftaran desain industri, baik yang berupa persyaratan formalitas maupun substantifnya masih dilakukan secara manual-konvensional. Mengingat cara kerja yang masih bersifat



manual tersebut berakibat pula pada lemahnya sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang. Sehingga, ketika dilakukan pemeriksaan substantif, timbul kesulitan dalam pencarian data, apakah desain industri yang diajukan permohonan pendaftaran tersebut menyerupai atau sama dengan desain industri milik orang lain yang lebih terdaftar lebih dahulu. Hingga hari ini belum tersedia data base yang memudahkan pencarian data tersebut.

Disamping itu, sampai dengan saat sekarang aparat Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang, yang menangani proses pendaftaran desain industri masih terpengaruh oleh sistem pendaftaran paten (hal ini dikarenakan aparat pendaftaran desain industri kebanyakan berasal dari Direktorat Paten). Maka tidak aneh jika dalam pelaksanaan pendaftaran desain industri masih tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desain Industri (Undang-Undang No. 31 tahun 2000). Sebagai contoh, di dalam Undang-Undang Desain Industri dinyatakan secara tegas “Sertifikat Desain Industri”, ternyata yang dikeluarkan adalah “Surat Desain Industri”. Tindakan ini jelas tidak sejalan dengan undang-undang. Penyimpangan ini dapat disebabkan karena pengaruh sistem paten yang menyatakan “Surat Paten” terhadap invensi yang telah memenuhi persyaratan dan diterima permohonannya. Pada hal di dalam sistem desain industri berbeda dengan sistem paten. Walau sebagian mengharuskan persyaratan “kebaruan” untuk setiap desain industri yang dapat didaftar yang juga terdapat pada sistem paten, namun system desain lebih dekat pada sistem hak cipta yang tidak menerapkan pemerisaan substansi terhadap setiap pendaftaran yang diterima oleh direktorat itu.

Selain hal di atas, direktorat ini kerap kali meminta kepada pemohon pendaftaran desain industri agar dalam permohonannya dicantumkan “klaim”. Pada hal istilah klaim tidak ada dalam sistem desain industri Indonesia, karena klaim hanya dikenal dalam system paten. Di samping itu, proses jangka waktu pendaftarannya-pun masih belum tepat waktu sebagaimana dicantumkan dalam undang-undangnya.

Efektifitas penegakan Hak Atas Karya Intelektual, termasuk penegakan hukum tentang desain industri, bukan hanya bergantung pada kemampuan kita untuk mengatasi berbagai kendala penegakan hukum tersebut. Tetapi juga bergantung pada kemanfaatan Hak atas Karya Intelektual bagi kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya penguasaan teknologi melalui transfer teknologi dan inovasi teknologi untuk memproduksi barang dan jasa.

D. Mengfungsikan Hukum di Bidang Hak Desain Industri (Undang-Undang No. 31 tahun 2000) Sebagai Sarana Untuk Melakukan Rekayasa Sosial ( Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Usaha Para Pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Diberlakukannya Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain industri, pada dasarnya di samping bertujuan untuk memberikan landasan bagi efektifitas perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri yang telah dikenal luas dalam masyarakat, juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing sektor industri (termasuk di dalamnya industri kerajinan) di Indonesia. Dimana salah satu peningkatan daya saing sektor industri dapat dilakukan dengan memanfaatkan peranan hak desain industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan dilakukannya perlindungan hukum dibidang hak desain industri tersebut tentunya diharapkan dapat

merangsang aktifitas kreatif (daya inovatif) dari para pendesain untuk terus menciptakan desain-desain baru.

Adanya peningkatan aktivitas daya inovasi untuk menciptakan produk-produk desain baru, ditinjau secara ekonomis akan membantu meningkatkan kualitas/mutu dari produk suatu industri, mengingat kualitas/mutu suatu produk disamping ditentukan oleh faktor bahan baku atas produk industri, faktor proses pembuatan atas suatu produk industri, juga ditentukan oleh hasil desain dari karya pendesaian atas suatu produk industri. Dengan meningkatnya kualitas/mutu suatu produk industri secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan daya saing atas produk industri tersebut. Suatu produk industri akan mempunyai daya saing tinggi jika produk industri itu mempunyai kemampuan memasuki pasar (baik dalam negeri maupun luar negeri) dan kemampuan untuk dapat bertahan dalam pasar tersebut.

Dalam usaha ke arah itu, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dapat dijadikan sarana untuk rekayasa sosial ke arah sebagaimana yang dimaksudkan. Melalui Undang-Undang Desain Industri, walau terjadi secara perlahan namun sistematis, maka diharapkan masyarakat (utamanya pada masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat diarahkan untuk menghormati hak moral dan hak ekonomi dari seorang pendesain/desainer kerajinan atas karya desain kerajinannya.

Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat digunakan sebagai sarana rekayasa sosial sebagaimana dikemukakan Stjipto Rahardjo,<sup>168</sup> harus didasarkan atas:

- a. Penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi,
- b. Analisis terhadap penilaian-penilaian dan penentuan jenjang nilai-nilai,
- c. Verifikasi dan hipotesis-hipotesis, dan
- d. Adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku.

Syarat-syarat sebagaimana dikemukakan Satjipta Rahardjo, dikaitkan dengan upaya rekayasa sosial melalui Undang-Undang Desain Industri pada masyarakat pengrajin di daerah Istimewa Yogyakarta, maka.

- a. Upaya pengenalan situasi yang dihadapi dilakukan dengan memahami situasi dan kondisi masyarakat pengrajin di daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala kemanfaatan, keuntungan dan kerugiannya bila diterapkan Undang-Undang Desain Industri karena faktor kemanfaatan suatu peraturan perundang-undangan bagi subyek yang akan terkena aturan tersebut sangat mempengaruhi keefektifan peraturan tersebut.
- b. Pemahaman terhadap nilai-nilai dasar budaya yang melandasi kesadaran hukum masyarakat pengrajin di daerah Istimewa Yogyakarta sangat diperlukan, karena Undang-Undang Desain Industri merupakan nilai baru yang akan digunakan untuk melakukan rekayasa sosial. Karenanya untuk menterjemahkan kedua nilai

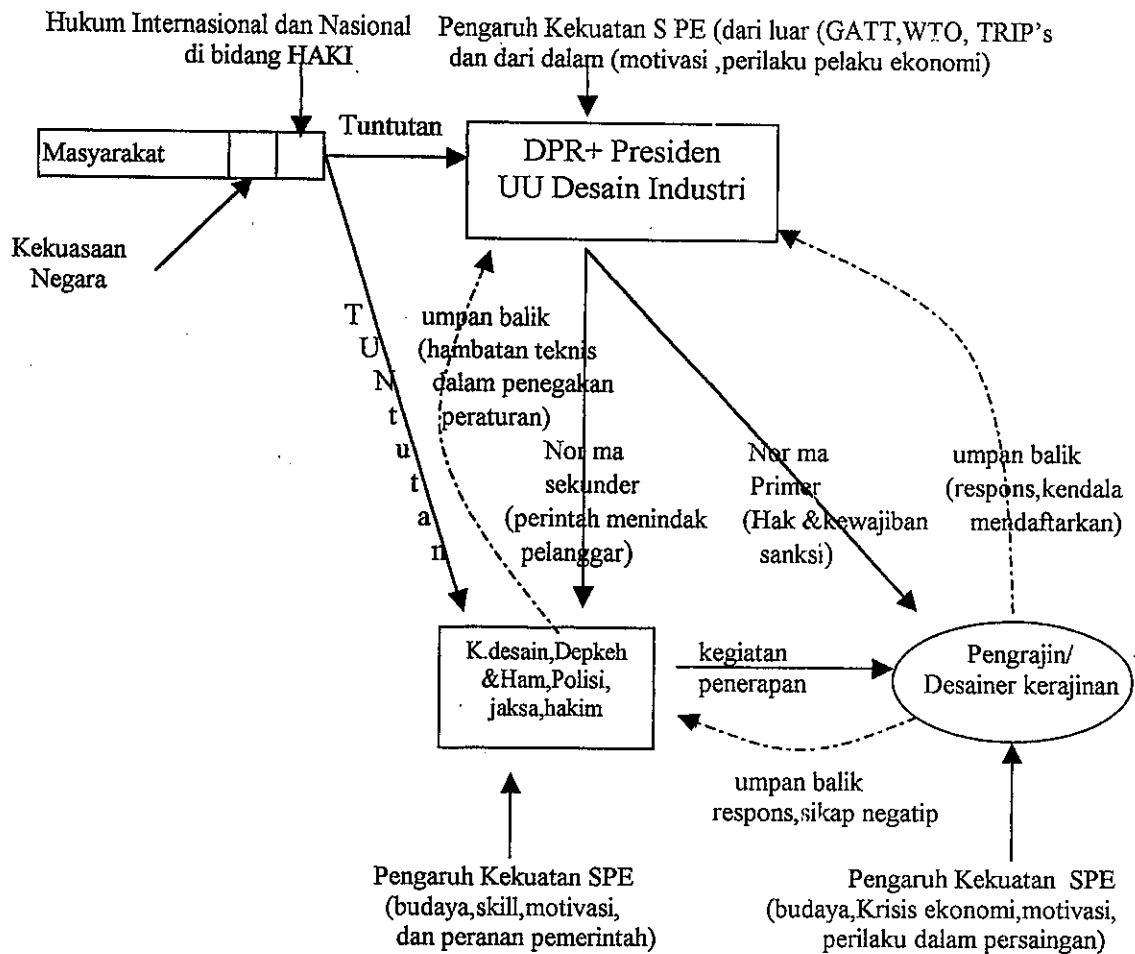
---

<sup>168</sup> Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pembangunan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977, hal. 66.

(nilai lama dan nilai baru) yang sejak awalnya memang berseberangan, maka sangat diperlukan adanya kearifan budaya di dalam menterjemahkan nilai-nilai baru tersebut agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai lama yang masih berlaku.

- c. Dari pengenalan situasi dan nilai sebagaimana dikemukakan di atas, selanjutnya dilakukan verifikasi untuk dapat ditentukan hipotesis-hipotesis tentang akan bagaimana nanti keadaan masyarakat khususnya masyarakat pengrajin di daerah Istimewa Yogyakarta) setelah rekayasa sosial dilakukan.
- d. Selanjutnya harus terus dipantau tentang efek dari Undang-Undang Desain Industri terhadap keadaan masyarakat (khususnya masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta), dalam arti apakah dengan rekayasa sosial keadaan akan menuju kearah yang lebih baik (positip) atau justru sebaliknya (negatip). Apabila keadaan mengarah kearah yang lebih baik (positip) maka rekayasa dapat dikatakan berhasil, sedangkan jika sebaliknya (negatip), maka rekayasa dapat dikatakan sebagai suatu kegagalan (tidak berhasil). Dalam keadaan yang demikian harus dilakukan upaya-upaya lain kearah perbaikannya.

Konsepsi operasional secara sosiologis tentang rekayasa masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk patuh dan sadar menggunakan ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Disain Industri sebagai suatu sarana untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha, dapatlah digambarkan dengan cara melakukan adopsi dari ragaan konsep bekerjanya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman, sebagai berikut:



Keterangan: SPE = Sosial-Politik-Ekonomi

1. Masyarakat (golongan-golongan masyarakat/para pelaku ekonomi) menuntut kepada negara (melalui kekuasaan formalnya) untuk memberikan perlindungan dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual (utamanya di sini adalah hak desain Industri), sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha guna menghadapi

persaingan bebas di era globalisasi perdagangan dunia, dengan cara menggunakan hukum sebagai sarana (Undang-Undang Desain Industri)

2. Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial guna mendorong peningkatan daya saing dan kemandirian usaha dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan, melibatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pembuat hukum menimbulkan akibat-akibat pada peranan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (utamanya di sini adalah para pengrajin/desainer kerajinan untuk selalu meningkatkan kreatifitasnya dalam menciptakan desain-desain baru yang orisinal) dan pejabat pemerintah (Aparat Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, serta Polisi, Jaksa, dan Hakim). Tuntutan masyarakat (golongan-golongan dalam masyarakat / para pelaku ekonomi), oleh lembaga pembuat peraturan (DPR + Presiden, WTO) ditindak lanjuti dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan (baik yang bersifat nasional maupun internasional) yaitu :

- a. Undang-Undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
- b. Undang-Undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO), khususnya mengenai TRIPs, (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

- c. Keppres No. 15 tahun 1997 tentang ratifikasi *Paris Convention for Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris).
  - d. Keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs*.
  - e. Keikutsertaan dalam *The Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs*.
  - f. Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
  - g. Keputusan Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual No. H-08-PR.07.10-Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  - h. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2001 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.
3. Disamping masyarakat menuntut lembaga pembuat peraturan agar membuat peraturan perundang-undangan, sekaligus juga menuntut agar lembaga penerap sanksi (Aparat Direktorat Hak Cipta, Desain Industri dan Rahasia Dagang, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, serta Polisi, Jaksa, dan Hakim) agar memberikan sanksi apabila peraturan-



peraturan hukum tersebut dilanggar oleh seseorang anggota masyarakat baik secara perorangan maupun badan hukum.

4. Lembaga pembuat peraturan, secara sosiologis tidak bekerja diruang hampa. Lembaga ini mendapat tekanan berupa tekanan sosial, politik dan ekonomi yang sangat berhubungan erat dengan sistem kebudayaan, yaitu yang menjadi sumber bagi mengalirnya tata nilai baru yang menjadi arah bagi proses-proses yang berlangsung di bidang politik dan ekonomi tersebut. Lembaga pembuat peraturan di sini dituntut untuk dapat merumuskan nilai-nilai baru tersebut ke dalam norma-norma yang untuk selanjutnya menjadi dasar bagi berlangsungnya proses-proses kehidupan politik maupun kegiatan ekonomi. Umpan balik diharapkan ada dari lembaga penerap sanksi dan pemegang peran. Faktor-faktor diluar lembaga inilah yang turut menentukan corak, jenis,serta muatan peraturan yang dibuat dalam rangka melindungi Hak atas Karya Intelektual (khususnya di bidang hak desain industri).
5. Kesulitan yang dihadapi oleh lembaga pembuat peraturan di lapangan adalah bahwa konsepsi Hak atas Karya Intelektual yang menempatkan setiap karya intelektual sebagai hak milik pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan barang-barang milik hasil karya kerja fisik (non intelektual), tampaknya kurang sejalan dengan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya masyarakat kita tidak mengenal pemilikan individu terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan

seni. Karya seni dalam masyarakat tradisional tidak pernah dibubuhi nama atau tanda lain sebagai pengenalan penciptanya. Dengan demikian penegakan Hak Atas Karya Intelektual termasuk dalam hal ini hak desain industri oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi, mengalami kendala kultural (lihat pembahasan sub bab a, b dan c dalam bab ini) karena nilai-nilai yang terkandung di dalam Hak atas Karya Intelektual kurang sejalan dengan nilai-nilai sosial.

6. Akibatnya, penegakan Hak Atas Karya Intelektual, khususnya hak desain industri, kurang mendapat dukungan dari para pemegang peran (masyarakat pengrajin). Hal ini dapat ditengarai di lapangan bahwa pembajakan karya desain orang lain sudah menjadi tradisi bagi para pemegang peran (masyarakat pengrajin) yang sudah berlangsung lama. Pembajakan bukan masalah pelanggaran hukum, tetapi juga masalah ekonomi para pemegang peran (masyarakat pengrajin) karena begitu banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pembajakan. Mereka yang menggantungkan hidup dari kegiatan pembajakan tersebut adalah para buruh dan para pedagang kecil. Tidak hanya itu saja, adanya kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk akibat krisis ekonomi yang terjadi saat ini ikut menurunkan daya beli masyarakat. Harga barang produk yang orisinal menjadi sangat mahal, pada hal daya beli masyarakat sangat rendah. Dengan kondisi seperti ini masyarakat

terdorong untuk membeli produk-produk bajakan, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah.

7. Dari sudut lembaga penerap sanksi (aparatur penegak hukum) masih menghadapi berbagai kendala teknis (masih terbatasnya aparatur penegak hukum baik ditinjau dari aspek kualitas dan kuantitasnya, sarana dan prasarananya, budaya kerja dari aparatur penegak hukum itu sendiri, serta masih terpusatnya proses pendaftaran hak desain industri di tingkat pusat (lihat pembahasan sub bab c dalam bab ini))

Dari ragaan di atas menunjukkan bahwa penggunaan ketentuan hukum dibidang Hak desain Industri sebagai sarana rekayasa sosial, kurang mendapatkan respons / direspons secara negatif dari para pemegang peran (masyarakat pengrajin), sehingga dilapangan terlihat para pemegang peran (masyarakat pengrajin) tidak menampakkan adanya kesadaran untuk menghormati nilai-nilai moral dan ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang di bidang Desain Industri.

Oleh karena itu penggunaan aturan hukum untuk melakukan rekayasa sosial menjadi tidak berfungsi, dikarena faktor-faktor (faktor budaya, masyarakat, sarana dan prasarana, aparat penegak hukum dan aturan hukumnya) yang melingkupinya kurang terpenuhi.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pemaparan yang dilakukan dan setelah melakukan pembahasan serta analisis terhadap data yang ditemukan, baik dari data primer maupun data sekunder, maka di dapat suatu kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat pengrajin belum menyadari bahwa perlindungan hukum atas suatu karya desain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Hak Desain Industri akan berdampak pada peningkatan daya saing atas suatu produk kerajinan, dan akan berdampak pula pada kelanggengan suatu usaha kerajinan. Ketidak sadaran masyarakat pengrajin itu dikarenakan:

1. Masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam memanfaatkan hak desain industrinya masih mengalami kendala budaya, dimana masyarakat pengrajin dalam hidupnya masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya jawa tradisional yang melingkupinya. Disamping itu juga dalam memanfaatkan hak desain industri masih terbatas pada perilaku kebutuhan ekonomisnya belum mengarah pada perilaku kebutuhan perlindungan hukumnya.

Bagi masyarakat pengrajin di Daerah Istimewa Yogyakarta membiarkan hak desain industrinya dijiplak oleh pengrajin lain itu merupakan suatu sikap yang “bijak” karena dengan dibiarkannya penjiplakan itu berarti pendisaian/desainer kerajinan menganggap dirinya sebagai orang yang

berjiwa sosial (*bersikap pasrah / narimo*) dan berjasa bagi kehidupan pengrajin lain. Baginya kerukunan dan keserasian masyarakat sekelilingnya merupakan suatu hal yang selalu harus di jaga dan dipertahankan.

Bagi masyarakat pengrajin penjiplakan atas karya desain orang lain dianggap sebagai sesuatu yang sudah lazim dilakukan apabila usaha kerajinannya ingin tetap bertahan, artinya suatu usaha kerajinan akan sangat ditentukan juga oleh kemampuan si pengrajin untuk melihat kondisi apa yang sedang menjadi *trend* pasar pada suatu saat tertentu. Sehingga begitu ada barang kerajinan yang disukai dan laris dipasaran pada waktu itu, maka menyebabkan banyak pengrajin yang ikut serta memproduksi barang kerajinan itu, tanpa melihat bahwa barang produk kerajinan itu merupakan hasil dari kreatifitas dan inovasi desainer kerajinan orang lain yang harus dihormati hak kepemilikannya.

Dan bagi masyarakat pengrajin perlindungan hak desain industri belum merupakan prioritas sebagai suatu kebutuhan. Bagi para desainer yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana tetap mempertahankan dan mengembangkan pasar yang ada ,dan bagaimana mendapatkan modal usaha serta bagaimana meningkatkan ketrampilannya.

2. Pengaturan dibidang hak desain industri menurut para pendesain/desainer kerajinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, kurang memberikan motivasi atau berdampak pada peningkatan kreatifitas, kualitas dan daya saing atas produk kerajinannya.

Baginya penciptaan karya desain kerajinan di dalam proses pembuatan produksi kerajinan merupakan suatu tuntutan pasar yang harus dipenuhi apabila usaha kerajinannya tetap langgeng. Di sini para pengrajin tahu bahwa karya desain kerajinan dapat membuat hasil kerajinannya mempunyai daya saing tinggi, sehingga produk kerajinannya diterima dan laku dipasaran. Oleh karena itu menurut para pengrajin mutu/kualitas komoditi kerajinan ditentukan oleh kreatifitas para pengrajin dalam membuat disain kerajinannya didasarkan pada komposisi antara nilai seni (*art*), dengan nilai teknis kemanfaatan produk kerajinan itu dan selera pemakai (konsumen). Jadi kualitas/mutu dan daya saing tidak ditentukan berdasarkan dilindungi atau tidak dalam suatu peraturan hukum. Atas dasar ini-lah maka segala bentuk kreatifitas untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk kerajinan, hanya diarahkan semata-mata untuk “mengalahkan” para pesaing-pesaing mereka yang ada dengan selalu berusaha untuk menciptakan dan membuat ide-ide desain kerajinan yang baru.

Di sini para pendesaian,desainer kerajinan belum melekatkan sistem desain industri sebagai bagian dari strategi bisnis, karena hal itu dianggap sebagai “hukum” yang tidak berkaitan dengan kepentingan bisnis.

3. Upaya-upaya yang dilakukan guna meningkatkan daya saing atas produk kerajinan berdasarkan hak disain industri, selama ini belum dilakukan secara proaktif untuk menyadarkan para pendesain/desainer kerajinan guna melindungi karya desain kerajinan mereka.

Aparatur yang akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Hak desain itu sendiri masih menghadapi berbagai kendala-kendala teknis seperti tidak adanya kewenangan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pendaftaran, sehingga pelaksanaan pendaftaran masih ditangani oleh aparatur dari pusat. Di kantor pusat-pun ternyata juga kurang kondusif untuk menegakkan ketentuan dibidang desain industri karena adanya keterbatasan aparatur yang menangani pendaftaran desain industri dalam pemeriksaan formalitas permohonan pendaftaran disain industri. Keterbatasan ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya kemampuan aparatur dalam menangani proses permohonan pendaftaran, tetapi juga disebabkan oleh masih lemahnya sistem informasi yang dimiliki. Semua pemeriksaan permohonan pendaftaran disain industri masih bersifat manual-konvensional, sehingga, ketika dilakukan pemeriksaan, timbul kesulitan dalam pencarian data, apakah desain industri yang diajukan permohonan pendaftaran tersebut menyerupai atau sama dengan desain industri milik orang lain yang terdaftar lebih dahulu. Hingga hari ini belum tersedia data base yang memudahkan pencarian data tersebut. Di samping proses pendaftaran disain industri masih terpengaruh oleh sistem pendaftaran paten (hal ini dikarenakan aparat pendaftaran desain industri kebanyakan berasal dari Direktorat Paten).

## B. Saran..

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa sosialisasi hak desain industri lebih menfokuskan pada kalangan para penegak hukum, dan akademisi di fakultas hukum, Seandainya sosialisasi itu dilakukan ke para usahawan atau pengrajin, maka sosialisasi itupun lebih menekankan pada aspek hukum dan penegakan hukumnya saja. Sosialisasi yang dilakukan bukan pada aspek perdagangan dan industri, atau secara umum tidak menekankan pada aspek ekonominya, padahal Hak Atas Karya Intelektual khususnya hak desain industri lebih dekat pada aspek perdagangan dan industri. Berdasarkan hal ini maka sosialisasi di bidang hak desain industri yang akan dilakukan hendaknya lebih menekankan pada aspek kemanfaatan ekonomi. Sebab bagi para usahawan atau pengrajin akan memiliki kesadaran hukum yang baik dan benar terhadap perundang-undangan desain industri apabila mereka dapat memahaminya bahwa hak desain industri akan memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan ekonominya



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Abdullah, Taufik, *Membangun Masyarakat Madani*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999
- Alfian, *Transformasi Sosial Budaya Dalam Pembangunan Nasional*, UI. Press, Jakarta, 1986
- Amir M.S. *Strategi Pemasaran Ekspor*, Pt. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 2000.
- Arief, Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 1999.
- Arief, Sritua, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia (pemberdayaan rakyat dalam arus globalisasi)*. CPSM, Bandung 1998.
- \_\_\_\_\_, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Bagian Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum UNDIP, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang, 1999.
- Black, Henry Campbell, et.al. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co. St. Paul, Minnesota, U.S.A, 1990.
- Blau, Peter M. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta, 1987.
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1996.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, *Problema Globalisasi (Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama)*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Djumhana, Muhammad, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar Aplikasi)*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Format-Format Penelitian, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Rajawali, Jakarta, 1995.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku kesatu, kedua, ketiga, dan keempat, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Grossman, Gregory, *Sistem-Sistem Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1998.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Herusatoto Budiono, *Simbolisme Dalam Budaya Jawa*, Hanindita, Yogyakarta, 2001

- Islamy, M.Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Kartadjoemeno, H.S. *GAAT dan WTO (Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan)*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Keraf, Gorys, *Eksposisi dan Diskripsi*, Nusa Indah, Flores, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Eksposisi, Komposisi*, Gramedia Widiaswara Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kusumaatmadja, Moechtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional (Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia)*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, t.th.
- Kusunah, Mulyana. W, *Prespektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Lev, Daniel S, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Lubis, Mulya, T., dan Richard Max Buxbom, *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.
- Mahfud, Muhammad MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.
- Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Miles B. Matthew & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moleong, Lexi, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Mubyarto, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, BPFE, Yogyakarta, 1985.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Mulder, Niels, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.
- \_\_\_\_\_, dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Skripsi, Thesis, Desertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Ngani Nico, *Beberapa Aspek Tantangan Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (sebuah pendekatan sosjo yuridis)*, t. penerbit, Yogyakarta, 1984.
- Nonet, Philipe, & Philip Selznick, *Law and Sociaty in Transition: Toward Responsive law*, Harper & Row Publisher, New York, 1978.
- Pangestu, Mari, Raymond Atje dan Julius Mulyadi (editor), *Tranformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. CSIS, Jakarta, 1996.
- Peter, A.A.G. % Koessriani Siswoşoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum (buku I, II, III)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

- Pranarka, A.M.W dan Vidhandika, *Pemberdayaan (Empowerment)*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Globalisasi, Pemberdayaan dan Demokrasi*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1996
- Priyono, Onny S, dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1996
- Purbacaraka, Purnadi dan Chidir Ali, *Disiplin Hukum dan Disiplin Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kedua)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, alumni, bandung, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, bandung, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia)*, Alumni, Bandung, 1979.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
- Rasidi, Lili & IB Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Rose, Arnold. M. *The Use of Law to Induce Social Change*, dalam Transactions of Thrid Word Congres of Sociology, Jilid VI, Intrnational Sociological Assosiation, 1956.
- Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Salman, Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, 1993.
- Seidman, Robert B., *A General Model, Law and Society Review*, Jilid VII, 1972.
- Soedjono, *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1978.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_, (ed) *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Sosiologi Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, 1990.

- \_\_\_\_\_, dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat (Cetakan II)*, Alumni, Bandung, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum dan Masyarakat (Edisi II)*, Alumni, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Masalah dalam Studi hukum dan Masyarakat*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hukum, Masyarakat dan Teknologi*, Agung Press, Semarang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Agung Press, Semarang, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar UNDIP, Semarang, 6 Desember 1990.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1998.
- Soenandar, Taryana, *Perlindungan hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Soetrisno, Loekman dan Faraz Umayya (editor), *Liberalisasi Ekonomi (Pemerataan dan Kemiskinan)*, P3PK UGM dan Tiara wacana, Yogyakarta, 1995.
- Soerapati Oentoeng, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999.
- Sumaatmadja, Nursid, *Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soemantoro, *Hukum Ekonomi*, UI. Press. Jakarta, 1986.
- Sumaatmadja, Nursid, *Perspektif Studi Sosial*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sumardjono, Maria, SW., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Pustaka Gramedia, Jakarta, 1996.
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi (konsep dasar dan aplikasinya)*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

#### **Makalah-Jurnal/Majalah Ilmiah:**

- Adiwilaga, Rizki A., *Pendayagunaan Desain Produk Industri dan Rahasia Dagang Bagi Pengembangan Industri Kerajinan rakyat di DIY*, makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.

- \_\_\_\_\_, *Implementasi Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Produk Industri*, Makalah, Yogyakarta, 1 Maret 2000.
- Budi, Insan Maulana, *Penerapan Undang-Undang Paten No. 6 Tahun 1989 hingga Undang-Undang Paten no. 13 Tahun 1997: Pengalaman Indonesia Selama Ini*, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 volume 6 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_, *Kewenangan Polisi, PPNS, dan Jaksa Dalam Undang-Undang Desaian Industri, Rahasia Dagang dan Desaian Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Desain Industri dan Merek Qua Vadis*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 14 Februari 2002.
- Dirjen HAKI Departemen Kehakiman RI, Makalah, Sambutan Dalam Seminar, *Peranan HAKI dalam Persaingan Pasar Bebas*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 16 September 1999.
- Divisi Litbang Pt. Aseli Dagadu Djokdja, *Dagadu Djokdja (Perjalanan Empat Tahun Pertama)*, Yogyakarta 1997.
- Hanafi, *Tindak Pidana hak Cipta dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 Volume 6 Tahun 1999.
- Huda, Chairul, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Hukum UII, Volume 2 No. 1 Februari 2000.
- Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, Makalah Sambutan, Dalam Seminar, *Membedah Problema Perlindungan Hak Cipta dan Merek, dan Penegakan Hukumnya dalam Menunjang Kegiatan Perekonomian dan Perdagangan*, Yogyakarta, 8 Juli 2000.
- Kahairady, Ridwan, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, Jurnal Hukum UII, Volume 1 Nomor. 1 September 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 Volume 6 Tahun 1999
- Laporan Penelitian, Hak Kekayaan Intelektual, *Studi Antisipasi Problematika Yuridis Ekonomis Kepemilikan HKI Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kerjasama, Pusat Pengembangan Ekonomi dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001
- Ma'arif, Syamsul, *WTO dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum nasional*, Jurnal Hukum UII, Volume 2, No. 1 Februari 2000.
- Mahfud, Muhammad MD. *Pewadahan Etika Keilmuan di dalam Undang-Undang hak Cipta*, Jurnal Hukum, UII, Nomor 12 Volume 6 tahun 1999
- Nugroho, Heru, *Mengatasi Keterancaman Kebudayaan Lokal dalam Perberdayaan Desa Hutan*, Jurnal, Analisis CSIS, No. 3 Tahun 1999.
- Raharjo, Trisno, *Komentar Terhadap Rancangan Undang\_undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Jurnal Hukum UII, Volume. 1 Nomor. 1 September 1999.
- Peter, Mahmud Marzuki, *Luasnya Perlindungan Paten*, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 Volume 6 tahun 1999.
- Prosseding Reports Workshop, HKI, *Menjamin HKI Melalui Penelitian Sentra HKI Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kreatif dan Inovatif*, Kerjasama, Pusat Pengembangan Ekonomi dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2001

- Santoso, Budi, *Rahasia Dagang (Trade Secret)*, makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- \_\_\_\_\_, *RUU Desain dan Persoalan Hak Cipta*, makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- Sekine, Masaru, *Outline of JPO Policy*, Makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.5 Tahun 1988, halaman 13-23
- \_\_\_\_\_, *Teori-Teori Dalam Ilmu Hukum*. Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.1 Tahun 1989, halaman 32-39.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Teori Dalam Penelitian Empiris*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.7 Tahun 1991, halaman 21-28
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.9 Tahun 1991, halaman 44-50
- \_\_\_\_\_, *Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.5 Tahun 1992, halaman 32-40
- \_\_\_\_\_, *"Grounded Research" Dalam Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.9 Tahun 1993, halaman 28-37
- Soesastro, Hadi, *Daya Saing Industri Indonesia*, Jurnal, Analisis CSIS, No. 3 Tahun 1999.
- Sugeno, Benyamin, *Implementasi Sistem Paten untuk Pembangunan Ekonomi Daerah*, Makalah, Yogyakarta, 8 Juli 2000.
- Supanto, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek*, Makalah Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Surakarta, 14 Februari 2002.
- Suryomurcitro, Gunawan, *Arti penting Perlindungan Merek bagi Produsen dan Konsumen*, Makalah, Yogyakarta, 8 Juli 2000.
- Sutrisno, Nandang, *Implementasi Persetujuan TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurnal Hukum UII, Nomor 12 volume 6 tahun 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, makalah, Yogyakarta, 4 Oktober 2000.
- Tambunan, Mangara, *Desentralisasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal, Analisis CSIS, No. 3 Tahun 1999.
- Umar Purba, A. Zen. *Catatan dan Ikhtisar Atas UU Desain Industri, UU Rahasia Dagang, dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Laporan Tahunan Dirjen HKI, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- Wahyono, Agustinus, *DAGADU: Butuh Implementasi suatu Perlindungan*, Makalah, Yogyakarta, 8 Juli 2000.
- Warassih, Esmi. P, *Pembinaan Kesadaran Hukum*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 5 Tahun XIII-1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Sebagai Sistem Norma Dan Fungsi-Fungsinya*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.5 Tahun 1991.

- \_\_\_\_\_, *Kegunaan Telaah "Kebijaksanaan Publik" Terhadap Peranan Hukum di dalam Masyarakat Dewasa Ini (Sebuah Pengantar)*, Majalah, Masalah-Masalah Hukum, No.11 Tahun XXIV-1994.
- Wiyanto, Wihadi, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Film Berformat VCD/DVD dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Makalah, Yogyakarta, 8 Juli 2000.